DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA

MANUAL PENCEGAHAN TUMBUH KEMBANG PERMUKIMAN KUMUH

2023

KONSEP & STRATEGI, PROGRAM KERJA, MONITORING & EVALUASI



LEMBAR PENGESAHAN TIM PENYUSUN

MANUAL PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU – DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami yang ber-TTD di bawah ini bertanggungjawab penuh atas kebenaran data, dokumen dan isi dari Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru – Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 202 3 berkolaborasi dengan Universitas Pelita Harapan.

Demikian Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru – Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Telah disahkan, 18 Oktober 2023:

***Team Leader* (Ahli Arsitektur Pemberdayaan) & *Ass. Team Leader* (Ahli Arsitektur),**

Dr. Martin L. Katoppo, S.T., M.T.
Ruth E. Oppusunggu, S.T., M.T.

Tenaga Ahli Ekonomi Kemasyarakatan,

Dr. Radityo Arianto, S.E., MBA.

Tenaga Ahli Perancangan Kota,

Ar. Patrisius Marvin Dalimartha, B.Arch, IAI

Tenaga Ahli Hukum & Kebijakan Publik,

Dr. Gunanegara, S.H., M.Hum.

Tenaga Ahli Sipil & Teknik Lingkungan,

Andreas Djukardi, S.T., M.Const. Mgt.
Dr.-Ing. Jack Widjajakusuma

Tenaga Ahli Psikologi Komunitas,

Karel Karsten Himawan, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Samuel Adiprasetya, M.Psi.

Tenaga Ahli Desain Partisipatif,

Dr. Ernest Irwandi, S.Sn., M.Ds.

Tenaga Ahli Pariwisata Berkelanjutan,

Dr. Elang Kusumo, S.H., M.Par., CPC., CHE., CPHCM.

Dekan Fakultas Desain
Universitas Pelita Harapan

Dr. Martin L. Katoppo, S.T., M.T.

Mengetahui,
Bidang Permukiman
Dinas Permukiman Rakyat & Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
Ir. Retno Sulistyaningrum, MAP
NIP. 197012071996032003

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA

MANUAL PENCEGAHAN TUMBUH KEMBANG PERMUKIMAN KUMUH

2023

KONSEP & STRATEGI, PROGRAM KERJA, MONITORING & EVALUASI



KATA PENGANTAR

Terima kasih Tuhan YME, hanya karena berkat-Mu semata Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru , Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan. Penyusunan Manual ini dilaksanakan untuk mendampingi kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman yang dilaksanakan oleh DPRKP Provinsi DKI Jakarta.

Manual ini disusun utamanya untuk pendamping pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di RW kumuh dalam naungan Provinsi DKI Jakarta , sekaligus juga sebagai translasi amanah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 490 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi D KI Jakarta.

Buku Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru ini akan menjadi landasan operasional pelaksanaan program pencegahan tumbuh kembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru yang harapannya dapat digunakan oleh setiap pemangku kepentingan terkait: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas PRKP di 5 Kota Administratif dan 1 Kabupaten, SKPD dan UKPD/PD terkait, dan terutama masyarakat warga Provinsi DKI Jakarta yang berada atau berpotensi menjadi kumuh agar dapat diberdayakan.

Pada akhirnya tujuan dari penyusunan Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru ini adalah agar tercipta Provinsi DKI Jakarta yang lestari-berkelanjutan, berkeadilan sosial dan berlandaskan semangat partisipasi aktif yang kolaboratif antar semua pemangku kepentingan. Semoga juga manual ini menjadi terang dan berdampak serta memberdayakan bagi setiap warga Provinsi DKI Jakarta agar dapat hidup layak.

'Sukses Jakarta untuk Indonesia'

Tim Penyusun
Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Fakultas Desain, Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang berkolaborasi dengan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
dan segenap pemangku kepentingan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

1.1 Latar Belakang 1.1

1.2 Maksud dan Tujuan 1.3

1.3 Sasaran 1.3

1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan 1.3

1.5 Relasi, Struktur, Konsep dan Strategi Pencegahan Kumuh 1.4

BAB 2 PROGRAM KERJA & PERAN PENCEGAHAN KUMUH: PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 2.1

2.1 Pengawasan & Pengendalian 2.1

2.1.1 Hak Atas Tanah dan atau Bangunan / *Tenure* 2.1

2.1.2 Standar Teknis dan Kelaikan Fungsi 2.8

2.1.3 Program Kerja & Peran 2.14

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 2.30

2.2.1 Nilai Komunitas 2.30

2.2.2 Pembangunan Kapasitas Manusia 2.31

2.2.3 Program Kerja & Peran 2.32

BAB 3 SISTEM *SCORING-MONEV* PENCEGAHAN KUMUH: PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 3.1

BAB 4 PENUTUP 4.1

Daftar Pustaka

Referensi Peraturan & Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Referensi Undang-Undang, Peraturan dan Surat Edaran Pemerintah Republik Indonesia

Lampiran

Preferensi lengkap Pencegahan Kumuh Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (QR Code)

Contoh Pemakaian Manual, Studi Kasus: RW 08 Kampung Melayu (QR Code)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta sebaran RW kumuh di DKI Jakarta 1.1

Gambar 1.2 Relasi Pencegahan Kekumuhan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 1.4

Gambar 1.3 Struktur Pencegahan Kekumuhan PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 ..... 1.5

Gambar 1.4 Pengembangan Struktur Pencegahan Kekumuhan Provinsi DKI Jakarta 1.6

Gambar 2.1 Skema Cegah Kumuh Pengawasan & Pengendalian 2.1

Gambar 2.2 Tiga Model Utama Permasalahan Pertanahan (Tenurial Issues) pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta 2.2

Gambar 2.3 Bagan Alir PTSL 2.2

Gambar 2.4 Bagan Alir Konsolidasi Tanah 2.3

Gambar 2.5 Bagan Alir Pengosongan Total 2.3

Gambar 2.6 Bagan Alir Pengosongan Lokal Sebagian 2.4

Gambar 2.7 Bagan Alir Pemanfaatan Aset Pemprov DKI & Pembebanan Hak 2.5

Gambar 2.8 Bagan Alir Pemanfaatan Aset Tanah BUMD DKI Jakarta 2.5

Gambar 2.9 Bagan Alir Pemanfaatan Aset BUMN 2.6

Gambar 2.10 Bagan Alir Redistribusi Tanah melalui Penertiban Tanah Terlantar 2.6

Gambar 2.11 Bagan Alir Redistribusi Tanah melalui dari TORA 2.7

Gambar 2.12 Perbandingan desain hunian konvensional dan desain hunian berbasis bioklimatik 2.8

Gambar 2.13 Permukiman Kumuh dan Kemungkinan Perubahannya melalui Konsep Perencanaan Lingkungan Terintegrasi 2.12

Gambar 2.14 Konsep Perencanaan Jalan, Saluran dan PJU terstandar 2.12

Gambar 2.15 Konsep Pengelolaan Limbah Padat Domestik Terpadu 2.13

Gambar 2.16 Konsep Pengelolaan Limbah Cair Terpadu 2.13

Gambar 2.17 Konsep Air Bersih untuk Semua 2.13

Gambar 2.18 Konsep IPAL 2.14

Gambar 2.19 Konsep Sistem Damkar Pasif 2.14

Gambar 2.20 Skema Cegah Kumuh Pemberdayaan Masyarakat 2.30

Gambar 2.21 Bagan relasi Community Value ke Aspek Fisik Lingkungan melalui 2 konteks Nilai Komunitas: nilai strategis komunitas dan lokasi 2.31

Gambar 2.22 Indikator & alur pemeriksaan pencapaian kesejahteraan psikologis / kebahagiaan warga 2.31

Gambar 2.23 Alur pendampingan keberdayaan ekonomi 2.32

Gambar 4.1 Perhitungan Bobot Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks Pencegahan Kekumuhan & Peningkatan Kualitas Permukiman 4.1

Gambar 4.2 Relasi Bobot Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di konteks Pencegahan Kekumuhan & Peningkatan Kualitas Permukiman 4.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Strategi Desain Pasif di Permukiman Bantaran Kali/Sungai 2.9

Tabel 2.2 Strategi Desain Pasif di Permukiman Pesisir/Kepulauan 2.10

Tabel 2.3 Strategi Desain Pasif di Permukiman Padat Landed Tengah Kota 2.11

Tabel 2.4 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat 2.15

Tabel 2.5 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah di Lokasi Yang Dilarang UU 2.18

Tabel 2.6 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga 2.20

Tabel 2.7 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi 2.26

Tabel 2.8 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk 2.33

Tabel 2.9 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas 2.41

Tabel 2.10 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Ekonomi Masyarakat - Ekonomi Kemasyarakatan 2.42

Tabel 3.1 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat 3.2

Tabel 3.2 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Yang Dilarang UU 3.3

Tabel 3.3 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga 3.4

Tabel 3.4 Scoring & Monev - Pengawasan & Pengendalian: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi 3.6

Tabel 3.5 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk 3.15

Tabel 3.6 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas 3.24

Tabel 3.7 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Ekonomi Masyarakat - Ekonomi Kemasyarakatan 3.26

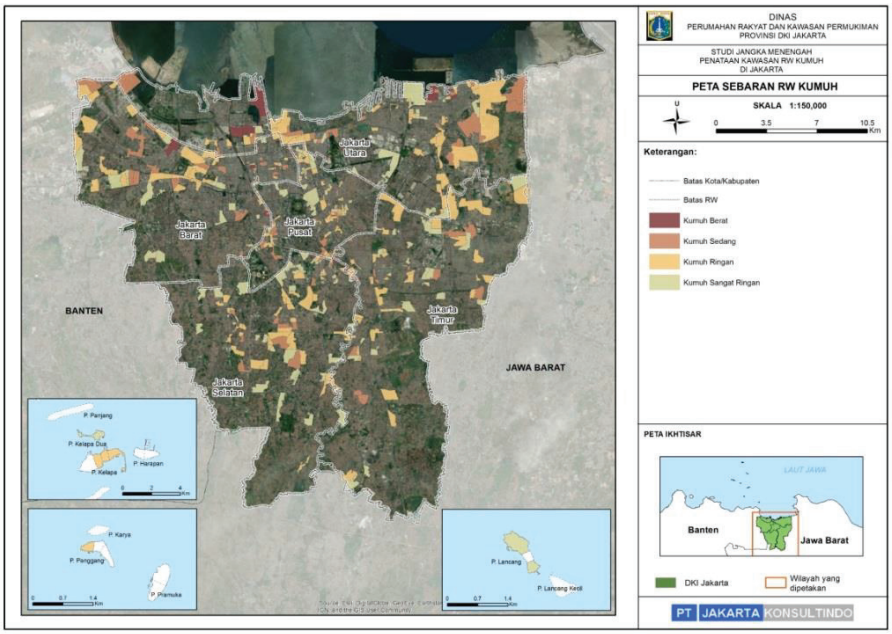
PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan Kota DKI Jakarta sebagai kota megapolitan berlangsung dengan sangat pesat. Perkembangan ini tentu juga menghadirkan dinamika, salah satunya dinamika perkembangan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang terus mengalami pertumbuhan kepadatan hingga dalam beberapa area melampaui ambang batas kepadatan hunian . Hunian-hunian padat ini terjadi seiring dengan pertambahan penduduk dari luar Kota DKI Jakarta. Semua hal ini – kepadatan penduduk akibat urbanisasi, kepadatan hunian di luar ambang batas di tengah kota yang juga se ring kali berdiri bukan di peruntukkannya, hadir sebagai apa yang kita kenali sebagai 'kampung kota' dengan kecenderungan wajah kumuh.

'Kampung-kampung kota' di wilayah DKI Jakarta ini adalah sebuah keniscayaan, karena bagaimanapun juga kampung adalah awal model permukiman di seluruh kota di Indonesia, yang kemudian karena deru modernisasi berubah menjadi kota. Kegagapan kampung kota berkembang dan beradaptasi seiring dengan deru modernisasi membuat keberadaan kampung kota menjadi permasalahan karena wajahnya yang terpinggi rkan dan kumuh. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2021 tercatat 501,920 penduduk miskin bermukim di DKI Jakarta (https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html) dan menempati 20.834 Ha permukiman kumuh berat, sedang, ringan, dan sangat ringan (Dokumen Diskusi Raperda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, DPRKP Provinsi DKI Jakarta, 2020). Sebaran RW kumuh di DKI Jakarta juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta sebaran RW kumuh di DKI Jakarta
(Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta)

Berbagai pendekatan sudah dilakukan untuk membenahi hal tersebut dan yang paling sering dilakukan adalah dengan merelokasi kampung-kampung kota ini. Pendekatan ini kemudian perlahan tergantikan dengan pendekatan yang mengedepankan partisipasi publik. Perat uran

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Permukiman Terpadu menyatakan bahwa area kumuh kota ditata ulang dengan model partisipasi aktif warganya.

Seiring dengan apa yang telah diamanatkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tersebut di atas dan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program Peningkatan Kualitas Permukiman: Perencanaan Berbasis Masyarakat (*Community Action Plan*) dan Pelaksanaan Pembangunan Kolaboratif (*Collaborative Implementation Plan*). Hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman di 226 RW kumuh melalui program tersebut. Kini masih tersisa 219 RW kumuh yang setara dengan 11,29% dari luas total DKI Jakarta. Pada tahun 2023-2026, penataan permukiman kumuh masih menjadi program prioritas daerah dengan target persentase luas kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi 2,26% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Untuk memastikan bahwa wilayah yang telah ditata tersebut tidak kembali kumuh dan untuk mencegah wilayah lain menjadi permukiman kumuh baru, maka pemerintah perlu merumuskan manual penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Sama halnya dengan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman, program pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru juga harus dilaksanakan secara terpadu lintas sektor pemerintahan, serta secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

Perumusan manual ini perlu dilakukan guna menentukan langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang paling efektif, efesien, dan implementatif dalam mengatasi isu atau permasalahan yang ada saat ini maupun potensi permasalahan di masa mendatang, serta menjamin bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui perumusan manual ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketepatan eksekusi pelaksanaan program dan kegiatan, serta memudahkan setiap pemangku kepentingan untuk mengetahui peranan dan tugasnya masing-masing dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Dengan adanya Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru ini dapat memberikan panduan komprehensif untuk penanganan kawasan dan penataan permukiman yang sudah mendapatkan PKP namun masih masuk dalam kategori kumuh, maupun keberlanjutan penataan permukiman yang tidak kumuh. Manual ini diharapkan memandu kinerja Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menghasilkan kawasan permukiman dan masyarakat yang menghuni di dalamnya berdaya dengan dilandasi semangat kolaborasi, lestari dan berkeadilan sosial (Healey, 2006; Katoppo, 2017).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru adalah sebagai berikut:

Maksud

Merumuskan manual penanganan permukiman kumuh, khususnya sebagai panduan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang efektif, efesien, dan implementatif terhadap permasalahan kekumuhan di Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan

Tujuan dari buku ini adalah sebagai berikut:

1) Memberikan strategi penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2) Memberikan rekomendasi program dan kegiatan dalam rangka Penanganan Permukiman Kumuh melalui Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.
3) Memberikan metode evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru.
4) Sebagai *manual book* pelaksanaan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

1.3 SASARAN

Sasaran dari buku ini adalah memberikan rumusan strategi Penanganan Permukiman Kumuh: Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru yang dapat memberikan gambaran arah kebijakan, program maupun kegiatan jangka pendek , menengah dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan kekumuhan di DKI Jakarta.

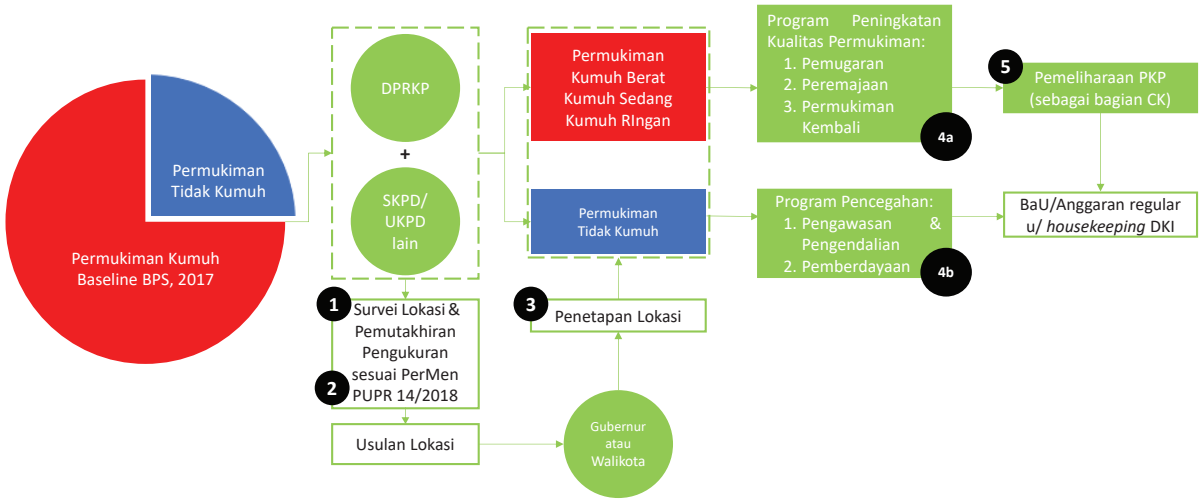
1.4 DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1) Undang-undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
5) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu;
6) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat;
7) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
8) Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen Swakelola.

1.5 RELASI, STRUKTUR, KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN KUMUH

Relasi Pencegahan Kekumuhan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Pelaksanaan program Pencegahan Kekumuhan dan Peningkatan Kualitas Permukiman memiliki relasi yang dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah. Program Pencegahan Kekumuhan (CK) mulai berjalan bersama dengan Program Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) setelah Gubernur atau Walikota menetapkan lokasi Permukiman Kumuh dan Tidak Kumuh yang telah dimutakhirkan data, diukur dan diusulkan lokasinya oleh Tim DPRKP dan SKPD/UKPD lain yang berkaitan. Pengukuran dan penetapan lokasi PKP dan CK dilakukan dengan mengacu dan dikembangkan dari sistem pengukuran Peraturan Menteri PUPR NOMOR 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (lihat bab 3).



Gambar 1.2 Relasi Pencegahan Kekumuhan dan Peningkatan Kualitas Permukiman (DPRKP & Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Pelaksanaan Program Pencegahan Kekumuhan terdiri dari 2 bagian:

1. Pelaksanaan Program Pencegahan Kekumuhan pada lokasi yang ditetapkan Tidak Kumuh,
2. Pelaksanaan Program Pencegahan Kekumuhan pada lokasi yang telah mendapatkan Program Peningkatan Kualitas Permukiman dalam konteks pemeliharaan agar tidak turun peringkat.

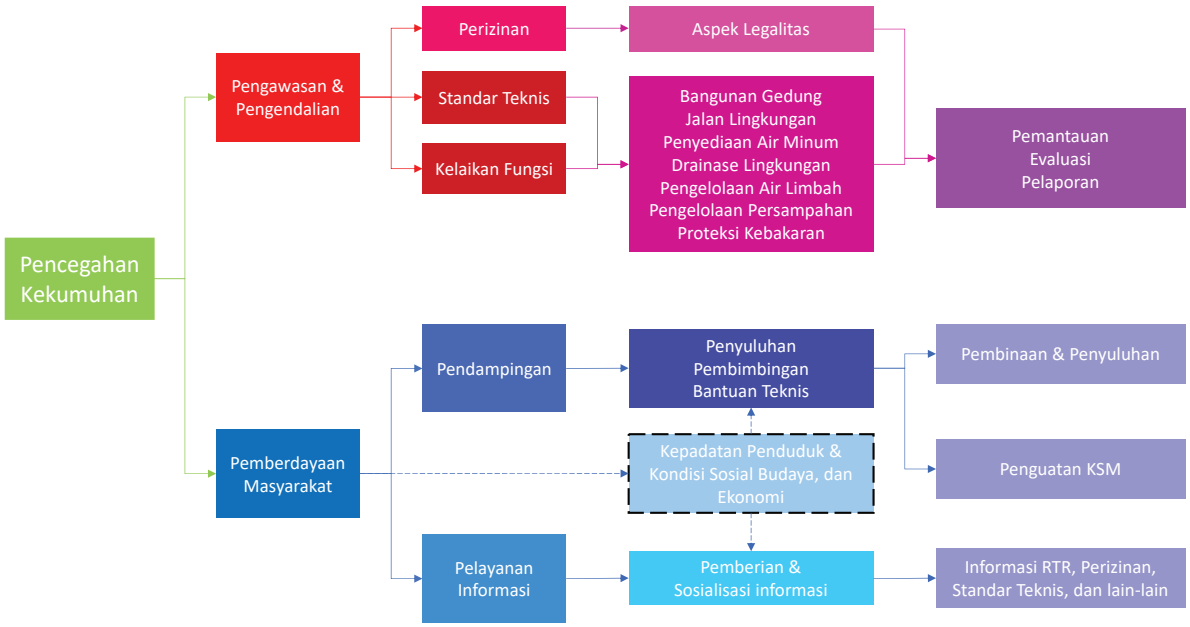
Program Pencegahan Kekumuhan menggunakan anggaran reguler *housekeeping* Provinsi DKI Jakarta dari masing SKPD/UKPD terkait. Program Pencegahan Kekumuhan memiliki 4 tahap:

1) Pra-Pencegahan Kumuh - penetapan lokasi CK, sebagai catatan status lahan/bangunan/ *tenure* sudah jelas (lihat Bab 2 dan 3 khususnya pembahasan aspek Hukum).
2) Konsep Pencegahan Kumuh – memahami lingkup permukiman dan melakukannya dalam 1 narasi (lihat bahasan di bawah).
3) Strategi & Program kerja Pencegahan Kumuh (lihat Bab 2).
4) Pemantauan Pencegahan Kumuh (lihat Bab 3).

Struktur Pencegahan Kumuh

Struktur Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Provinsi DKI Jakarta, **mengikuti dan dikembangkan** dari kerangka pencegahan kumuh dari Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, khususnya Bab II Pencegahan terhadap Bertumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, serta SE DJCK No. 30 tahun 2020 RP2KPKPK. Gambar 1.3 di bawah menunjukkan struktur pencegahan kumuh dari PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018:



Gambar 1.3 Struktur Pencegahan Kekumuhan PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Mengikuti serta mengembangkan struktur di atas, Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Provinsi DKI Jakarta di dilaksanakan melalui:

1) Pengawasan dan pengendalian terhadap perumahan dan permukiman sehingga tidak mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
2) Program peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam konteks pencegahan tumbuh kembang permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas permukiman.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian diselenggarakan melalui asas/konsep perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur dan dilakukan atas kesesuaian:

1) Hak atas Tanah dan atau Bangunan/*tenure*, dan
2) Standar Teknis serta Kelaikan Fungsi:
    a. Bangunan Gedung, dan;
    b. Sistem Lingkungan Terintegrasi: jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Pemberian jaminan hak atas tanah dan atau bangunan/ *tenure* dilaksanakan melalui:

1) Jaminan kepastian hak menempati/menggunakan tanah/bangunan , dengan strategi:
    a. Pemanfaatan Aset,
    b. Pembebanan Hak,
    c. Pengosongan Lokasi Total, dan
    d. Pengosongan Lokal Sebagian (Penggeseran).
2) Jaminan kepastian hak memiliki tanah/bangunan , dengan strategi:

a. Pensertipikatan Tanah Masal (PTSL),
b. Konsolidasi Tanah, dan
c. Redistribusi Tanah - Reforma Agraria.

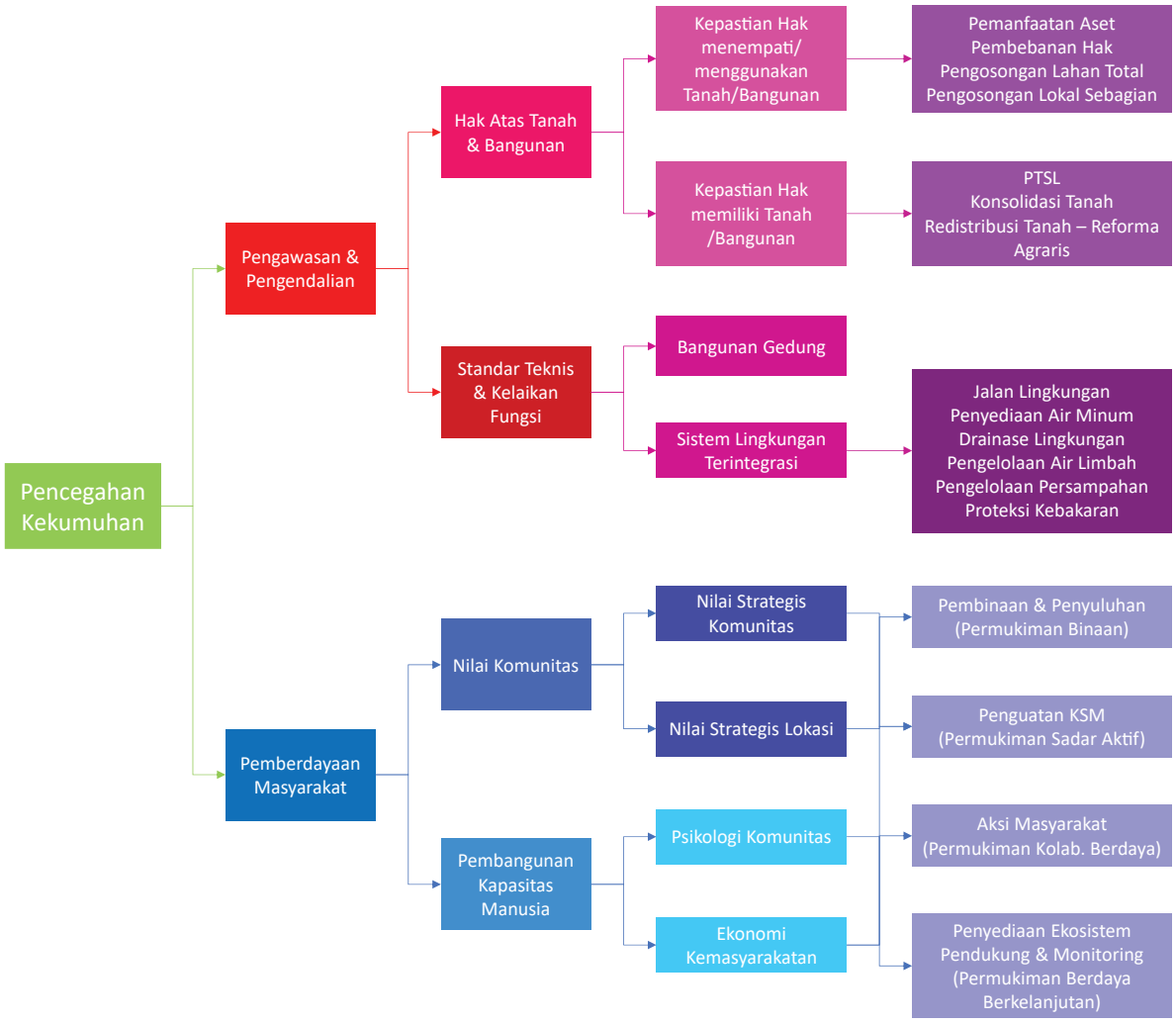
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:

1) Pembangunan Nilai Komunitas, dengan strategi:
   a. Membangun Nilai Strategis Komunitas, dan
   b. Nilai Strategis Lokasi.
2) Pembangunan Kapasitas Manusia, dengan strategi:
   a. Membangun Psikologi Komunitas untuk meningkatkan kondisi sosial budaya, dan
   b. Mengembangkan Ekonomi Kemasyarakatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi.

Ke-2 hal ini dibangun dan dikembangkan s esuai tingkatan kesiapan, melalui:

a. Pembinaan dan Penyuluhan (Permukiman Binaan),
b. Penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) (Permukiman Sadar & Aktif),
c. Aksi Masyarakat (Permukiman Kolaboratif Berdaya), dan
d. Penyediaan Ekosistem Pendukung & Monitoring (Permukiman Berdaya Berkelanjutan).

Bagan struktur Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 1.4 di bawah ini:



Gambar 1.4 Pengembangan Struktur Pencegahan Kekumuhan Provinsi DKI Jakarta (DPRKP & Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

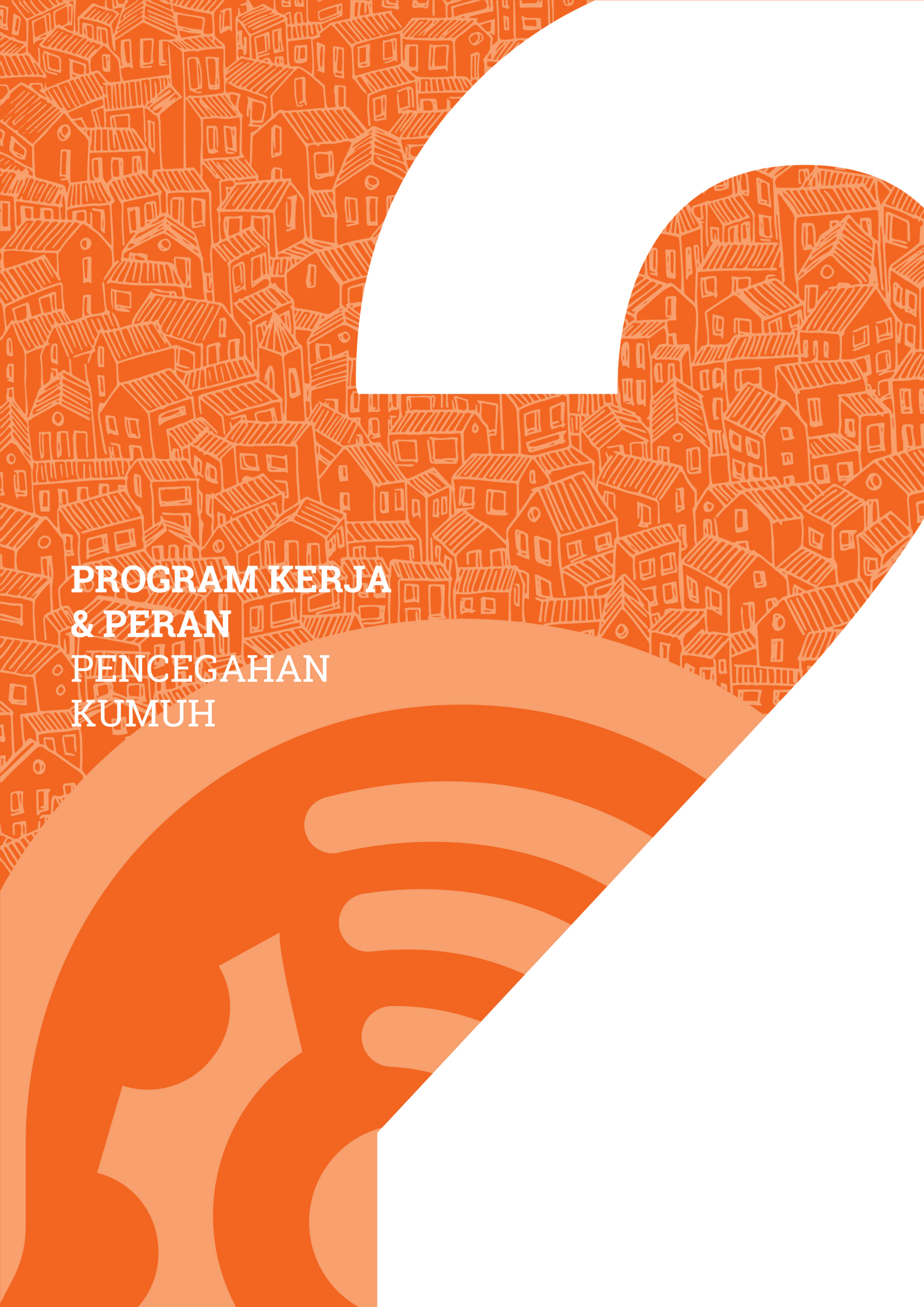
Konsep dan Strategi Pencegahan Kumuh

Konsep besar Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru mengikuti apa yang disampaikan oleh Lefebvre (1998, 2008) dalam pembentukan atau produksi ruang kota, yaitu:

1. **Memahami praktek meruang *(spatial practice)*** – yaitu melihat aktivitas sehari-hari dalam situasi kehidupan urban, adanya ikatan kuat antara ruang dan pengguna yang saling menjamin keduanya berkinerja dan adanya lokasi serta karakteristik tata ruang dari formasi sosial masyarakat
2. **Representasi ruang *(representation space)*** – yaitu mentranslasi parktek meruang menjadi ruang konseptual yang diolah oleh ilmuwan, desainer, perencana kota, teknokrat, dan pemberdaya masyarakat dengan mengidentifikasi apa yang hidup dan apa yang dirasakan dengan apa yang dikandung (**ada sistem tanda**), dan
3. **Ruang representasional *(representational space)*** – yaitu membangun 'Ruang yang Hidup' dari deskripsi dan asosiasi citra. Di tahap ini yang dibangun adalah nilai (dan) budaya untuk *menyemaikan satu narasi* (**ada sistem tanda dan simbol**).

Strategi besar Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru meneruskan konsep di atas yaitu ***menyemaikan satu narasi, yaitu:***

1. Ketika program pencegahan kumuh **masuk ke lahan "kosong", maka pembangunan fisik bisa bekerja lebih dulu, pembangunan manusia dan ketegasan hukum datang mendampingi.** Satu narasi bisa lebih mudah bertutur.
2. Ketika program pencegahan kumuh **masuk ke ruang yang sedang bergulir kumuh, maka pembangunan (ketegasan) hukum perlu bekerja lebih dulu, pembangunan fisik memperkuat, dan, pembangunan manusia mendampingi.** Satu narasi menjadi tantangan.
3. Ketika program pencegahan kumuh **masuk ke lahan padat, maka pembangunan manusia perlu bekerja lebih dulu, ketegasan hukum dan pembangunan fisik mengikuti.** Satu narasi bertutur sesuai konteks.



PROGRAM KERJA & PERAN PENCEGAHAN KUMUH

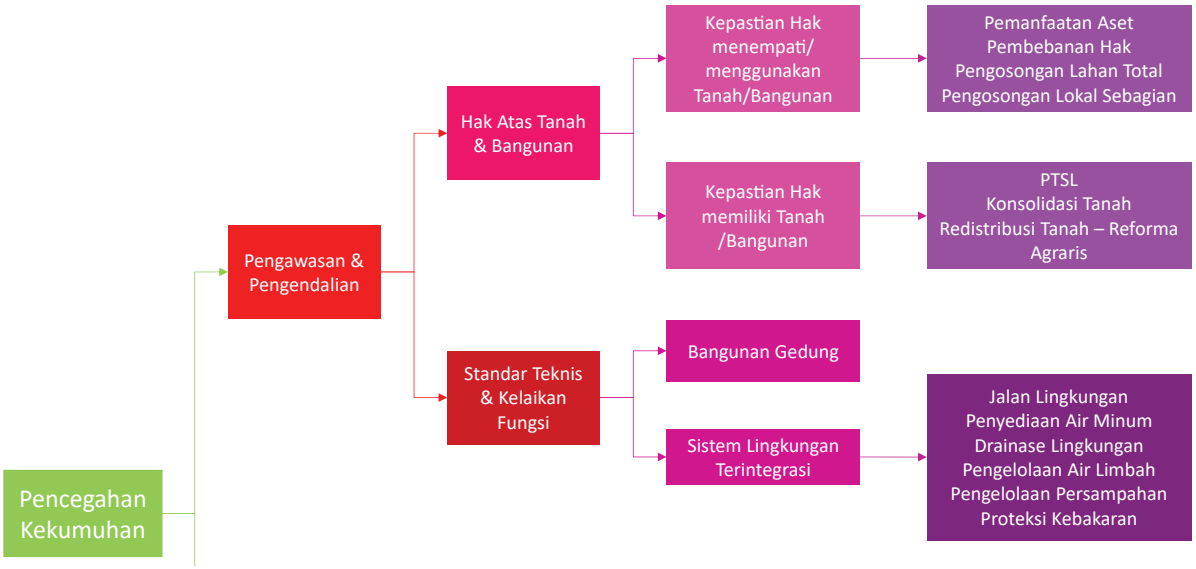
BAB 2 PROGRAM KERJA & PERAN

Bab 2 Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Provinsi DKI Jakarta membahas Program Kerja & Peran dari 2 bagian besar: Pengawasan & Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.1 PENGAWASAN & PENGENDALIAN

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian diselenggarakan melalui asas/konsep perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur dan dilakukan atas kesesuaian:

1) Hak atas Tanah dan atau Bangunan/*Tenure*.
2) Standar Teknis serta Kelaikan Fungsi: Bangunan Gedung dan Sistem Lingkungan Terintegrasi (Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran).



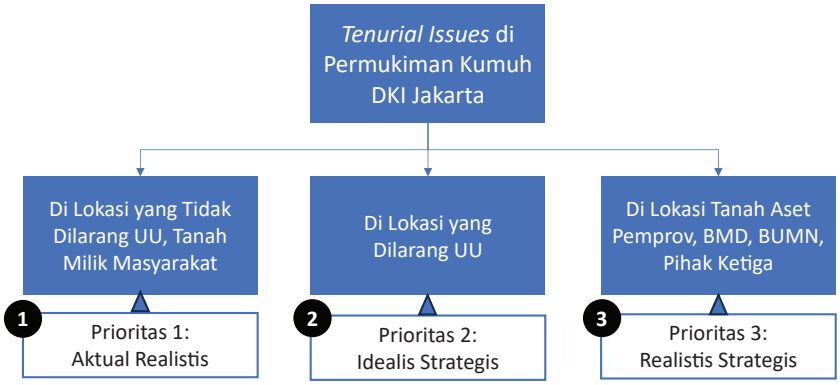
Gambar 2.1 Skema Cegah Kumuh Pengawasan & Pengendalian (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2.1.1 HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN/TENURE

Hak atas Tanah atau Bangunan terdiri dari:

1) Kepastian Hak Menempati/Menggunakan Tanah dan atau Bangunan:
   a) Pemanfaatan Aset.
   b) Pembebanan Hak.
   c) Pengosongan Lahan Total.
   d) Pengosongan Lokal Sebagian.
2) Kepastian Hak Memiliki Tanah dan atau Bangunan:
   a) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
   b) Konsolidasi Tanah.
   c) Redistribusi Tanah-Reforma Agraria.

Tiga masalah pertanahan (*Tenurial Issues*) yang umumnya ada di lokasi-lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



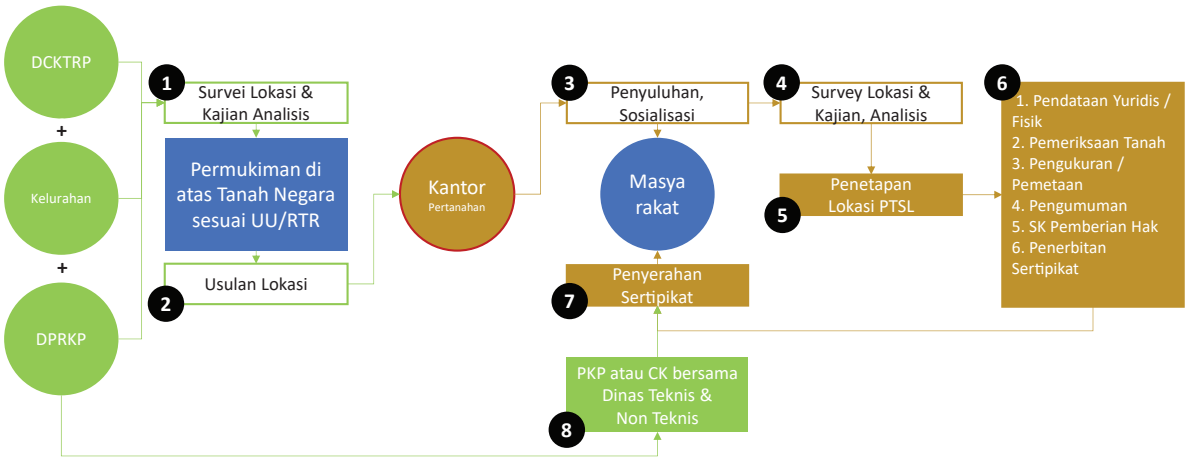
Gambar 2.2 Tiga Model Utama Permasalahan Pertanahan (Tenurial Issues) pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di DKI Jakarta (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan (*Tenurial Issues*) pada Perumahan dan Permukiman Kumuh dalam konteks Pencegahan Kekumuhan di Provinsi DKI Jakarta, maka mengikuti model di atas dapat dilakukan:

1) **Pengusulan kepastian menempati/memiliki Tanah dan atau Bangunan di Tanah Milik Masyarakat atau di Lokasi Lahan yang Tidak Dilarang UU:**

1a. PTSL, Legalisisasi Tanah Masyarakat (Target Prioritas 1)

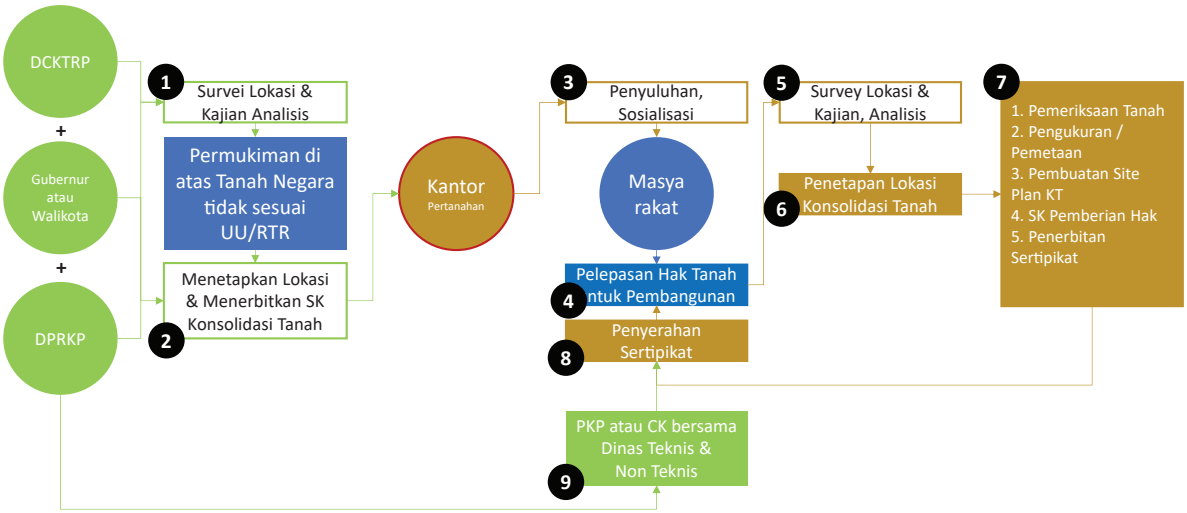
Tanah Milik Masyarakat Berstatus Tanah Negara Bebas, Tanah Negara eks Hak Barat, Tanah Garapan, Tanah Milik Sendiri (Girik) dilegalisasi dan diajukan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari dan oleh Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, tanah -tanah yang berada di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat disertipikatkan untuk kemudian DPRKP atas nama Pemprov DKI Jakarta melanjutkan penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas fisik dan manusianya.



Gambar 2.3 Bagan Alir PTSL (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

1b. Konsolidasi Tanah

Tanah Masyarakat di Lokasi Perumahan Kumuh dilakukan penggeseran/penataan spasial melalui Program Konsolidasi Tanah bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta, atau secara mandiri yakni konsolidasi tanah swadaya -swadana, atau Konsolidasi Tanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .

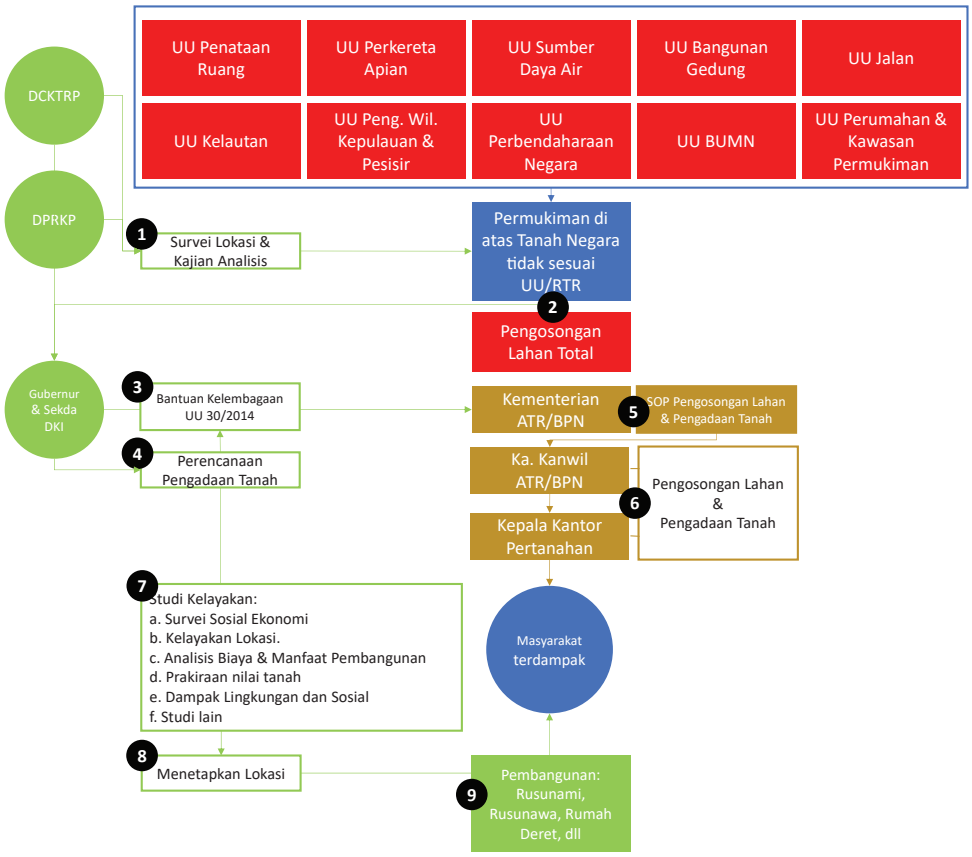


Gambar 2.4 Bagan Alir Konsolidasi Tanah (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2) Pengusulan kepastian menempati atau menggunakan Tanah dan atau Bangunan di atas Tanah yang Dilarang UU:

2a. Pengosongan Lahan Total

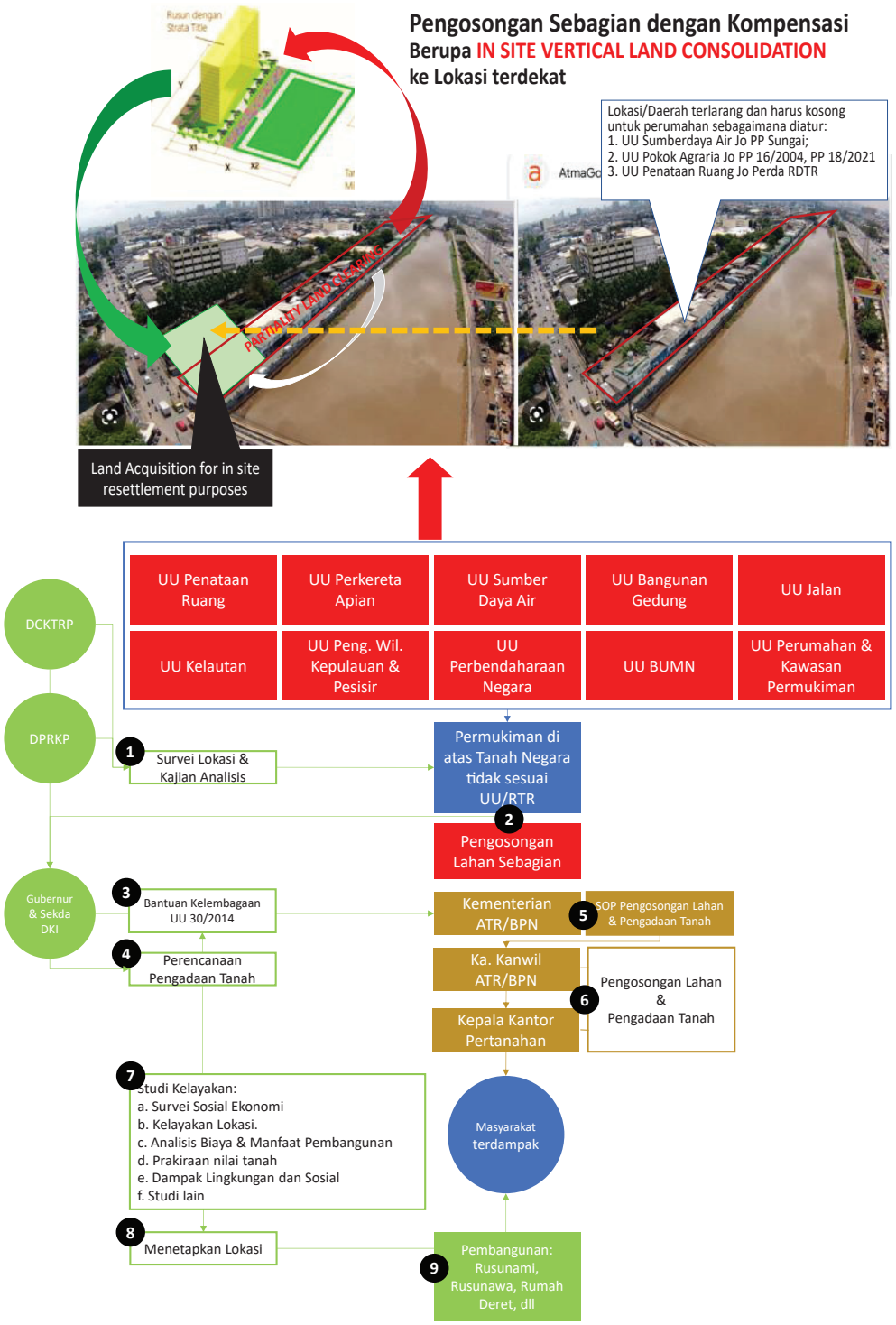
Lokasi dipandang perlu dan ternyata harus dibebaskan atau dikosongkan total karena untuk kepentingan umum atau demi keselamatan dan keamanan kota Jakarta. Seperti antara lain misalnya lokasi yang berada di kolong jembatan; kolong jalan *fly over*; di bawah jembatan TOL; di daerah milik jalan atau sempadan jalan kereta api; di garis sempadan bangunan (GSB) dan jalan (GSJ) atau di daerah milik jalan (damija); di bantaran atau sempadan embung, sungai, danau, waduk, di sempadan /di atas laut.



Gambar 2.5 Bagan Alir Pengosongan Total (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2b. SOP Pengosongan Lokal Sebagian

Praktik pelaksanaan pembebasan tanah dengan pengosongan sebagian pada prinsipnya sama dengan praktik pengosongan total, perbedaannya hanya pada lokasi pengganti yang diletakan di sekitar lokasi agar masyarakat tidak melakukan penolakan ekstrim.

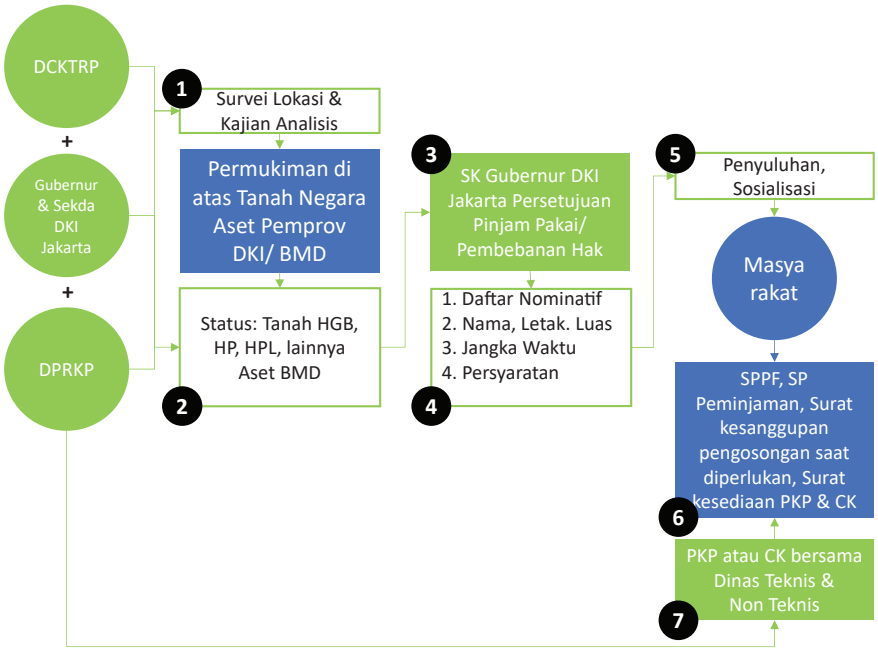


Gambar 2.6 Bagan Alir Pengosongan Lokal Sebagian (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

3) Pengusulan kepastian menempati/menggunakan/memiliki Tanah dan atau Bangunan di atas Tanah Aset Pemprov DKI/BMD/BUMD/BUMN atau milik pihak ketiga:

3a. Pemanfaatan Aset Pemprov DKI Jakarta dan Pembebanan Hak

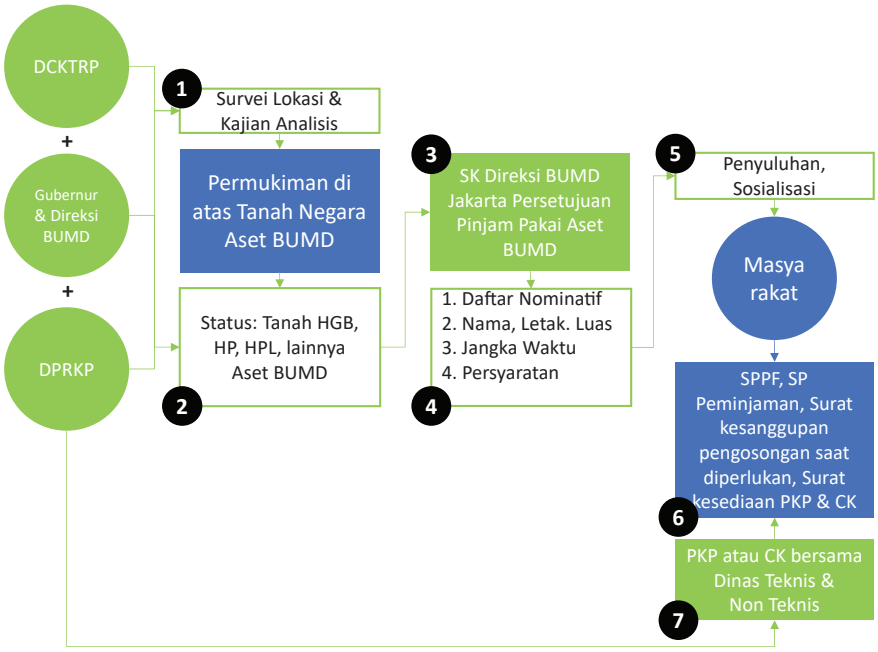
Pemanfatan Tanah Kekayaan Daerah Pemprov DKI Jakarta oleh dan untuk Masyarakat yang berada di Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh DKI Jakarta dengan pembebanan hak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Gambar 2.7 Bagan Alir Pemanfaatan Aset Pemprov DKI & Pembebanan Hak (Tim 1 CK, UPH, 2023)

3b. Pemanfaatan Aset Tanah BUMD DKI Jakarta

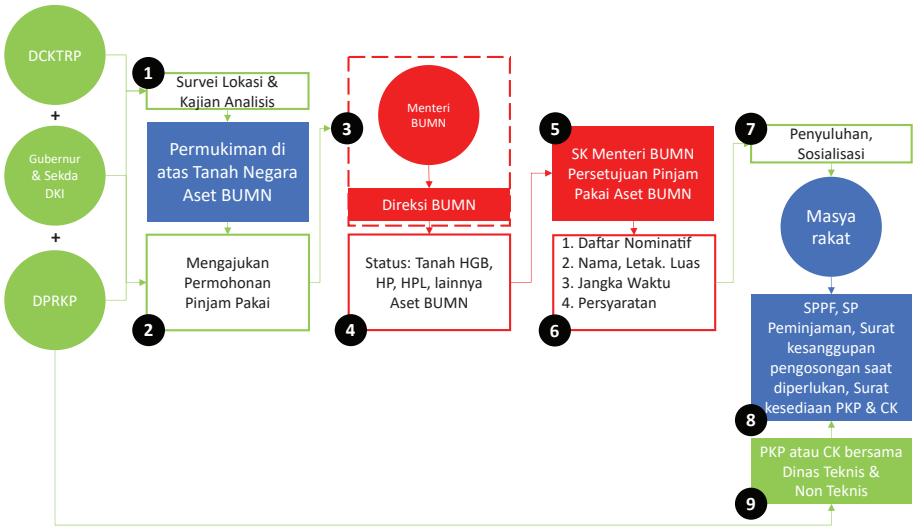
Pemanfaatan Aset Tanah BUMD DKI Jakarta untuk Masyarakat di Lokasi Perumahan Kumuh untuk penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas fisik dan manusianya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Gambar 2.8 Bagan Alir Pemanfaatan Aset Tanah BUMD DKI Jakarta (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

3c. Pemanfaatan Aset BUMN

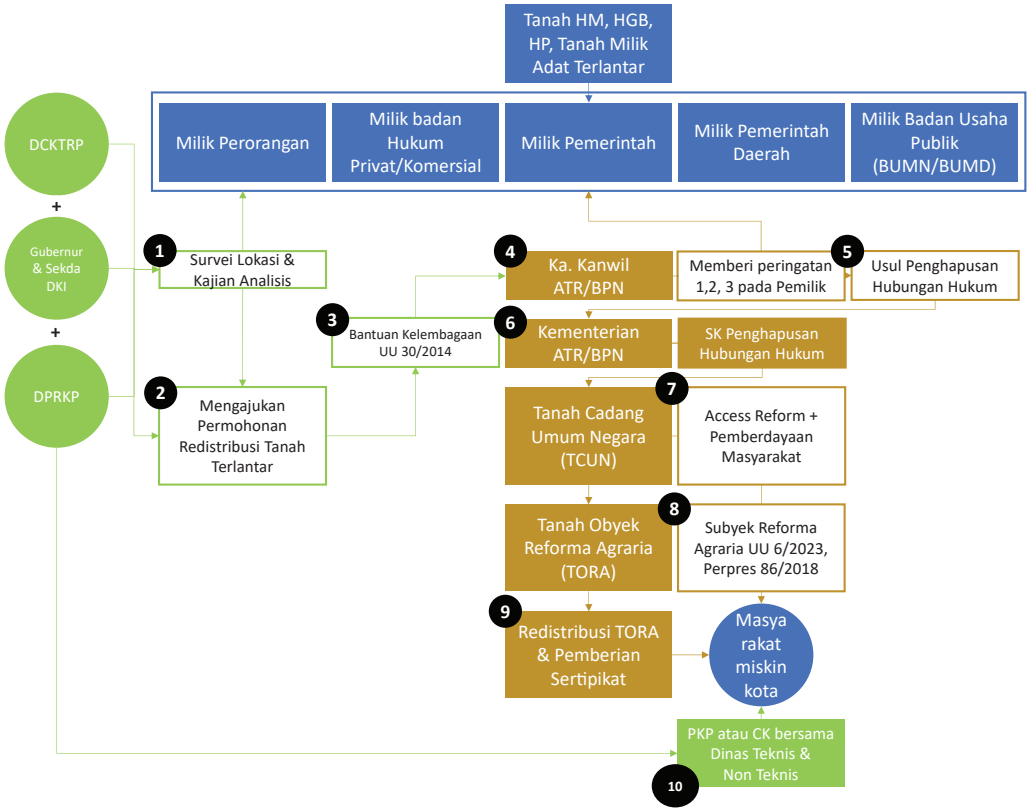
Masyarakat di Lokasi Perumahan Kumuh (hanya) dapat meminjam/meanfaatkan tanah aset-kekayaan BUMN untuk jangka waktu tertentu dengan cara sebagai berikut:



Gambar 2.9 Bagan Alir Pemanfaatan Aset BUMN (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

3d. Redistribusi Tanah melalui Penertiban Tanah Terlantar

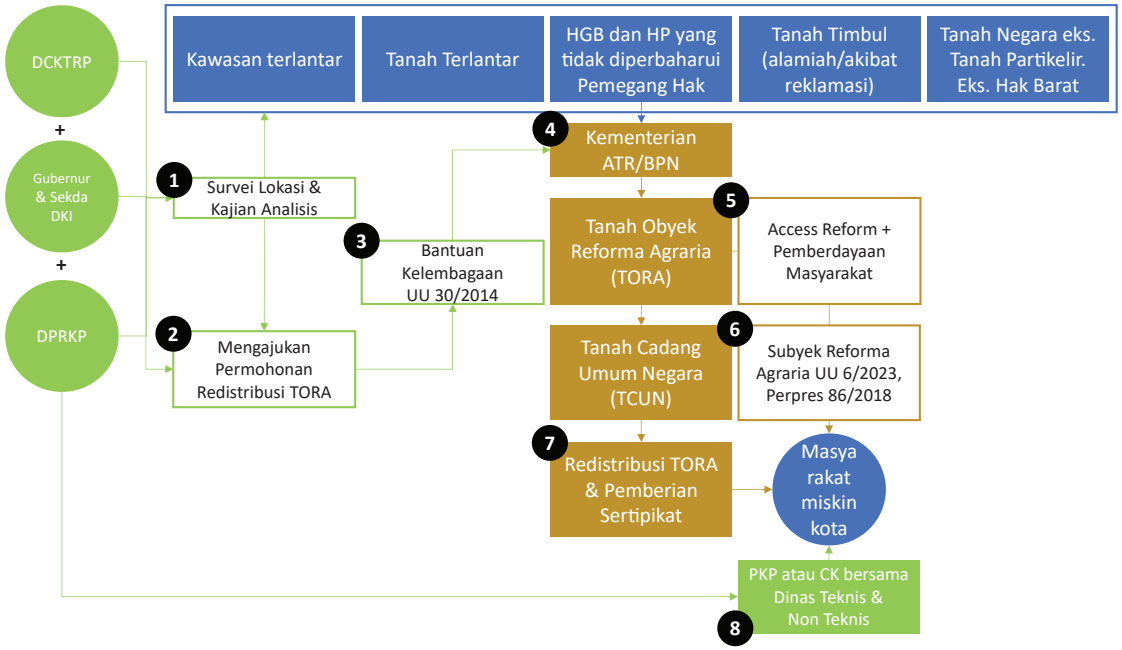
Tanah pihak ketiga, milik badan hukum privat, badan hukum publik (BUMN/BUMD) ataupun milik daerah (BMD), yang sudah memiliki sertipikat hak atas tanah namun tanahnya nyata -nyata dikuasai fisik masyarakat dapat ditetapkan sebagai obyek tanah terlantar dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (TN), untuk kemudian diredistribusikan dan diterbitkan status kepemilikan untuk masyarakat yang menduduknya. Setelahnya ditindaklanjuti dengan penanganan dan peningkatan kualitas fisik dan manusia oleh Pem prov DKI Jakarta.



Gambar 2.10 Bagan Alir Redistribusi Tanah melalui Penertiban Tanah Terlantar (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

3e . Redistribusi Tanah dari Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) oleh Kementerian ATR/BPN, dapat diajukan permohonan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk dilakukan redistribusi kepada masyarakat DKI Jakarta untuk kepentingan penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diatur UU No. 1 Tahun 2011 sekaligus untuk penanganan fakir miskin masyarakat di DKI Jakarta sebagaimana yang diamanatkan UU No. 13 Tahun 2011. Sejalan dengan itu berkolaborasi dalam *access reform* dengan Kementerian ATR/BPN.



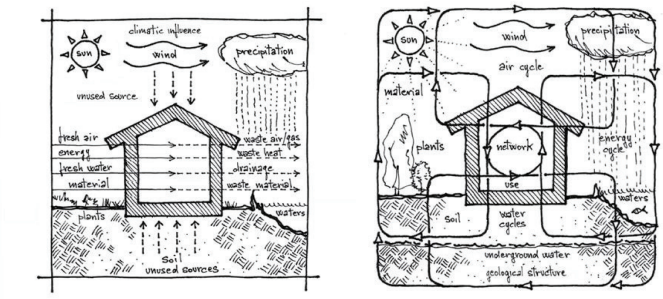
Gambar 2.11 Bagan Alir Redistribusi Tanah melalui dari TORA (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2.1.2 STANDAR TEKNIS & KELAIKAN FUNGSI

A. BANGUNAN GEDUNG

Sesuai dengan PerMen PUPR No. 14/2018 dan SE DJCK No.30/2020 RP2KPKPK, pada Bab II Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru pasal 6 ayat 1 , maka yang dimaksud dengan kesesuaian standar teknis dan kelaikan fungsi adalah bangunan gedung. Pada aspek ini, pencegahan perumahan dan permukiman kumuh menggunakan konsep **arsitektur pasif**. Desain pasif didefinisikan sebagai bangunan yang memiliki **fitur arsitektural berupa pemanfaatan terhadap sumber daya dan iklim setempat** untuk menyediakan lingkungan binaan yang nyaman.

Bangunan berbasis bioklimatik (*bioclimatic building*) diharuskan terintegrasi dalam siklus alam setempat yang mampu dimanfaatkan tanpa menyebabkan kerusakan pada alamnya. Siklus pemanfaatan tersebut melibatkan elemen-elemen dasar berupa tanah, air, dan udara yang perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam desain bangunan.



Gambar 2.12 Perbandingan desain hunian konvensional dan desain hunian berbasis bioklimatik (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Berikut merupakan indikator-indikator yang perlu diperhatikan dalam mencapai desain hunian/permukiman berkelanjutan berdsarkan konsep arsitektur pasif:

1. **Perencanaan Tapak (*Site Planning*)**
2. **Desain Bangunan (*Design Building*)**

   Faktor yang memengaruhi:

   - Bentuk bangunan
   - Orientasi Bangunan
   - Kenyamanan Termal Bangunan
   - Desain Atap dan Dinding
   - Bukaan

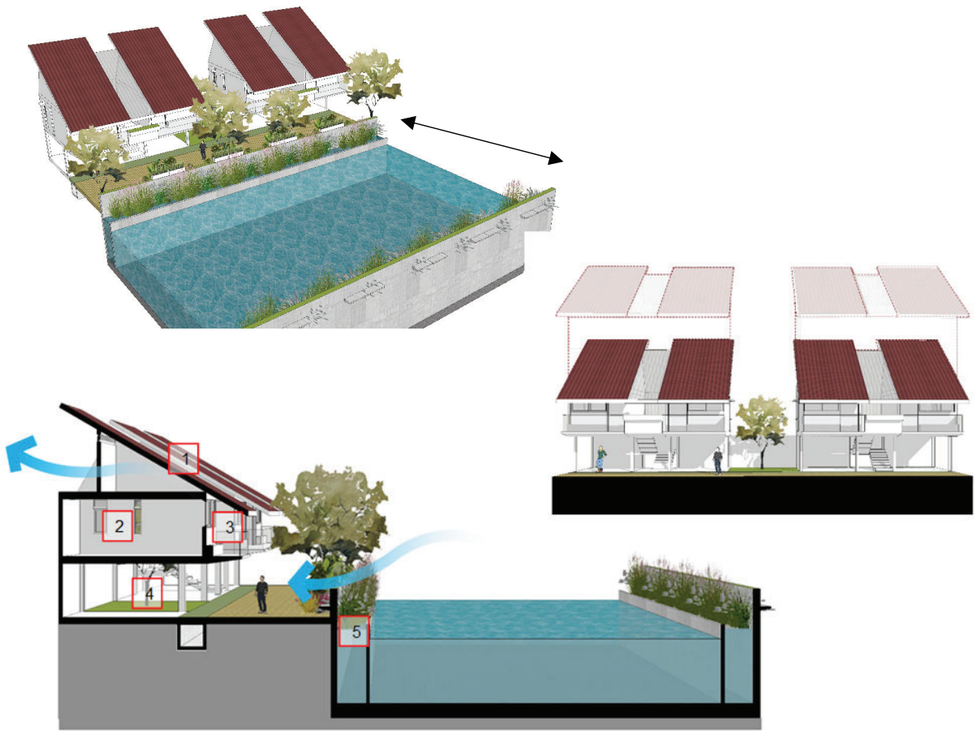
3. **Ventilasi Alami (*Natural Ventilation*)**
4. **Pencahayaan (*Daylighting*)**
5. **Pembayangan Matahari (*Shading*)**
6. **Penghawaan Alami (*Natural Cooling*)**

Di bawah ini adalah strategi desain dengan menggunakan konsep arsitektur pasif yang dapat menjadi referensi pencegahan kekumuhan pada 3 tipologi umum perumahan dan permukiman kumuh di DKI Jakarta:

Tabel 2.1 Strategi Desain Pasif di Permukiman Bantaran Kali/Sungai
(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

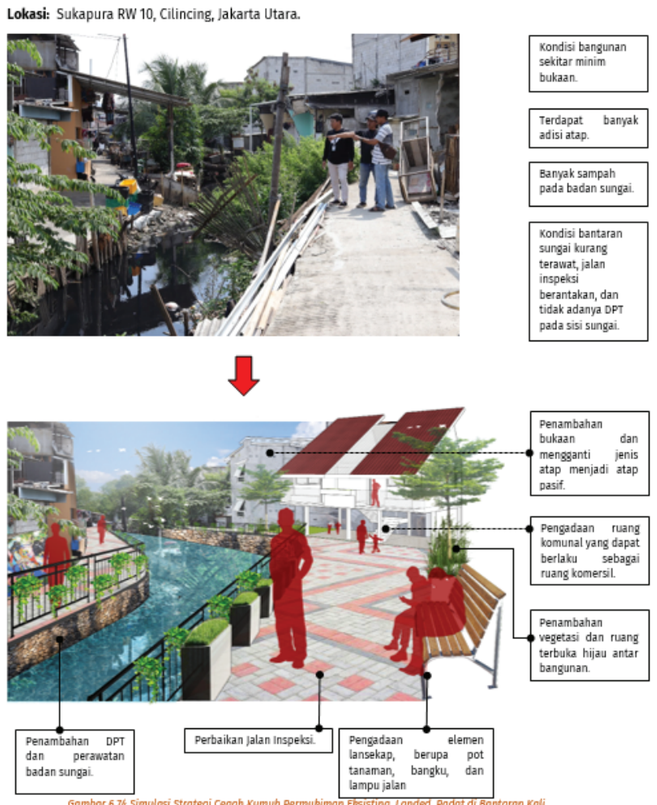
<table>
<tr><th rowspan="2">Konteks</th><th colspan="2">Aspek Strategi</th></tr>
<tr><th>Konsolidasi Lahan
(Ideal / Kosong)</th><th>Kondisi Eksisting
(Telah Padat)</th></tr>
<tr><td>Permukiman Bantaran Kali/Sungai</td><td>

Penetapan batas GSB/GSS sesuai aturan yang ada.
Memaksimalkan kepadatan bangunan -> 2-4 lantai / vetical housing
Membuka ruang terbuka hijau.
Ruang komunal/komersil yang dapat digunakan bersama.



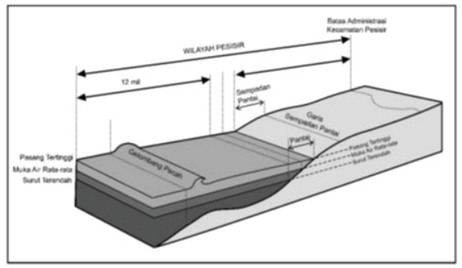
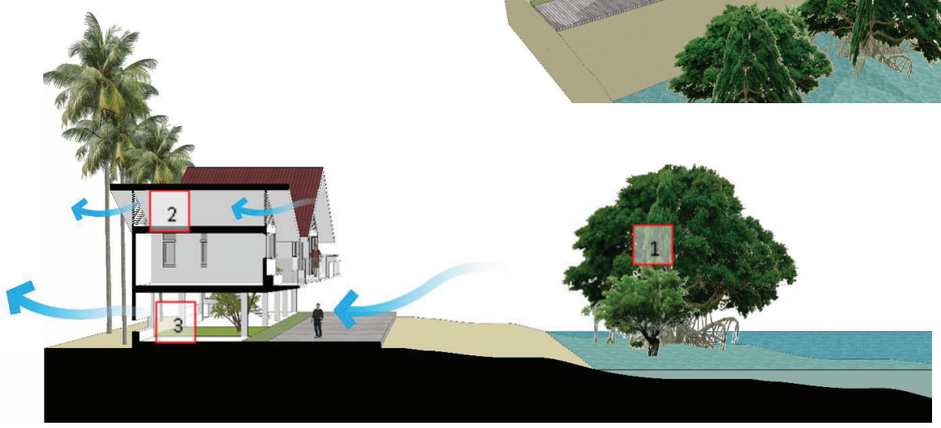
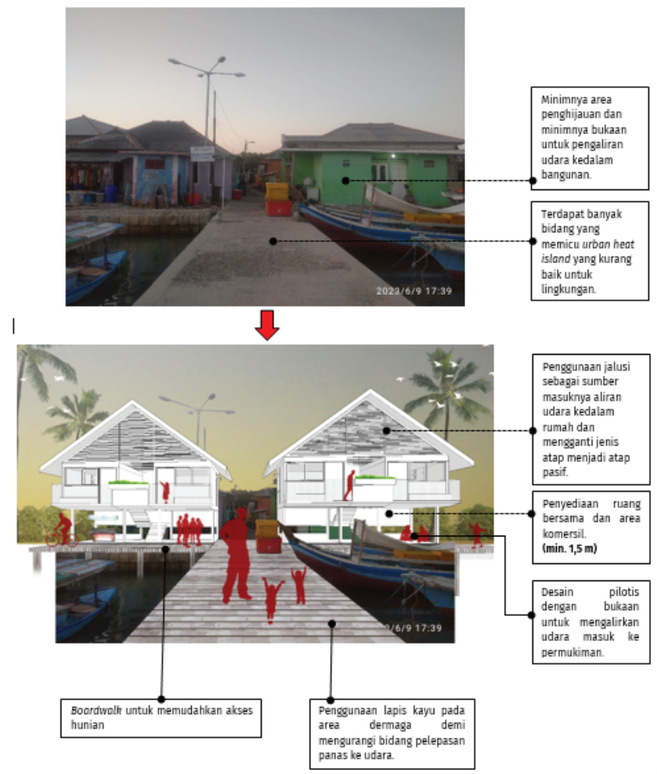
</td><td>

Memasukan fitur-fitur arsitektur pasifke dalam bangunan / lingkungan yang telah ada.



Gambar 6.74 Simulasi Strategi Cegah Kumuh Permukiman Eksisting, Landed, Padat di Bantaran Kali
(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)
</td></tr>
</table>

Tabel 2.2 Strategi Desain Pasif di Permukiman Pesisir/Kepulauan
(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Konteks	**Aspek Strategi**	
	Konsolidasi Lahan (Ideal / Kosong)	**Kondisi Eksisting** (Telah Padat)
Permukiman Pesisir/ Kepulauan	• Penetapan batas GSP sesuai aturan yang ada. • Memaksimalkan kepadatan bangunan -> 2-4 lantai / *vetical housing* • Ruang terbuka hijau dan pemanfaatan sempadan u/ mangrove. • Ruang komunal/komersil yang dapat digunakan bersama.   	• Memasukan fitur-fitur arsitektur pasifke dalam bangunan / lingkungan yang telah ada.  *Gambar 6.81 Simulasi Strategi Cegah Kumuh Permukiman Eksisting, Landed, Padat di Pesisir 2* *(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)*

Tabel 2.3 Strategi Desain Pasif di Permukiman Padat Landed Tengah Kota
(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

<table>
<tr><th rowspan="2">Konteks</th><th colspan="2">Aspek Strategi</th></tr>
<tr><th>Konsolidasi Lahan
(Ideal / Kosong)</th><th>Kondisi Eksisting
(Telah Padat)</th></tr>
<tr><td>Permukiman Padat Landed Tengah Kota</td><td>
• Memaksimalkan kepadatan bangunan -> 2-4 lantai / vetical housing
• Ruang terbuka hijau.
• Ruang komunal/komersil yang dapat digunakan bersama.


</td><td>
• Memasukan fitur-fitur arsitektur pasifke dalam bangunan / lingkungan yang telah ada.

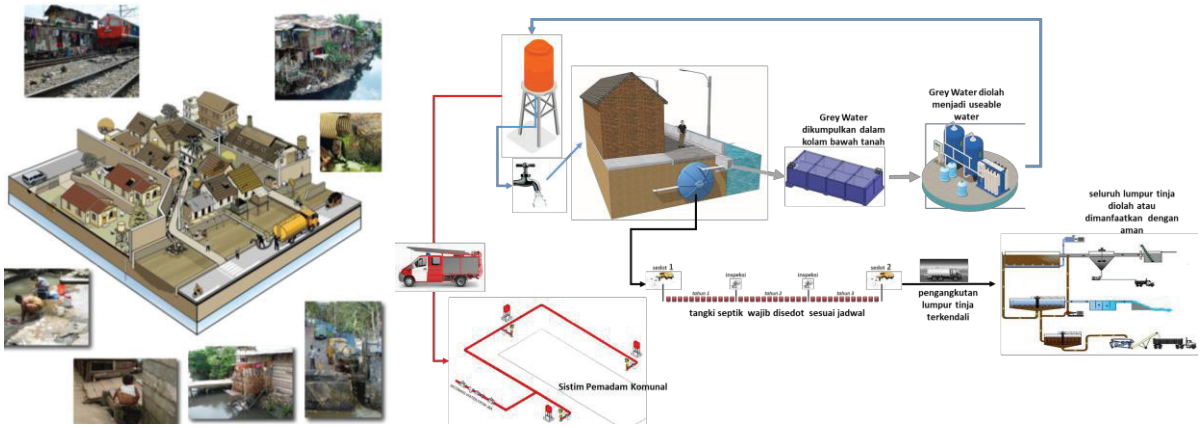

Gambar 6.90 Simulasi Strategi Cegah Kumuh Permukiman Landed Eksisting, Padat di tengah Kota 1
(Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)
</td></tr>
</table>

B. SISTEM LINGKUNGAN TERINTEGRASI

Kelanjutan PerMen PUPR No. 14/2018 dan SE DJCK No.30/2020 RP2KPKPK, Bab II Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru pasal 6 ayat 1 perihal penjelasan kesesuaian standar teknis dan kelaikan fungsi adalah: jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, yang pada manual ini disebut sebagai Sistem Lingkungan Terintegrasi.

Perencanaan lingkungan terintegrasi menjadi acuan awal dari konsep pencagahan fisik permukiman kumuh. Perencanaan lingkungan terintegrasi sangat diperlukan sebagai titik awal karena menjadi alas dari perencanaan permukiman yang baik di atasnya. Dengan demikian permukiman yang kumuh dapat dibayangkan menjadi permukiman yang layak huni dan sehat dengan menggunakan konsep perencanaan sistem lingkungan terintegrasi (lihat gambar 2.13).

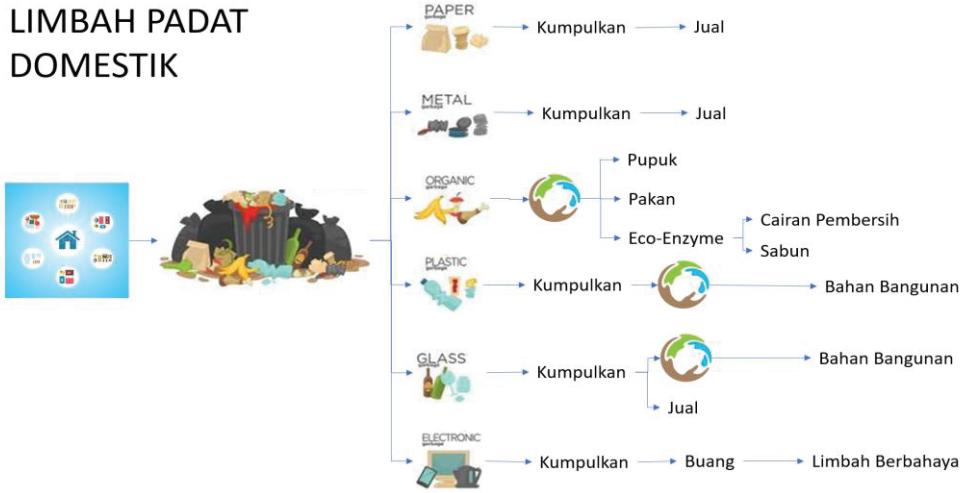
Beberapa hal dasar dari konsep perencanaan lingkungan terintegrasi adalah: perencanaan jalan, saluran dan PJU terstandar (lihat gambar 2.14), pengelolaan limbah padat (domestik) dan cair (lihat gambar 2.15 dan 2.16), air bersih untuk semua (lihat gambar 2.17), IPAL komunal (lihat gambar 2.18) dan sistem pemadaman kebakaran pasif (lihat gambar 2.19).



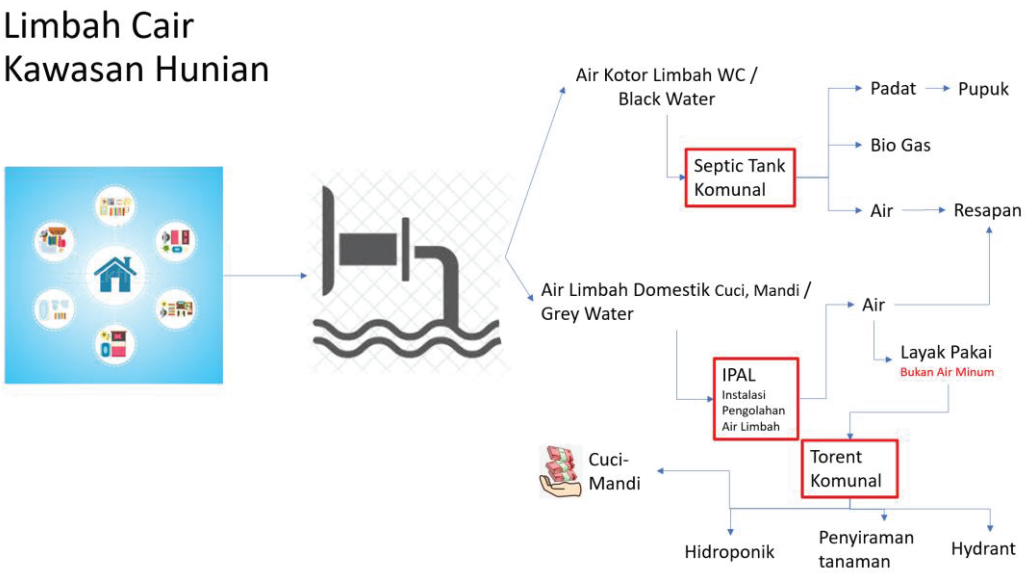
Gambar 2.13 Permukiman Kumuh dan Kemungkinan Perubahannya melalui Konsep Perencanaan Lingkungan Terintegrasi (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



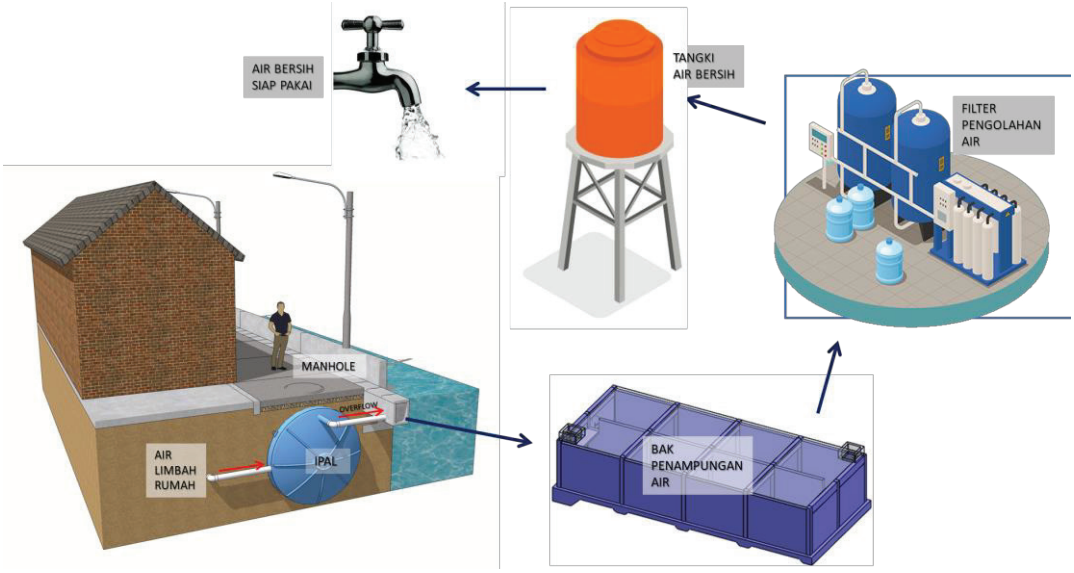
Gambar 2.14 Konsep Perencanaan Jalan, Saluran dan PJU terstandar (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



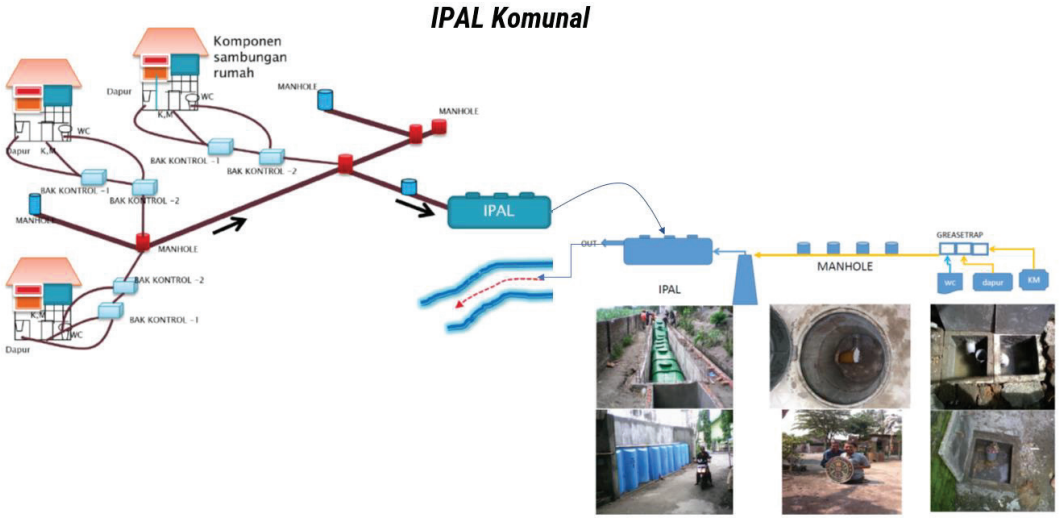
Gambar 2.15 Konsep Pengelolaan Limbah Padat Domestik Terpadu (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



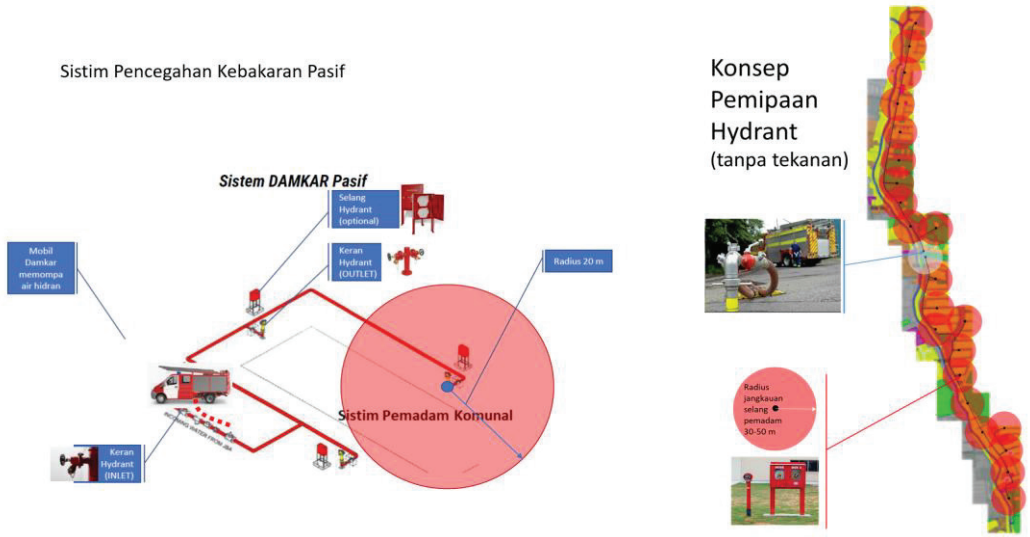
Gambar 2.16 Konsep Pengelolaan Limbah Cair Terpadu (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



Gambar 2.17 Konsep Air Bersih untuk Semua (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



Gambar 2.18 Konsep IPAL (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)



Gambar 2.19 Konsep Sistem Damkar Pasif (Tim 2 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2.1.3 PROGRAM KERJA & PERAN

Program Kerja dan Peran Pengawasan & Pengendalian adalah sebagai berikut:

- Program Kerja dan Peran: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat (Tabel 2.4), Tanah di Lokasi Yang Dilarang UU (Tabel 2.5), Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga (Tabel 2.6). Pembagian sub-tabel ini didasarkan pada *tenurial issues* yang dibahas di Bab 2.1.1 dan merespon aspek Legalitas Lahan yang menjadi salah satu aspek Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018.
- Program Kerja dan Peran: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi (Tabel 2.7) yang diurutkan sesuai aspek Fisik Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018: Bangunan Gedung dan Sistem Lingkungan Terintegrasi (Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Bersih, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Limbah, Pengelolaan Sampah, Proteksi Kebakaran serta kaitannya dengan Kepadatan Penduduk).

Tabel 2.4 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

TANAH MILIK MASYARAKAT	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Tanah HM, HGB, HP 2. Tanah Kaveling 3. Tanah Girik (tanah milik adat) 4. Tanah Negara Bebas 5. Tanah (Negara) Timbul Alamiah 6. Tanah (Negara) Timbul karena Reklamasi 7. Tanah Negara eks Hak Barat 8. Tanah Negara eks Tanah Partikelir 9. Tanah Negara eks Konversi Hak Barat 10. Tanah Garapan 11. Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun	Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL)	APBN	Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan • Internal PD	**Untuk Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada kolom pertama:** 1. Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui PTSL 2. Dukungan penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebagai Alas Hak untuk mengajukan Sertipikat HAT cukup Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta 3. Pembangunan Rusun, Peremajaan, Pemugaran.	**Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL):** 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk mohon sertipikat melalui Program PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Lurah setempat atau permohonan perubahan HGB/HP menjadi HM. 2. Survei lokasi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 2.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 2.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 2.3. Status Tanah, legalitas/keberadaan surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 2.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 2.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan undang-undang sektoral (UU Penataan Ruang, UU Sumberdaya Air, UU Perkeretaapian, UU Jalan, UU Kelautan, UU Bangunan Gedung dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil dstnya; 2.6. Keberadaan Blokir, Status Quo, Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 2.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 2.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 2.9. Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan sebagai pencegahan kumuh atau peningkatan kualitas. 3. Pembuatan daftar nominatif Peserta PTSL dan Bidang Tanah PTSL. 4. Melampirkan: 4.1. KTP/KK; 4.2. Surat Pernyataan Sporadik-Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) atau Surat Tanah; 4.3. Girik, Ipeda, Ireda atau Surat Keterangan Lurah; 4.4. AJB, PPJB dan PBB dan/atau PPh (kalau ada); 4.5. Surat Pernyataan bertanggung jawab secara perdata/pidana dari pemohon/masyarakat; 5. Penetapan 0% BPHTB Terutang dari Gubernur DKI Jakarta untuk Penerima Sertipikat PTSL. 6. Membeli/Memasang 4 (empat) Patok Tanda Batas Tanah. 7. Usulan Penetapan Lokasi dari Lurah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. 8. Proses selanjutanya, menjadi SOP dan urusan internal Kantor Pertanahan setempat.	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan • Internal PD	**Untuk Nomor 7, 8, 9, 10, 11** pada kolom pertama: 1. Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui PTSL 2. Dukungan penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebagai Alas Hak untuk mengajukan Sertipikat HAT cukup Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta 3. Pembangunan Rusun, Peremajaan, Pemugaran.	**Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL):** 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk mohon sertipikat melalui Program PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Lurah setempat atau permohonan perubahan HGB/HP menjadi HM. 2. Survei lokasi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 2.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 2.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 2.3. Status Tanah, legalitas/keberadaan surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 2.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 2.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan undang-undang sektoral (UU Penataan Ruang, UU Sumberdaya Air, UU Perkeretaapian, UU Jalan, UU Kelautan, UU Bangunan Gedung dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil dstnya; 2.6. Keberadaan Blokir, Status Quo, Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 2.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 2.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 2.9. Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan sebagai pencegahan kumuh atau peningkatan kualitas. 3. Pembuatan daftar nominatif Peserta PTSL dan Bidang Tanah PTSL. 4. Melampirkan: 4.1. KTP/KK; 4.2. Surat Pernyataan Sporadik-Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) atau Surat Tanah; 4.3. Girik, Ipeda, Ireda atau Surat Keterangan Lurah; 4.4. AJB, PPJB dan PBB dan/atau PPh (kalau ada); 4.5. Surat Pernyataan bertanggung jawab secara perdata/pidana dari pemohon/masyarakat; 5. Penetapan 0% BPHTB Terutang dari Gubernur DKI Jakarta untuk Penerima Sertipikat PTSL. 6. Membeli/Memasang 4 (empat) Patok Tanda Batas Tanah. 7. Usulan Penetapan Lokasi dari Lurah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat. 8. Proses selanjutanya, menjadi SOP dan urusan internal Kantor Pertanahan setempat.	-	-	-	(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

TANAH MILIK MASYARAKAT	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)			INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET			KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Tanah HM, HGB, HP 2. Tanah Kaveling 3. Tanah Girik (tanah milik adat) 4. Tanah Negara Bebas 5. Tanah (Negara) Timbul Alamiah 6. Tanah (Negara) Timbul karena Reklamasi 7. Tanah Negara eks Hak Barat 8. Tanah Negara eks Tanah Partikelir 9. Tanah Negara eks Konversi Hak Barat 10. Tanah Garapan 11. Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (*Partially Land Clearing*) *Insitu Redevelopment* & *Insitu Land Consolidation* (Konsolidasi Tanah)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, grant, loan atau kemitraan Government to Business.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta			• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri	1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait.	**Pengosongan Lokal Sebagian (*In-Situ Redevelopment*):** 2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang UU atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan UU; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan Rencana Pembangunan DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang Undang-Undang; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diselesaikan di pengadilan. 2.3. DCKTRP dan DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan dan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN; 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.	**Konsolidasi Tanah (*In-Situ Land Consolidation*):** 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk mohon konsolidasi tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Lurah setempat serta Kepala DPRKP. 2. Surat Persetujuan Masyarakat Peserta untuk Dilaksanakan Konsolidasi Tanah (KT) direkomendasikan 100% 3. Survei lokasi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 3.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 3.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 3.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 3.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 3.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan undang-undang; 3.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 3.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 3.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 3.9.Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas. 4. Pembuatan daftar nominatif Peserta Konsolidasi Tanah. 5. Usulan DPRKP atau bersama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) kepada Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta untuk dilakukan konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 6. Penetapan Lokasi konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) oleh Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk. 7. Pembuatan daftar nominatif Peserta konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 8. Masyarakat menyerahkan dan melampirkan: 8.1. KTP/KK; 8.2. Surat Tanah atau Surat Pernyataan Sporadik/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF); 8.3. Surat Keterangan Lurah; 8.4. PBB dan/atau PPh (kalau ada); 8.5. Surat Pernyataan bertanggung jawab secara perdata/pidana dari pemohon/masyarakat; 8.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah; 8.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah untuk Pembangunan (TUP); 8.8. Penetapan BPHTB Terutang dari Gubernur DKI Jakarta untuk konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) atau BPHTB 0%; 9. Proses selanjutnya, menjadi SOP dan urusan internal Kantor Pertanahan setempat.				(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

TANAH MILIK MASYARAKAT	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Tanah HM, HGB, HP 2. Tanah Kaveling 3. Tanah Girik (tanah milik adat) 4. Tanah Negara Bebas 5. Tanah (Negara) Timbul Alamiah 6. Tanah (Negara) Timbul karena Reklamasi 7. Tanah Negara eks Hak Barat 8. Tanah Negara eks Tanah Partikelir 9. Tanah Negara eks Konversi Hak Barat 10. Tanah Garapan 11. Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (*Totally Land Clearing*)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, *grant*, *loan* atau kemitraan *Government to Business.*	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta							• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri	1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan.	**Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing):** 2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang Undang-Undang atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan RPD DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang UU; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diselesaikan di pengadilan. 2.3. DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN. 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.	(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

Tabel 2.5 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah di Lokasi Yang Dilarang UU (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

TANAH DI LOKASI YANG DILARANG UU	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)			INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET			KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
1. Bantaran, Sempadan, di atas Embung, Sungai, Danau, Waduk (ESDW). 2. Sempadan Laut, pesisir laut, di Atas Laut. 3. Sempadan Jalan, Sempadan Bangunan, Daerah Milik Jalan/ Bawah Tol/Bawah Jembatan/Bawah Fly Over atau di daerah Obyek Vital Negara (Obvit) atau lokasi Ring 1 Keamanan Negara (Kamneg). 4. Sempadan Jalan /Daerah Milik Jalan Kereta Api.	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (*Partially Land Clearing*) *Insitu Redevelopment* & *Insitu Land Consolidation* (Konsolidasi Tanah)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, grant, loan atau kemitraan Government to Business.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta				• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri • Menteri PUPR (khusus yang dikelola dan atau dalam pengawasaan Pusat)	1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait	**Pengosongan Lokal Sebagian (*In-Situ Redevelopment*):** '2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang UU atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan UU; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan Rencana Pembangunan DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang Undang-Undang; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diseelsaikan di pengadilan. 2.3. DCKTRP dan DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan dan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN; 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.	**Konsolidasi Tanah (In-Situ Land Consolidation):** 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk mohon konsolidasi tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Lurah setempat serta Kepala DPRKP. 2. Surat Persetujuan Masyarakat Peserta untuk Dilaksanakan Konsolidasi Tanah (KT) direkomendasikan 100%. 3. Survei lokasi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 3.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 3.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 3.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 3.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 3.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan undang-undang; 3.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 3.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 3.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 3.9.Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas. 4. Pembuatan daftar nominatif Peserta Konsolidasi Tanah. 5. Usulan DPRKP atau bersama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) kepada Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta untuk dilakukan konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 6. Penetapan Lokasi konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) oleh Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk. 7. Pembuatan daftar nominatif Peserta konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 8. Masyarakat menyerahkan dan melampirkan: 8.1. KTP/KK; 8.2. Surat Tanah atau Surat Pernyataan Sporadik/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF); 8.3. Surat Keterangan Lurah; 8.4. PBB dan/atau PPh (kalau ada); 8.5. Surat Pernyataan bertanggung jawab secara perdata/pidana dari pemohon/masyarakat; 8.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah; 8.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah untuk Pembangunan (TUP); 8.8. Penetapan BPHTB Terutang dari Gubernur DKI Jakarta untuk konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) atau BPHTB 0%; 9. Proses selanjutnya, menjadi SOP dan urusan internal Kantor Pertanahan setempat.				(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

TANAH DI LOKASI YANG DILARANG UU	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
1. Bantaran, Sempadan, di atas Embung, Sungai, Danau, Waduk (ESDW). 2. Sempadan Laut, pesisir laut, di Atas Laut. 3. Sempadan Jalan, Sempadan Bangunan, Daerah Milik Jalan/ Bawah Tol/Bawah Jembatan/Bawah Fly Over atau di daerah Obyek Vital Negara (Obvit) atau lokasi Ring 1 Keamanan Negara (Kamneg). 4. Sempadan Jalan /Daerah Milik Jalan Kereta Api.	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (*Totally Land Clearing*)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, *grant, loan* atau kemitraan *Government to Business.*	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta							• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri	1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan.	**Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing):** 2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang Undang-Undang atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan RPD DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang UU; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diselesaikan di pengadilan. 2.3. DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN. 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.	(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

Tabel 2.6 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Hak Atas Tanah Bangunan pada Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah	Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: 1. Pemanfaatan Tanah Aset Pemprov & Pembebanan Hak. 2. Pemanfaatan Tanah Aset BMD/BUMD.	Skema Pemanfaatan Tanah Aset hanya perlu menerbitkan: Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Tanah Aset. Skema Pembebanan Hak perlu anggaran untuk permohonan penerbitan HGB, HP, HPL (APBD) PKP DPA DPRKP dan DPA SKPD/UKPD terkait.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda Direksi BUMD	• Gubernur (pemilikAset) • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : BPAD, DCKTRP, DPRKP, BPBUMD, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat : Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta	1. Pemanfaatan Tanah Aset di atas Tanah HGB, HP. HPL Aset Pemprov 2. Pembebanan Hak (Pemberian HGB/HP di atas Tanah HPL Aset Pemprov) 3. Pemberian Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait	pemanfaatan Tanah Aset Pemprov & Pembebanan Hak: 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk pemanfaatan atau pembebanan hak atas tanah aset kekayaan daerah kepada Gubernur DKI Jakarta dan Walikota setempat. 2. Survei lokasi, legalitas dan sosial ekonomi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 2.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 2.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 2.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 2.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 2.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan Undang-Undang; 2.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 2.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 2.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 2.9. Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas. 3. Memastikan tanah aset-kekayaan Pemerintah DKI Jakarta sudah memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HPL, HGB, HP) atau mengajukan permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat jika belum bersertipikat. 4. Tindak lanjut oleh DCKTRP & DPRKP dan PD terkait: 4.1. Mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, menyusun dan pembentukan TIM Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, untuk: 4.1.1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringangan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Kekayaan Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 4.1.2. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah Kekayaan Daerah (BMD) dan BUMD; 4.1.3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemakaian Tanah Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 4.1.4. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Tanah Kekayaan Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 4.2. Mengkoodinasikan dan membentuk PD Kolaboratif dalam penyatuan perencanaan, pengganggaran, kegiatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam satu PPK. 5. Bagi Masyarakat yang menduduki tanah Kekayaan Daerah dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 5.1. KTP/KK; 5.2. IMB/PBG (kalau ada); 5.3. Surat Tanah/Alas Hak atau Surat Keterangan Tanah atau Izin Penguasaan/Penggarapan Tanah (kalau ada); 5.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF); 5.5. Surat Pernyataan Telah Meminjam Tanah Kekayaan Daerah dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 5.6. Surat Pernyataan Sanggup Untuk Mengosongkan Tanah ketika Tanah Diperlukan untuk Pemerintah dan/atau untuk Kepentingan Umum tanpa syarat & ganti kerugian; 5.7. Surat Pernyataan bersedia dilakukan peremajaan, pemugaran, rehabilitasi, peningkatan kualitas dan/atau konsolidasi tanah/bangunan tanpa syarat. 6. Penerbitan Surat Izin Menghuni (SIM) dengan jangka waktu tertentu. 7. Jika pemanfaatan dengan menggunakan skema Pembebanan Hak: 7.1. Tanah aset -kekayaan Pemprov DKI Jakarta harus sudah bersertipikat HPL atas nama Pemrov DKI Jakarta; 7.2. Pembuatan Akta Pembebanan Hak dihadapan PPAT setempat, antara masyarakat per individu dengan Pemprov DKI Jakarta; 7.3. Pengurusan sertipikat HGB atau HP atas nama Masyarakat per Individu di atas tanah HPL milik Pemprov DKI Jakarta melalui Program PTSL Kementerian ATR/BPN; 7.4. BPHTB Masyarakat Miskin dikenakan tarif 0% karena dibawah 2 Milyar.	• Gubernur (pemilikAset) • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : BPAD, DCKTRP, DPRKP, BPBUMD, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat : Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta	1. Pemanfaatan Tanah Aset di Atas Tanah HGB, HP. HPL Aset BMD/BUMD. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait.	**Pemanfaatan Tanah Aset BMD/BUMD DKI:** '1. Survei lokasi, legalitas dan sosial ekonomi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 1.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 1.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 1.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan tanah; 1.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 1.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan Undang-Undang; 1.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 1.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/digarap masyarakat; 1.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 1.9. Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan & peningkatan kualitas. 2. Tindak lanjut oleh DPRKP dan PD terkait: 2.1. Mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta, menyusun dan pembentukan TIM Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan KepGub DKI Jakarta, untuk: 2.2.1. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pemberian, Pengurangan, Keringangan, dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Kekayaan Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 2.2.2. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah Kekayaan Daerah (BMD) dan BUMD; 2.2.3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Izin Pemakaian Tanah Barang Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 2.2.4. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran, Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Tanah Kekayaan Milik Daerah (BMD) dan Barang Milik BUMD DKI Jakarta; 2.2. Mengkoordinasikan dan membentuk PD Kolaboratif dalam penyatuan perencanaan, pengganggaran, kegiatan, pelaksanaan, monev dalam satu PPK. 3. Bagi Masyarakat yang menduduki tanah Kekayaan Daerah-Barang Milik BUMD DKI Jakarta: 3.1. KTP/KK; 3.2. IMB/PBG (kalau ada); 3.3. Surat Tanah/Alas Hak atau Surat Keterangan Tanah atau Izin Penguasaan/ Penggarapan Tanah (kalau ada); 3.4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF); 3.5. Surat Pernyataan Telah Meminjam Tanah Kekayaan Daerah dan Barang Milik BUMD; 3.6. Surat Pernyataan Sanggup Untuk Mengosongkan Tanah ketika Tanah Diperlukan untuk Pemerintah dan/atau untuk Kepentingan Umum tanpa syarat ganti kerugian; 3.7. Surat Pernyataan bersedia dilakukan peremajaan, pemugaran, rehabilitasi, peningkatan kualitas dan/atau konsolidasi tanah/bangunan tanpa syarat. 4. Penerbitan Surat Izin Menghuni (SIM) dengan jangka waktu tertentu.	-	-	-	(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI 2. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah	Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: 1. pemanfaatan Tanah Aset BUMN.	Skema Pemanfaatan Tanah Aset tidak memerlukan pendanaan/penganggaran. 'PKP DPA DPRKP dan DPA SKPD/UKPD terkait. Alternatif lain: CSR, swadaya masyarakat, BP3, DAK APBN Pemerintah Pusat, *Access Reform* ATR/BPN	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda • Direksi BUMN untuk BUMN • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi)						• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: BPAD, DCKTRP, DPRKP, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat: Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta	1. Pemanfaatan Tanah Aset (Pinjam Di Atas Tanah HGB, HP. HPL Aset BUMN). 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait	**Pemanfaatan Tanah Aset BUMN**: 1. Masyarakat mengajukan permohonan pemanfaatan tanah aset BUMN melalui Gubernur DKI Jakarta. 2. Surat Pernyataan Pemanfaatan Tanah BUMN dari Masyarakat dan pernyataan siap dipindahkan ketika tanahnya akan dipergunakan oleh BUMN dan tidak menuntut kompensasi/ganti kerugian dari BUMN maupun dari Pemprov DKI Jakarta. 3. Survei lokasi, legalitas dan sosial ekonomi oleh Lurah, DCKTRP dan DPRKP, mengenai: 3.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 3.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 3.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 3.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 3.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan Undang-Undang; 3.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 3.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/digarap masyarakat; 3.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 3.9. Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas. 4. Gubernur DKI Jakarta mengajukan permohonan pemanfaatan tanah BUMN untuk kepentingan masyarakat di lokasi perumahan kumuh. 5. Setelah Izin Pemanfaatan Tanah aset BUMN diterbitkan Menteri BUMN, dilakukan penataan dan peningkatan kualitas dengan bangunan rumah semi permanen. 6. Pembangunan fisik disesuaikan dengan skema pemanfaatan tanah aset milik pihak ketiga. 7. Peningkatan Kualitas manusia di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.		(lihat MONEV) (+) Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. (-) Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah	Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: 1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria.	DPA Kementerian ATR/BPN (survei-penetapan) PKP DPA DPRKP dan DPA SKPD/UKPD terkait. memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, grant, loan atau kemitraan Government to Business.	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda. • Direksi BUMN/BUMD. • Menteri BUMN untuk BUMN. • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi).				• Internal PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah Camat. • Kementerian/ Kepala LPNK terkait Pengguna Aset. • Kementerian ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi). • Kanwil ATR/BPN. • Kantor Pertanahan.	1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. 3. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait	**Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar:** 1. Ketersediaan Data Pemilik dan Data Tanah Terlantar. 2. DCKTRP dan DPRKP bekerjasama, mengajak dan berkolaborasi aktif-intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk melakukan penelitian, menyajikan dan menyampaikan semua bidang tanah yang ada di DKI Jakarta yang sudah diterbitkan sertipikat hak tanah (HM eks Konversi Hak Barat, HGB, HP, HPL) namun fisiknya tanahnya dikuasai lama dan masif oleh masyarakat yang lokasinya berkategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Tanah yang sudah diberikan sertipikat hak atas tanah yang tanahnya dikuasai fisik lama dan masif oleh masyarakat, tanpa ada hubungan hukum pemilik tanah/pemegang hak, diajukan sebagai obyek penertiban tanah terlantar. 4. Tanah-Tanah Hak Atas Tanah yang dilakukan survei oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah ATR/BPN bersama dengan Pemprov DKI Jakarta ketika tanahnya memang nyata-nyata terindikasi nyata sebagai tanah terlantar, maka DCKTRP dan DPRKP mendorong Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN segera membentuk Panitia C (panitia pemeriksaan tanah terlantar) untuk melakukan pemeriksaan data yuridis dan data fisik agar dapat segera dintindaklanjuti dengan operasi penertiban tanah terlantar. 5. DCKTRP dan DPRKP tetap mendorong agar Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN mengajukan penetapan tanah terlantar pada tanah-tanah yang terindikasi kuat dan masuk kriteria tanah terlantar kepada Menteri ATR/BPN. 6. Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat setingkat Menteri atas usulan DPRKP ikut melakukan pengawalan ke Menteri ATR/BPN agar mengabulkan usulan penetapan tanah terlantar atas tanah-tanah hak yang sudah diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta. 7. Rekomendasi Panitia Pemerikasaan Tanah Terlantar. 8. Usulan Penetapan Tanah Terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN kepada Menteri ATR/BPN. 9. Keputusan Menteri ATR/BPN tentang Pemutusan Hubungan Hukum antara Pemilik Hak dengan Hak Atas Tanahnya dan tanahnya dinyatakan sebagai Tanah Negara. Sekaligus tanah negara eks penertiban tanah terlantar dinyatakan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria untuk kepentingan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta untuk penanganan fakir miskin perkotaan. 10. Keputusan Redistribusi Tanah oleh Menteri ATR/BPN untuk masyarakat miskin DKI Jakarta yang ada di lokasi-lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 11. Pensertipikatan tanah hasil redistribusi oleh Kantor Pertanahan setempat. 12. Pembagian dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat miskin di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	**Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria:** 2.1. Orang perseorangan a. WNI; b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah. 2.2. Pekerjaan penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat. 2.3. Membuat Surat Pernyataan Penguasan Fisik (SPPF). 2.4. Berada di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang lokasinya tidak dilarang undang-undang. 2.5. Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dari Menteri ATR/BPN. 2.6. Penerbitan dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang tanahnya masuk kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Kementerian ATR/BPN. 2.7. DCKTRP dan DPRKP Provinsi DKI Jakarta menerbitkan penetapan lokasi terhadap tanah hasil redsitribusi sebagai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk dilakukan penganan, penataan dan peningkatan kualitas fisik dan manusianya. 2.8. DPRKP dalam melakukan peningkatan kualitas manusia dapat berkolaborasi dengan program dan kebijakan akses reform yang sasarannya adalah kesejahteraan dan kemakmuran manusia.			

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (*Partially Land Clearing*) *Insitu Redevelopment* & *Insitu Land Consolidation* (Konsolidasi Tanah)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, grant, loan atau kemitraan Government to Business.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta				• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri • Menteri PUPR (khusus yang dikelola dan atau dalam pengawasaan Pusat)	1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait	**Pengosongan Lokal Sebagian (*In-Situ Redevelopment*):** 2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang UU atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan UU; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan Rencana Pembangunan DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang Undang-Undang; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diseelsaikan di pengadilan. 2.3. DCKTRP dan DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan dan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN; 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.	**Konsolidasi Tanah (In-Situ Land Consolidation):** 1. Surat Permohonan Masyarakat untuk mohon konsolidasi tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Lurah setempat serta Kepala DPRKP. 2. Surat Persetujuan Masyarakat Peserta untuk Dilaksanakan Konsolidasi Tanah (KT) direkomendasikan 100%. 3. Survei lokasi oleh Lurah dan DPRKP, mengenai: 3.1. Jumlah kepala keluarga/anggota keluarga, pekerjaan, RT/RW/Kelurahan; 3.2. Prakiraan luas tanah keliling dan luas tanah masing-masing bidang; 3.3. Legalitas surat tanah atau status hubungan hukum orang dengan bangunan dan tanah; 3.4. Kesesuaian lokasi dengan RDTR/RTRW; 3.5. Legalitas antara letak lokasi/perumahan/permukiman dengan undang-undang; 3.6. Keberadaan Sita, Sengketa, Perkara Pengadilan; 3.7. Keberadaan tanah aset barang milik negara dan barang milik daerah yang diduduki/ digarap masyarakat; 3.8. Kesesuaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kriteria dari BPS/PUPR/Peraturan Perundang-undangan terkait, dan; 3.9.Kesanggupan-kesediaan masyarakat dilakukan penataan dan peningkatan kualitas. 4. Pembuatan daftar nominatif Peserta Konsolidasi Tanah. 5. Usulan DPRKP atau bersama dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) kepada Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta untuk dilakukan konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 6. Penetapan Lokasi konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) oleh Gubernur DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk. 7. Pembuatan daftar nominatif Peserta konsolidasi tanah horisontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV). 8. Masyarakat menyerahkan dan melampirkan: 8.1. KTP/KK; 8.2. Surat Tanah atau Surat Pernyataan Sporadik/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF); 8.3. Surat Keterangan Lurah; 8.4. PBB dan/atau PPh (kalau ada); 8.5. Surat Pernyataan bertanggung jawab secara perdata/pidana dari pemohon/masyarakat; 8.6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah; 8.7. Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Tanah untuk Pembangunan (TUP); 8.8. Penetapan BPHTB Terutang dari Gubernur DKI Jakarta untuk konsolidasi tanah horizontal (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV) atau BPHTB 0%; 9. Proses selanjutnya, menjadi SOP dan urusan internal Kantor Pertanahan setempat.			

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah	Tidak Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang atau dilarang Undang-Undang sektor lain	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (*Totally Land Clearing*)	APBD, DAK APBN, Subsidi Pemerintah Pusat memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, *grant*, *loan* atau kemitraan *Government to Business*.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta							• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri	1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan	**Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing):** 2.1. Lokasi Dilarang dan Terlarang Undang-Undang: 2.1.1. Tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilarang Undang-Undang atau terlarang, dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang; 2.1.2. Lokasi tanah yang diduduki, digarap, dimanfaatkan masyarakat perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sesuai dengan RTDR/RTRW dan RPD DKI Jakarta; 2.1.3. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah dari lokasi dan menerima solusi yang disediakan Pemprov DKI dengan pindah ke rumah susun, rumah deret, rumah couple/triple, dan diberikan bukti legalitas penggunaan tanah, peminjaman tanah, atau sertipikat hak atas tanah (untuk bentuk yang terakhir jika tanah yang dipergunakan untuk rumah pengganti hasil dari redistribusi tanah, reforma agraria, atau pelepasan aset). 2.2. Masyarakat: 2.2.1. Masyarakat bersepakat mengosongkan tanah yang lokasinya dilarang UU; 2.2.2. Masyarakat bersepakat pindah ke lokasi pengganti yang disediakan Pemprov DKI Jakarta termasuk penyediaan rumah yang laik huni; 2.2.3. Masyarakat yang tidak bersepakat mengosongkan lokasi, maka lokasinya tetap dikosongkan untuk keamanan dan keselamatan kota. Persoalan hukum yang muncul diselesaikan di pengadilan. 2.3. DPRKP: 2.3.1. Survei Lokasi; 2.3.2. Koordinasi dan pematangan rencana dengan Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk mendapat dukungan bantuan kelembagaan; 2.3.3. Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah: Tim Utama dan Tim Pendamping; 2.3.4. Melakukan Studi Kelayakan lokasi yang direncanakan dilakukan pengosongan dan lokasi tanah pengganti yang direncanakan sebagai penanganan, pencegahan dan peningkatan kualitas; 2.3.5. Menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 2.3.6. Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur DKI Jakarta. 2.4. Gubernur DKI Jakarta: 2.4.1. Membentuk Tim Verikasi Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.2. Peninjauan Lokasi oleh Tim Verifikasi; 2.4.3. Penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah; 2.4.4. Membentuk Tim Persiapan dan Kesekretariatan Tim Persiapan: melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan; menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan; mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Gubernur; 2.4.5. Membuat Berita Acara Kesepatakan Lokasi Pembangunan antara Pemerintah dengan Masyarakat yang terdampak kebijakan; 2.4.6. Menandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan; 2.4.7. Menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN. 2.5. Kementerian ATR/BPN Cq Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta: 2.5.1. Melaksanakan Pengadaan Tanah; 2.5.2. Menyerahkan hasil Pengadaan Tanah. 2.6. DPRKP: 2.6.1. Menerima berita acara hasil pengadaan tanah dan penyerahan fisik tanah; 2.6.2. Melanjutkan dengan melakukan penanganan, pencegahan, peningkatan kualitas fisik lokasi yang sudah dikosongankan dan di lokasi pengganti untuk eks masyarakat perumahan kumuh; 2.6.3. Konstruksi-Pembangunan fisik.		

TANAH DI LOKASI MILIK/ASET PEMPROV, BMD/BMN, BUMD, BUMN ATAU PIHAK KETIGA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Status penguasaan: 1. Badan Usaha Privat. 2. Perorangan.	Sesuai Undang-Undang dan Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: 1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria.	DPA Kementerian ATR/BPN (survei-penetapan) PKP DPA DPRKP dan DPA SKPD/UKPD terkait. memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR, BP3, grant, loan atau kemitraan Government to Business.	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda. • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi).							• Internal PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah Camat. • Kementerian/ Kepala LPNK terkait Pengguna Aset. • Kementerian ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi). • Kanwil ATR/BPN. • Kantor Pertanahan.	1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. 3. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait	**Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar:** *1. Ketersediaan Data Pemilik dan Data Tanah Terlantar. 2. DCKTRP dan DPRKP bekerjasama, mengajak dan berkolaborasi aktif-intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN untuk melakukan penelitian, menyajikan dan menyampaikan semua bidang tanah yang ada di DKI Jakarta yang sudah diterbitkan sertipikat hak tanah (HM eks Konversi Hak Barat, HGB, HP, HPL) namun fisiknya tanahnya dikuasai lama dan masif oleh masyarakat yang lokasinya berkategori perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Tanah yang sudah diberikan sertipikat hak atas tanah yang tanahnya dikuasai fisik lama dan masif oleh masyarakat, tanpa ada hubungan hukum pemilik tanah/pemegang hak, diajukan sebagai obyek penertiban tanah terlantar. 4. Tanah-Tanah Hak Atas Tanah yang dilakukan survei oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah ATR/BPN bersama dengan Pemprov DKI Jakarta ketika tanahnya memang nyata-nyata terindikasi nyata sebagai tanah terlantar, maka DCKTRP dan DPRKP mendorong Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN segera membentuk Panitia C (panitia pemeriksaan tanah terlantar) untuk melakukan pemeriksaan data yuridis dan data fisik agar dapat segera dintindaklanjuti dengan operasi penertiban tanah terlantar. 5. DCKTRP dan DPRKP tetap mendorong agar Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN mengajukan penetapan tanah terlantar pada tanah-tanah yang terindikasi kuat dan masuk kriteria tanah terlantar kepada Menteri ATR/BPN. 6. Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat setingkat Menteri atas usulan DPRKP ikut melakukan pengawalan ke Menteri ATR/BPN agar mengabulkan usulan penetapan tanah terlantar atas tanah-tanah hak yang sudah diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN DKI Jakarta. 7. Rekomendasi Panitia Pemerikasaan Tanah Terlantar. 8. Usulan Penetapan Tanah Terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN kepada Menteri ATR/BPN. 9. Keputusan Menteri ATR/BPN tentang Pemutusan Hubungan Hukum antara Pemilik Hak dengan Hak Atas Tanahnya dan tanahnya dinyatakan sebagai Tanah Negara. Sekaligus tanah negara eks penertiban tanah terlantar dinyatakan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria untuk kepentingan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta untuk penanganan fakir miskin perkotaan. 10. Keputusan Redistribusi Tanah oleh Menteri ATR/BPN untuk masyarakat miskin DKI Jakarta yang ada di lokasi-lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 11. Pensertipikatan tanah hasil redistribusi oleh Kantor Pertanahan setempat. 12. Pembagian dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat miskin di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	**Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria:** 2.1. Orang perseorangan a. WNI; b. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah. 2.2. Pekerjaan penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; guru honorer yang belum berstatus sebagai PNS; pekerja harian lepas; pegawai swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah; dan anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang setingkat. 2.3. Membuat Surat Pernyataan Penguasan Fisik (SPPF). 2.4. Berada di lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang lokasinya tidak dilarang undang-undang. 2.5. Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dari Menteri ATR/BPN. 2.6. Penerbitan dan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang tanahnya masuk kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh oleh Kementerian ATR/BPN. 2.7. DCKTRP dan DPRKP Provinsi DKI Jakarta menerbitkan penetapan lokasi terhadap tanah hasil redsitribusi sebagai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk dilakukan penganan, penataan dan peningkatan kualitas fisik dan manusianya. 2.8. DPRKP dalam melakukan peningkatan kualitas manusia dapat berkolaborasi dengan program dan kebijakan akses reform yang sasarannya adalah kesejahteraan dan kemakmuran manusia.	

Tabel 2.7 Program Kerja & Peran - Pengawasan & Pengendalian: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
BANGUNAN GEDUNG	Pemeliharaan	APBD	DPRKP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, asosiasi, RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Kelurahan dan Kecamatan **memberikan contoh teladan ruang hidup yang layak** (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) melalui perbaikan dan pemeliharaan kantor dan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan	Pilot projects (skala **Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap hunian & lingkungan	-**Pembimbingan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi **-Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala lingkungan	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap hunian & lingkungan	-**Bantuan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi -**Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala kota	Pilot projects (skala **provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap hunian & lingkungan	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat* *lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	
JALAN LINGKUNGAN	Pemeliharaan	APBD	DBM	DPRKP, DSDA, DAMKAR, DLH, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Kecamatan	Pemeliharan dan perbaikan jalan skala kecil: sesuai standar	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap aksesibilitas	Pemeliharaan dan perbaikan jalan skala lingkungan	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap aksesibilitas	Pemeliharaan dan perbaikan sistem jalan skala kota	Pilot projects (**provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak terhadap aksesibilitas	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat* *lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PENYEDIAAN AIR BERSIH	Pemeliharaan	APBD	DSDA PAM	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala kecil: Standar saluran, watertorent komunal, penyediaan air bersih	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala lingkungan: Reservoir komunal/waduk, penyediaan air bersih	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala kota	Pilot projects (skala **provinsi**) pemeliharaan &K27 perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan/atau dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	
DRAINASE LINGKUNGAN	Pemeliharaan	APBD	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan & perbaikan drainase lingkungan skala kecil: Standar saluran, drainase lingkungan	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan drainase skala lingkungan: Reservoir komunal/waduk, perbaikan drainase lingkungan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan drainase lingkungan skala kota	Pilot projects (skala **provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan/atau dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Pemeliharaan	APBD	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan air limbah skala kecil: SPALD/IPAL komunal	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan air limbah skala lingkungan: IPLT	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan air limbah skala kota	Pilot projects (skala **provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan/atau dampak lingkungan (IKA) & kesehatan	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	
PENGELOLAAN SAMPAH	Pemeliharaan	APBD	DLH	KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Dinkes, Dinsos, DPRKP, DPPAPP (bersama Dasawisma) relawan, bank sampah, RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan sampah skala rumah tangga	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan sampah skala lingkungan	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan & kesehatan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan sampah skala kota	Pilot projects (**provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan dampak lingkungan & kesehatan	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PROTEKSI KEBAKARAN	Pemeliharaan	APBD	DAMKAR	DPRKP, SDA, DBM, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Kecamatan	Pemeliharaan & perbaikan proteksi kebakaran skala kecil: Sistem hidran pasif setempat, watertorent komunal	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan risiko dampak/bencana	Pemeliharaan & perbaikan sistem proteksi Kebakaran skala lingkungan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan risiko dampak/bencana	Pemeliharaan & perbaikan sistem proteksi Kebakaran skala kota	Pilot projects (skala **provinsi**) pemeliharaan & perbaikan untuk menurunkan persentase hasil pengukuran dan/atau risiko dampak/bencana	
	Pengawasan & Pelaporan				*diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*		-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**): -Sistem pelaporan digital terbuka dan aman bagi publik -Sistem sanksi digital transparan dan aman bagi publik -Sistem manfaat keuangan (dari sanksi) yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat -Publikasi kinerja (pelaporan, sanksi, manfaat) yang digital bagi masyarakat	

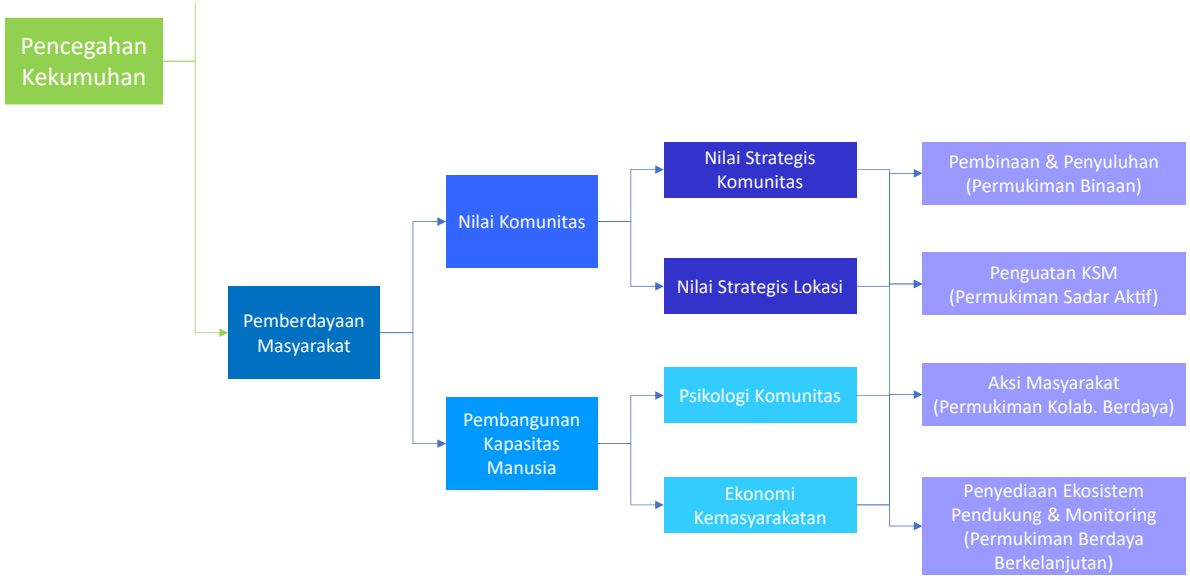
(*)	REN-AKSI	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
KEPADATAN PENDUDUK	Perwujudan standar ruang hidup	APBD	Dukcapil	DPPAPP (besama Dasawisma), DPRKP, Dinsos, Dinkes relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan	Pemilik kos, rumah kontrakan, unit sewa melapor kepada RT & Lurah secara periodik - Perda 8-2018 Ketertiban Umum	Pilot projects (skala **Kelurahan**) pendataan, analisis (masalah & potensi solusi) pertumbuhan dan pertambahan penduduk	-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **kota adm./ kabupaten**) pengendalian pertumbuhan dan perkembangan penduduk sehingga sesuai dengan standar ruang hidup melalui sistem neighborhood watch dan sanksi	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pilot projects (skala **provinsi**) pengendalian pertumbuhan dan perkembangan penduduk sehingga sesuai dengan standar ruang hidup melalui sistem neighborhood watch dan sanksi	

2.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Masyararakat pada Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan:

1) Pembangunan Nilai Komunitas adalah nilai strategis yang ada pada suatu komunitas yang berkaitan erat dengan nilai strategis lokasi tempat komunitas itu bertinggal dan bermukim.
2) Pembangunan Kapasitas Manusia adalah pembangunan kapasitas sosial-budaya melalui sudut pandang psikologi komunitas dan pembangunan keberdayaan ekonomi kemasyarakatan.

Sebagai catatan ke-2 pendekatan pemberdayaan masyarakat ini perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dalam konteks pencegahan tumbuh kembang permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas permukiman.



Gambar 2.20 Skema Cegah Kumuh Pemberdayaan Masyarakat (Tim Cegah Kumuh UPH & DPKRP, 2023)

2.2.1 NILAI KOMUNITAS (*Community Value*)

Membangun *Community Value* permukiman, merupakan proses yang tujuan akhirnya adalah *Self Sufficient Human Settlement*, yaitu membangun permukiman mandiri dan berkelanjutan. Untuk membangun *self sufficient human settlement* ini pembangunan nilai komunitas atau *community value* yang bersifat abstrak harus dapat diproyeksikan pada situasi fisik yang membangun permukiman. Untuk memahami relasi ini maka digunakan aspek-aspek pencegahan kumuh yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR NOMOR 14/PRT/M/2018 - tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan SE DJCK No. 30 tahun 2020 RP2KPKPK, yaitu aspek: bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air bersih, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran serta kaitannya dengan kepadatan penduduk. Aspek-aspek fisik ini disilangkan dengan 2 konteks dari nilai komunitas, yaitu: nilai strategis komunitas dan nilai strategis lokasi yang juga diturunkan dari peraturan dan surat edaran di atas. Relasinya dapat dilihat pada Gambar di bawah.



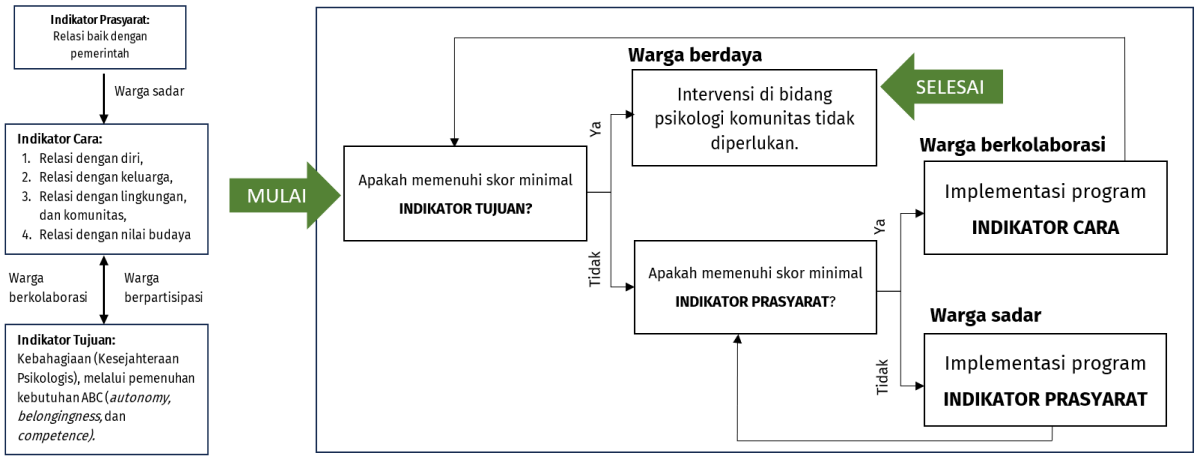
Gambar 2.21 Bagan relasi Community Value ke Aspek Fisik Lingkungan melalui 2 konteks Nilai Komunitas: nilai strategis komunitas dan lokasi (Tim 3 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

2.2.2 PEMBANGUNAN KAPASITAS MANUSIA

a. Psikologi Komunitas

Pembangunan Kapasitas Manusia untuk mengubah *mindset* dimulai dengan membangun aspek psikologis-sosial-budaya dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas melalui perspektif psikologis komunitas yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan psikologis, atau sederhananya membuat warganya bahagia. Warga dala m suatu komunitas dan permukiman tertentu mencapai kebahagiaan ketika setiap individu maupun di dalam kelompok memiliki otonomi *(autonomy)* dalam mengambil keputusan, memiliki keterhubungan dan *sense of belonging (belongingness/relatedness)*, dan memiliki keterampilan yang relevan (*competence)* dalam kelompok masyarakat tersebut (Ryan & Deci, 2000; Deci & Ryan, 1985).

Untuk mencapai kebahagiaan, maka perlu ditetapkan indikator yang dapat menentukan program kerja yang cocok untuk warga yang sedang dibangun kesejahteraan psikologisnya. Ada 3 indikator yang digunakan: Indikator Prasyarat (P) untuk mengukur relasi masyarakat dengan Pemerintah (Grimmelikhuijsen dan Knies, 2017), Indikator Cara (C) untuk mengetahui relasi individu, keluarga komunitas dan lingkungan dan nilai budaya, dan terakhir Indikatir Tujuan (T) untuk mengukur tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan psikolo gis masyarakat (The WHOQOL Group, 1998) (lihat gambar di bawah).

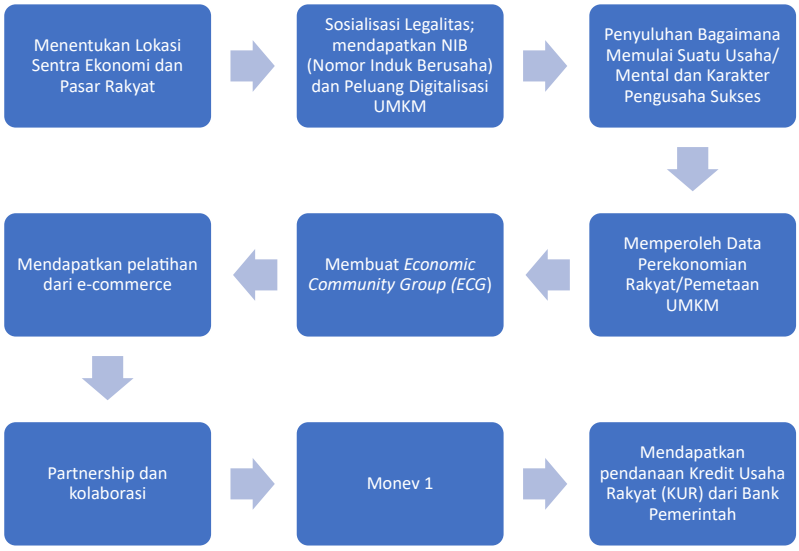


Gambar 2.22 Indikator & alur pemeriksaan pencapaian kesejahteraan psikologis/kebahagiaan warga (Tim 3 Cegah Kumuh, 2023)

b. Ekonomi Kemasyarakatan

Bersamaan dengan Pembangunan Kapasitas Manusia untuk mengubah *mindset* maka dilakukan juga penguatan aspek ekonomi dalam suatu kelompok masyarakat melalui perspektif ekonomi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mematahkan siklus urbanisme kumuh (Pieterse, 2013) untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi masyarakat secara bersama.

Keberdayaan ekonomi masyarakat dicapai dengan mengedepankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah ada di dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat yang mandiri dan partisipatif. Permasalahan UMKM adalah skala usahanya yang kecil dan kesulitan menentukan target utama pasar. Prioritas utama di kelompok ini adalah bagaimana memperluas pasar dan meningkatkan produksi , namun seringkali mereka juga tidak mampu memenuhi peningkatan permintaan. Oleh karena i tu perlu dibentuk *Economic Community Group* (ECG), yaitu kelompok ekonomi berdasarkan komunitas yang memproduksi barang atau jasa yang sejenis dalam satu konteks masyarakat. Dengan adanya ECG diharapkan terjadi peningkatan kemampuan layanan yang meluaskan kemitraan dan kolaborasi serta pada akhirnya memungkinkan kelompok UMKM ini mendapatkan pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pemerintah (lihat gambar di bawah):



Gambar 2.23 Alur pendampingan keberdayaan ekonomi (Tim SOP & ST PKP UPH, 2022)

2.2.3 PROGRAM KERJA & PERAN

Program Kerja & Peran Pemberdayaan Masyarakat adalah s ebagai berikut:

- Program Kerja dan Peran: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk (tabel 2.8) yang merespon aspek Pertimbangan Lain dalam PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 dengan mengurutkan kajian sesuai dengan aspek fisik Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh pada PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 untuk menjadi jembatan antara pembangunan fisik dan manusia. Setiap kriteria akan dibedah dari 2 nilai, yaitu nilai strategis komunitas dan nilai strategis lokasi.
- Program Kerja dan Peran: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas (tabel 2.9) dan Program Kerja dan Analisis Peran: Kondisi Perekonomian Masyarakat – Ekonomi Kemasyarakatan (tabel 2.10) merespon aspek Pertimbangan Lain dalam PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018.

Tabel 2.8 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
BANGUNAN GEDUNG	Membangun kesadaran tentang Bangunan Gedung yang layak	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DPRKP DCKTRP PTSP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan, asosiasi.	**Penyemaian pengetahuan bangunan gedung hunian yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara hunian	Pilot projects (**RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & keselamatan dengan pretest & post test **- Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun hunian yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi): --Hunian layak ventilasi dan pencahayaan alami --Hunian layak material struktur, lantai, dinding, plafon & atap	**Penerimaan atas nilai bangunan gedung hunian yang layak:** -Hunian terdampak oleh dan berdampak terhadap lingkungan -Hunian perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Hunian butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (**kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun & memelihara hunian individual dan lingkungan komunal yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai bangunan gedung hunian yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	**Lihat *Scoring* Bangunan Gedung u/ u/ standar Bangunan Gedung Layak Huni:** 1. Tk. keteraturan dan kepdatan Bangunan --> PUPR 14/2018 2. Memenuhi persyaratan keandalan bangunan --> Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227; Permen PUPR 14/2018
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DPRKP DCKTRP PTSP	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, Sosial, Kesehatan	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi**= Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
JALAN LINGKUNGAN	Membangun kesadaran tentang pengelolaan Jalan Lingkungan	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DBM	DPRKP, DSDA, DAMKAR, DLH, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan.	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan jalan lingkungan yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara jalan lingkungan	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & keselamatan dengan pretest & post test **- Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun jalan lingkungan	**Penerimaan atas nilai pengelolaan jalan lingkungan yang layak layak:** -Pengelolaan jalan lingkungan terdampak oleh dan berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, kemudahan, kenyamanan huninan & lingkungan -Pengelolaan jalan lingkungan perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan jalan lingkungan butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun & memelihara pengelolaan jalan lingkungan individual/komunal yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai pengelolaan jalan lingkungan yang layak terintegrasi:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DBM	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PENYEDIAAN AIR BERSIH	Membangun kesadaaran tentang tata kelola Penyediaan Air Bersih	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DSDA PAM	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma.	**Penyemaian pengetahuan tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke air permukaan & air tanah -Warga perlu membangun & memelihara tata kelola penyediaan air bersih	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun tata kelola penyediaan (sumber, saluran, penampungan) air bersih skala yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi)	**Penerimaan atas nilai tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** -Penyediaan air bersih terdampak oleh dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan -Penyediaan air bersih perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Penyediaan air bersih butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem tata kelola yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun tata kelola penyediaan (sumber, saluran, penampungan) air bersih skala yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DSDA PAM	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	**Identifikasi**= Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
DRAINASE LINGKUNGAN	Membangun kesadaran tentang pengelolaan Drainase Lingkungan	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma.	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke drainase lingkungan -Warga perlu membangun & memelihara drainase lingkungan	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun & memelihara drainase lingkungan skala kecil yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi)	**Penerimaan atas nilai pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** -Drainase terdampak oleh dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan -Drainase lingkungan perlu layak sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Drainase lingkungan butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun & memelihara drainase lingkungan yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DSDA	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	**Identifikasi**= Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan **tantangan lokus** (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras **kemenarikan berkelanjutan** (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi**= Nilai Strategis Komunitas yang selaras **elemen hunian manusia** (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PENGELOLAAN AIR LIMBAH	Membangun kesadaran tentang Pengelolaaan Air limbah	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma.	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan air limbah yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke air permukaan dan air tanah -Warga perlu membangun & memelihara pengelolaan air limbah individu/komunal	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun & memelihara tangki septik individual/komunal yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi)	**Penerimaan atas nilai pengelolaan air limbah yang layak terintegrasi:** -Pengelolaan air limbahterdampak oleh dan berdampak pada lingkungan & kesehatan -Pengelolaan air limbah perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan air limbah butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test - **Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun & memelihara tangki septik individual/komunal yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai pengelolaan air limbah yang layak terintegrasi:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DSDA	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan **tantangan lokus** (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras **kemenarikan berkelanjutan** (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras **elemen hunian manusia** (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PENGELOLAAN SAMPAH	Membangun kesadaran tentang Pengelolaan Sampah	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DLH	Dinkes, Dinsos, DPRKP, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Satpol PP, RT, RW, LMK, Dasawisma, Bank Sampah, Relawan.	**Penyemaian pengetahuan warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami **hasil** Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara pengelolaan sampah	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & keselamatan dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun pengelolaan sampah	**Penerimaan atas nilai warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** -Pengelolaan sampah berdampak terhadap lingkungan & kesehatan -Pengelolaan sampah perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan sampah butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test - **Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk **memperbaiki /membangun & memelihara** pengelolaan sampah individual/komunal yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DLH	sama dengan di atas ditambah Kementerian LHK, Kesehatan, Sosial, PUPR	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
PROTEKSI KEBAKARAN	Membangun kesadaran tentang Proteksi Kebakaran	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	DAMKAR	DPRKP, SDA, DBM, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan.	**Penyemaian pengetahuan proteksi kebakaran yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara proteksi kebakaran	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & keselamatan dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/ membangun proteksi kebakaran yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi)	**Penerimaan atas nilai proteksi kebakaran yang layak layak:** -Proteksi kebakaran terdampak oleh dan berdampak pada keselamatan individu dan lingkungan -Proteksi kebakaran perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Proteksi kebakaran butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak lingkungan & kesehatan dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri atau kolaborasi CSR warga untuk memperbaiki/membangun & memelihara proteksi kebakaran individual/komunal yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai proteksi kebakaran yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	DAMKAR	sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

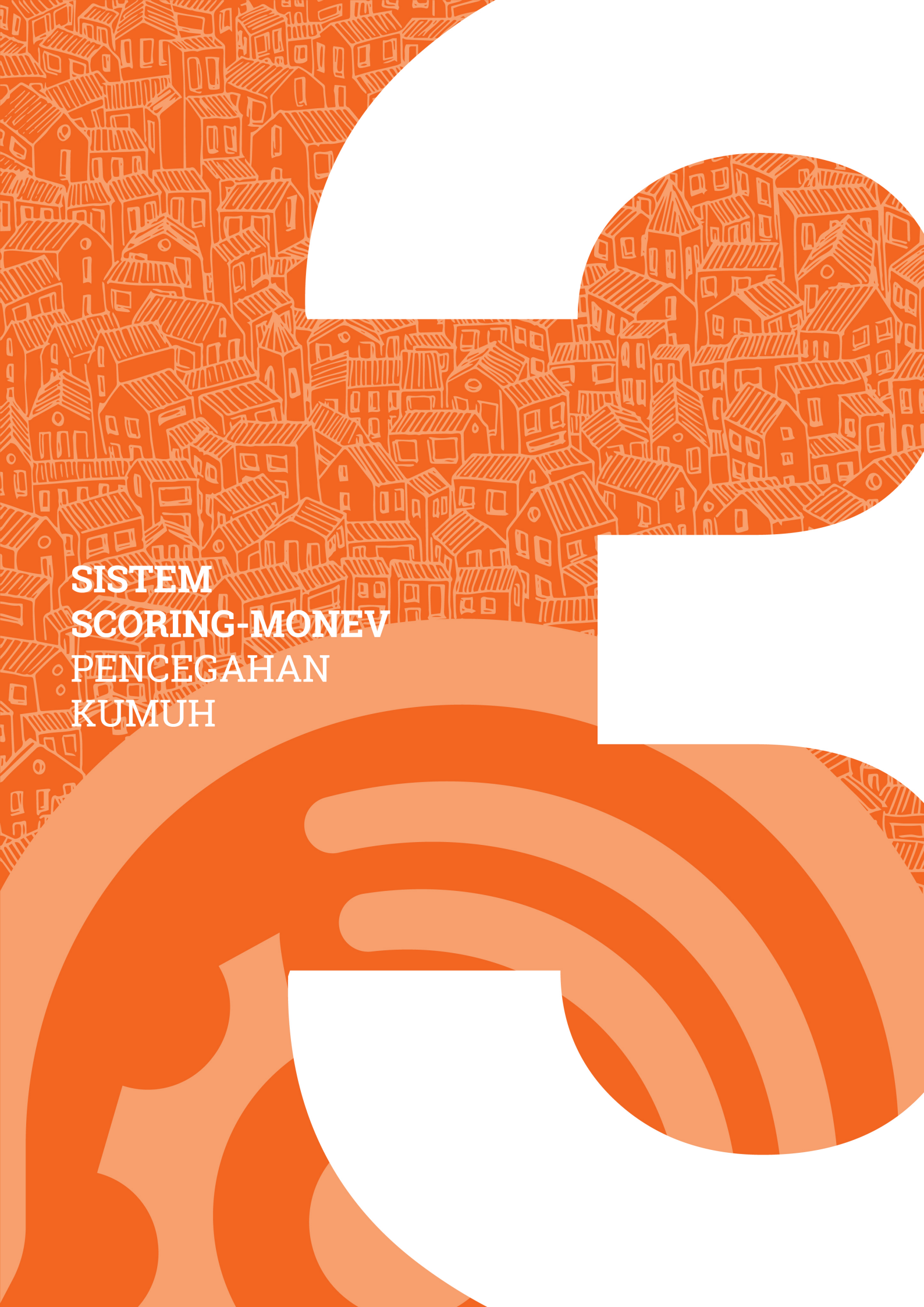
(*)	REN-AKSI	SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	JPEN (1-3 tahun)			JMEN (3-5 tahun)		JPAN (>5 tahun)		KET.
				INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
KEPADATAN PENDUDUK	Membangun kesadaran tentang standar Kepadatan Penduduk	**NILAI STRATEGIS KOMUNITAS**									
		APBD	Dukcapil	DPPAPP (besama Dasawisma), DPRKP, Dinsos, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan.	**Penyemaian pengetahuan ruang hidup yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & menjaga ruang hidup	Pilot projects (skala **RT, RW, Kelurahan**): - Edukasi **hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak terhadap kesehatan, keselamatan, kemudahan, kenyamanan ruang hidup dengan pretest & post test - **Perencanaan & pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk mewujudkan ruang hidup yang layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) termasuk Keluarga Berencana Lestari dan transmigrasi	**Penerimaan nilai ruang hidup yang layak:** -Ruang hidup terdampak oleh kepadatan penduduk -Ruang hidup berdampak terhadap kelayakan hunian & lingkungan -Ruang hidup perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Ruang hidup yang layak butuh perencanaan, pembangunan, pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	Pilot projects (skala **kota adm./kabupaten**): - Edukasi **pembaharuan hasil** Pengukuran dan Analisis serta dampak terhadap kesehatan, keselamatan, kemudahan, kenyamanan ruang hidup dengan pretest & post test **- Pelaksanaan** mandiri/kolaborasi CSR warga untuk ruang hidup yang layak **-Partisipasi & apresiasi neighborhood watch** yang dilakukan warga	**Pemahaman atas nilai ruang hidup yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	Pilot projects (skala **provinsi**): (lihat poin penjelasan pada kolom Target Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	
		NILAI STRATEGIS LOKASI									
		APBD	Dukcapil	sama dengan di atas ditambah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Sosial, Kesehatan, PUPR	**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas dengan kolaborasi **lintas kepamongan & kementerian**	**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas kota adm. atau kabupaten & kementerian**	**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	= Pilot projects Nilai Strategis Komunitas yang dengan kolaborasi **lintas provinsi & kementerian**	1. Identifikasi: Mengapa saya menetap dan bertahan di sini? 2. Aksi-membangun rencana dan aksi bersama orang lain: Bagaimana saya bergemar menetap dan bertahan di sini? 3. Integrasi-membangun rencana dan aksi bersama lembaga lain: Bagaimana saya bangga menetap dan bertahan di sini?

Tabel 2.9 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

PEMBANGUNAN KAPASITAS MANUSIA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Psikologi Komunitas	Permukiman Binaan	Memperbaiki persepsi Masyarakat tentang lingkungan,kesehatan, kesejahteraan & pelayanan publik	APBD: DPA SKPD/UKPD terkait. Memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR	Pengarah Pokja PKP: • Sekretaris Daerah DKI. • Deputi Gub. DKI Jakarta Bid. Pengendalian Kependudukan & Permukiman. Ketua Pokja PKP: • Asisten Sekda Bid. PLH DKI. Ketua Pelaksana Harian Pokja PKP: • Kepala BAPPEDA DKI. Ketua Bid. Kelembagaan & Kemitraan: Ka. Biro Kerjasama Daerah Setda DKI	• Internal PD Pemprov DKI: DPPAPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	Peningkatan kualitas: • Relasi dengan pemerintah, dan • Relasi dengan diri sendiri untuk membangun kesadaran masyarakat (*awareness*)	• Kampanye menumbuhkan *awareness* & mengubah *mindset* . • Sosialisasi perubahan *mindset* sehingga warga memiliki *growth mindset* . Di setiap akhir sosialisasi, pemerintah dapat menunjukkan sikap untuk selalu siap sedia membantu masyarakat agar semakin berdaya. • Peningkatan program kesehatan masyarakat, salah satunya pencegahan dan penanganan stunting.							(lihat tabel Scoring-Monev) (n=1) Lokasi memiliki potensi tinggi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara (nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara (n=5) Lokasi tidak memiliki potensi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara
	Permukiman Sadar Aktif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam program-program.				Peningkatan kualitas: • Relasi dengan diri sendiri, • Relasi dengan keluarga, • Relasi dengan lingkungan sekitar untuk membuat/mengajak masyarakat berpartisipasi secara sadar dan aktif (*belongingness*)	• Program pembentukan & penguatan komunitas. • Penguatan potensi indigenous warga sesuai dengan karakteristik sosial budaya permukiman warga (Hanya dilakukan ketika masyarakat telah memiliki motivasi / kemauan untuk berdaya). • Program pembentukan & penguatan komunitas (Kelompok Masyarakat/ Pokdarwis/ kelompok kebudayaan/ konservasi)							
	Permukiman Kolaboratif Berdaya	Meningkatkan aksi Masyarakat & *stakeholders* (elemen masyarakat) dalam peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi.						• Internal PD Pemprov DKI: DPPAPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	Peningkatan kualitas: • Relasi dengan diri sendiri, • Relasi dengan keluarga, • Relasi dengan lingkungan sekitar untuk mendorong keberdayaan masyarakat melalui penguatan jejaring kolaborasi (*competence*)	• Program pelatihan dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan. • Pendampingan kepada masyarakat untuk menjalankan hasil pelatihan atau penguatan potensi *indigenous* yang telah diikuti sebelumnya. • Pendampingan komunitas (Kelompok Masyarakat/ Pokdarwis/ kelompok kebudayaan/ konservasi)			
	Permukiman Berdaya Berkelanjutan	Mewujudkan otonomi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan melakukan inisiatif kerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai lembaga.									• Internal PD Pemprov DKI: DPPAPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	Peningkatan kualitas: • Relasi dengan sistem nilai dan budaya untuk menjadi sistem pendukung otonomi dan keberdayaan masyarakat (*autonomy*)	• Program promosi nilai budaya, keunikan lingkungan, dengan berkolaborasi dengan mitra. • Warga permukiman yang telah berhasil berdaya diminta untuk menjadi *trainer* yang membantu warga di permukiman sekitarnya berdaya, khususnya untuk memberikan pembekalan kompetensi. • Peningkatan otonomi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan melakukan inisiatif kerjasama atau berkolaborasi dengan berbagai lembaga. • Membuat rencana jangka pendek, menengah dan panjang (*Roadmap*).	

Tabel 2.10 Program Kerja & Peran - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Ekonomi Masyarakat - Ekonomi Kemasyarakatan (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

PEMBANGUNAN KAPASITAS MANUSIA	RENCANA AKSI		SARAN SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JMEN (3-5 tahun)		INSTANSI TERKAIT	JPAN (> 5 tahun		KETERANGAN
						KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET	
Ekonomi Kemasyarakatan	Permukiman Binaan	Pembinaan dan pelatihan perekonomian kontekstual/tepat sasaran sesuai identifikasi.	APBD: DPA SKPD/UKPD terkait. Memungkinkan untuk menggunakan dana Non-APBD: CSR	Pengarah Pokja PKP: • Sekretaris Daerah DKI. • Deputi Gub. DKI Jakarta Bid. Pengendalian Kependudukan & Permukiman. Ketua Pokja PKP: • Asisten Sekda Bid. PLH DKI. Ketua Pelaksana Harian Pokja PKP: • Kepala BAPPEDA DKI. Ketua Bid. Kelembagaan & Kemitraan: Ka. Biro Kerjasama Daerah Setda DKI	• Internal PD Pemprov DKI: DPPKUKM, DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPPAPP, Dinas Sosial, DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	• Identifikasi kondisi ekonomi, jenis pekerjaan / usaha (homogen atau heterogen). • Identifikasi penghasilan tidak stabil (*erratic)* atau stabil. • Identifikasi potensi ekonomi • Identifikasi persepsi Masyarakat tentang budaya, komunitas, inklusi sosial dan lingkungan.	1. Identifikasi potensi ekonomi masyarakat. 2. Pembinaan dan pelatihan perekonomian kontekstual/tepat sasaran sesuai identifikasi. 3. Pengenalan bisnis UMKM/ legalitas dengan NIB.							(lihat MONEV) (n=1) Lokasi memiliki potensi tinggi ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara. (nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara. (n=5) Lokasi tidak memiliki potensi ekonomi tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara.
	Permukiman Sadar Aktif	Pembentukan Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*).				• Identifikasi partisipasi Masyarakat dalam program-program peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi perekonomian. • Identifikasi pengembangan ekonomi. • Terbentuknya Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*).	• Pelatihan Tata Kelola Bisnis UMKM Kolaboratif: '1. Pelatihan tentang memperoleh legalitas dengan NIB & Akun Virtual Bank Pemerintah; 2. Membuka Toko Online; 3. Melakukan transaksi melalui Akun Virtual Bank yang telah dibuat; 4. Peningkatan jumlah unit yang terjual; 5. Peningkatan presentase penjualan; 6. Peningkatan jumlah pelanggan, dan; 7. Peningkatan variasi Produk. • Pembentukan Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*). • Pembentukan ECG bisa mendorong pembentukan Koperasi (opsional).							
	Permukiman Kolaboratif Berdaya	• Penerapan Tata Kelola Bisnis & teknologi tepat guna. '• Pelatihan kontekstual u/ peningkatan kapasitas manusia dan peningkatan kualitas kelembagaan						• Internal PD Pemprov DKI: DPPKUKM, DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPPAPP, Dinas Sosial, DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	• Identifikasi peningkatan kompetensi yang diperlukan untuk membuka usaha. '• Tersusunnya rencana aksi masyarakat & *stakeholders* dalam peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi.	• Penerapan Tata Kelola Bisnis UMKM Kolaboratif: 1. Peningkatan jumlah karyawan; 2. Peningkatan aset; 3. Peningkatan penggunaan aset; 4. Peningkatan modal usaha, modal kerja; 5. Melakukan pencatatan laporan keuangan; 6. Melakukan Digitalisasi Laporan Keuangan; 7. Peningkatan Produktivitas, dan; 8. Program kolaborasi dan Kemitraan. '• Penerapan teknologi tepat guna. '• Program pelatihan, peningkatan kapasitas manusia dan peningkatan kualitas kelembagaan kontektual/tepat sasaran			
	Permukiman Berdaya Berkelanjutan	Mewujudkan otonomi ekonomi masyarakat melalui Komunitas Ekonomi Bersatu (*One ECG)* .									• Internal PD Pemprov DKI: DPPKUKM, DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPPAPP, Dinas Sosial, DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	• Identifikasi & memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan upaya inovasi (kekhasan /memiliki karakteristik). '• Komunitas Ekonomi Bersatu (One ECG).	• Mewujudkan Komunitas Ekonomi Bersatu (*One ECG*): 1. Peningkatan laba perusahaan; 2. Penurunan biaya produksi per unit; 3. Kelayakan mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat); 4. Dukungan lembaga pendanaan (koperasi); 5. Bermitra dalam program promosi & festival.	



SISTEM SCORING-MONEV PENCEGAHAN KUMUH

BAB 3 SISTEM *SCORING & MONEV*

Sistem *Scoring*-Monev pada Manual Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Provinsi DKI Jakarta diurutkan sebagai berikut:

1) Pengawasan & Pengendalian:

- *Scoring & Monev*: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat (Tabel 3.1), Tanah di Lokasi Yang Dilarang UU (Tabel 3.2), Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga (Tabel 3.3) mengembangkan sistem *scoring* aspek Legalitas Lahan PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 → (+) 100% dan (-) 0-99%.
- *Scoring & Monev*: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi (Tabel 3.4) mengembangkan sistem *scoring* aspek Fisik PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018 → 76-100% tidak memenuhi/sesuai, masuk ke dalam program Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) atau masuk ke dalam program Pencegahan Kekumuhan (CK) **pemeliharaan** (n=5), 51-75% tidak memenuhi/sesuai, masuk PKP atau masuk CK pemeliharaan (n=3), 25-50% tidak memenuhi/sesuai, masuk PKP atau masuk CK pemeliharaan (n=1), dan 0-24% tidak memenuhi/sesuai, masuk Pencegahan Kekumuhan (CK).

2) Pemberdayaan Masyarakat:

- *Scoring & Monev*: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk (tabel 3.5) mengembangkan sistem *scoring* aspek Fisik PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018, dengan besaran nilai sesuai sistem *scoring* aspek Pertimbangan Lain, namun dibalik urutannya agar sesuai dengan sistem *scoring* aspek fisik → 76-100% tidak memenuhi/sesuai, masuk ke dalam program Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) atau masuk ke dalam program Pencegahan Kekumuhan (CK) **pemeliharaan** (n=5), 51-75% tidak memenuhi/sesuai, masuk PKP atau masuk CK pemeliharaan (n=3), 25-50% tidak memenuhi/sesuai, masuk PKP atau masuk CK pemeliharaan (n=1), dan 0-24% tidak memenuhi/sesuai masuk Pencegahan Kekumuhan (CK).
- *Scoring & Monev*: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas (tabel 3.6) dan Kondisi Perekonomian Masyarakat – Ekonomi Kemasyarakatan (tabel 3.7) mengembangkan sistem *scoring* aspek Pertimbangan Lain PerMen PUPR No. 14/PRT/M/2018, dengan besaran nilai sesuai sistem *scoring* aspek Pertimbangan Lain, namun dibalik urutannya agar sesuai dengan sistem *scoring* aspek sebelumnya → n=5 untuk lokasi tidak memiliki potensi sosial, budaya, ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara, n antara 1 -5 lokasi yang memiliki potensi, sedangkan n=1 untuk lokasi dengan potensi tinggi. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa n=5 setara kondisi kumuh berat dengan tingkat Permukiman Binaan, nilai n=3 -4 setara kondisi kumuh sedang dengan tingkat Permukiman Sadar & Aktif, nilai=2 -3 setara kondisi kumuh ringan dengan tingkat Permukiman Kolaboratif Berdaya, dan nilai 1 setara kondisi tidak kumuh dengan tingkat Permukiman Berdaya Berkelanjutan.

Tabel 3.1 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Milik Masyarakat (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 100%	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
											KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
LEGALITAS LAHAN (HAK ATAS TANAH & BANGUNAN)	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Tanah Milik Masyarakat: Status penguasaan antara lain: 1. Tanah HM, HGB, HP 2. Tanah Kaveling 3. Tanah Girik (tanah milik adat) 4. Tanah Negara Bebas 5. Tanah (Negara) Timbul Alamiah 6. Tanah (Negara) Timbul karena Reklamasi 7. Tanah Negara eks Hak Barat 8. Tanah Negara eks Tanah Partikelir 9. Tanah Negara eks Konversi Hak Barat 10. Tanah Garapan 11. Penguasaan Fisik lebih dari 20 tahun	Sesuai UU & Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL)	Pasal 94 UU No. 1/2011 jo Pasal 126 ayat 1 UU No. 6/2023 Pasal 94 ayat 2 UU No. 1/2011 Jo Reforma Agraria Ps 126 ayat 1 UU 6/2023 dan Perpres 86/2018	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(+) 100%	(+): 100% Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. Bila hasil pengukuran (-) maka masuk ke opsi 2 Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing)	Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta, Kantor Pertanahan • Internal PD	Untuk Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada kolom ketiga: 1. Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui PTSL 2. Dukungan penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebagai Alas Hak untuk mengajukan Sertipikat HAT cukup Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta 3. Pembangunan Rusun, Peremajaan, Pemugaran.	Untuk Nomor 7, 8, 9, 10, 11 pada kolom ketiga: 1. Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui PTSL 2. Dukungan penggunaan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF) sebagai Alas Hak untuk mengajukan Sertipikat HAT cukup Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta 3. Pembangunan Rusun, Peremajaan, Pemugaran.		
	Kesesuaian RTR		Tidak Sesuai UU & Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing) Insitu Redevelopment & Insitu Land Consolidation (Konsolidasi Tanah)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0-99%	(-) 0-99% Sebagian lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri		1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait.		
				Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0%	(-) 0% Keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri			1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan.	

Konversi Prosentase	Nilai	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
100% memenuhi/sesuai	(+)	Tidak Kumuh	Berdaya Berkelanjutan	PTSL	Pendaftaran Sertipikat	JPEN (1-3 tahun)	JMEN (3-5 tahun)	
51-99% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Ringan	Berdaya Kolaboratif	Pengosongan Sebagian	Insitu Development/Insitu Land Consolidation		JMEN (3-5 tahun)	
1-50% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Sedang	Sadar Aktif	Pengosongan Sebagian				
0% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Berat	Binaan	Pengosongan Total	Relokasi			JPAN (> 5 tahun)

Tabel 3.2 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah Yang Dilarang UU (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 100%	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
											KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
LEGALITAS LAHAN (HAK ATAS TANAH & BANGUNAN)	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Tanah yang dilarang Undang-Undang: Status penguasaan antara lain: 1. Bantaran, Sempadan, di atas Embung, Sungai, Danau, Waduk (ESDW). 2. Sempadan Laut, pesisir laut, di Atas Laut. 3. Sempadan Jalan, Sempadan Bangunan, Daerah Milik Jalan/ Bawah Tol/Bawah Jembatan/Bawah Fly Over atau di daerah Obyek Vital Negara (Obvit) atau lokasi Ring 1 Keamanan Negara (Kamneg). 4. Sempadan Jalan / Daerah Milik Jalan Kereta Api.	Tidak Sesuai UU & Tata Ruang: UU SDA, PP Sungai. UUP3WP, UUPR. UU Jalan, UU Perkeretaapian, UU BUMN, UU Perbendaharaan Negara dan UU lain yang terkait.	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing) Insitu Redevelopment & Insitu Land Consolidation (Konsolidasi Tanah)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0-99%	(-) 0-99% Sebagian lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri • Menteri PUPR (khusus yang dikelola dan atau dalam pengawasaan Pusat).		1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pemberian Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait dengan itu.		
	Kesesuaian RTR			Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0%	(-) 0% Keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri			1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan.	

Konversi Prosentase	Nilai	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
51-99% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Ringan	Berdaya Kolaboratif	Pengosongan Sebagian	Insitu Development/Insitu Land Consolidation		JMEN (3-5 tahun)	
1-50% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Sedang	Sadar Aktif	Pengosongan Sebagian				
0% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Berat	Binaan	Pengosongan Total	Relokasi			JPAN (> 5 tahun)

Tabel 3.3 Scoring & Monev - Pengawasan Pengendalian: Hak Atas Tanah & Bangunan pada Tanah di Lokasi Milik/Aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 100%	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
											KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
LEGALITAS LAHAN (HAK ATAS TANAH & BANGUNAN)	Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Tanah di lokasi milik/aset Pemprov, BMD, BUMD, BUMN: Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI. 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.	Sesuai UU & Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: 1. Pemanfaatan Tanah Aset Pemprov & Pembebanan Hak. 2. Pemanfaatan Tanah Aset BMD/BUMD.	Pasal 94 UU No. 1/2011 jo Pasal 126 ayat 1 UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(+) 100%	(+): 100% Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. Bila hasil pengukuran (-) maka masuk ke opsi 2 Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing)	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda Direksi BUMD	• Gubernur (pemilikAset) • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : BPAD, DCKTRP, DPRKP, BPBUMD, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat : Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta	1. Pemanfaatan Tanah Aset di atas Tanah HGB, HP. HPL Aset Pemprov 2. Pembebanan Hak (Pemberian HGB/HP di atas Tanah HPL Aset Pemprov) 3. Pemberian Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait.	1. Pemanfaatan Tanah Aset di Atas Tanah HGB, HP. HPL Aset BMD/BUMD. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait.		
				Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: 1. Pemanfaatan Tanah Aset BUMN.		1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(+) 100%	(+): 100% Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. Bila hasil pengukuran (-) maka masuk ke opsi 2 Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing)	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda • Direksi BUMN • Menteri BUMN untuk BUMN • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi)	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: BPAD, DCKTRP, DPRKP, Lurah/Camat • Pemerintah Pusat: Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ATR/BPN, Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta.			1. Pemanfaatan Tanah Aset (Pinjam Di Atas Tanah HGB, HP. HPL Aset BUMN). 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait	
				Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: 1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria.		1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(+) 100%	(+): 100% Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. Bila hasil pengukuran (-) maka masuk ke opsi 2 Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing)	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda. • Direksi BUMN/BUMD. • Menteri BUMN untuk BUMN. • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi).	• Internal PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah Camat. • Kementerian/ Kepala LPNK terkait Pengguna Aset. • Kementerian ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi). • Kanwil ATR/BPN. • Kantor Pertanahan.		1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. 3. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait		
	Kesesuaian RTR		Tidak Sesuai UU &Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Menempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing) Insitu Redevelopment & Insitu Land Consolidation (Konsolidasi Tanah)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0-99%	(-) 0-99% Sebagian lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sebagian lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri • Menteri PUPR (khusus yang dikelola dan atau dalam pengawasaan Pusat)		1. In Situ Redevelopment, In Situ Land Consolidation, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, Rumah Semi Permanen, Peremajaan, Pemugaran, Rehabilitasi atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan yang terkait.		

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 100%	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
											KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
LEGALITAS LAHAN (HAK ATAS TANAH & BANGUNAN)	Kesesuaian RTR	Tanah di lokasi milik/aset Pemprov, BMD/BMN, BUMD, BUMN: Status penguasaan antara lain: 1. Aset Barang Milik Pemprov DKI. 2. BMD, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah.	Tidak Sesuai UU &Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Menggunakan/Memempati atas Tanah/ Bangunan: Pengosongan Lahan Total (Totally Land Clearing)	UU No. 2 Tahun 2012 jo UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(-) 0%	(-) 0% Keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR.	Gubernur DKI & Kementerian ATR BPN cq Kanwil ATR BPN DKI Jakarta	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : DCKTRP, DPRKP, Walikota/Bupati, Lurah/Camat, Satpol PP • Pemerintah Pusat: Kanwil ATR/BPN • TNI/Polri • DPRD • Pengadilan Negeri			1. Relokasi, Permukiman Kembali, Pembangunan Rusunami, Rusunawa, atau bentuk solusi lain yang disepakati. 2. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKBG Sarusun, Surat Izin Pinjam Pakai, PBG/IMB, dan/atau lain perizinan.	
		Tanah di lokasi milik/aset Pihak Ketiga: Status penguasaan: 1. Badan Usaha Privat. 2. Perorangan.	Sesuai UU & Tata Ruang	Pengusulan Kepastian Hak Memiliki atas Tanah/ Bangunan: 1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria.	Pasal 94 UU No. 1/2011 jo Pasal 126 ayat 1 UU No. 6/2023	1. Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. 2. Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	(+) 100%	(+): 100% Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR. Bila hasil pengukuran (-) maka masuk ke opsi 2 Pengosongan Lokal Sebagian (Partially Land Clearing)	• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta - Gubernur & Sekda. • Menteri/Kepala LPNK terkait Pengguna Aset • Menteri ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi).	• Internal PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: DCKTRP, DPRKP, Lurah Camat. • Kementerian/ Kepala LPNK terkait Pengguna Aset. • Kementerian ATR/BPN (SK Penertiban Tanah Terlantar dan Redistribusi). • Kanwil ATR/BPN. • Kantor Pertanahan.			1. Redistribusi Tanah Melalui Operasi Penertiban Tanah Terlantar. 2. Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria. 3. Pengusulan Sertipikat HAT, SHM Sarusun, SKGB Sarusun, Surat Izin pemanfaatan, PBG/IMB, dan lain perizinan yang terkait.	

Konversi Prosentase	Nilai	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
100% memenuhi/sesuai	(+)	Tidak Kumuh	Berdaya Berkelanjutan	Pinjam Pakai & Pembebanan Hak, Pelepasan Aset, Reforma Agraria, Redistribusi Tanah	Pemberian Sertipikat, Redistribusi	JPEN (1-3 tahun)	JMEN (3-5 tahun)	JPAN (> 5 tahun)
51-99% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Ringan	Berdaya Kolaboratif	Pengosongan Sebagian	Insitu Development/Insitu Land Consolidation		JMEN (3-5 tahun)	
1-50% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Sedang	Sadar Aktif	Pengosongan Sebagian				
0% memenuhi/sesuai	(-)	Kumuh Berat	Binaan	Pengosongan Total	Relokasi			JPAN (> 5 tahun)

Tabel 3.4 Scoring & Monev - Pengawasan & Pengendalian: Standar Teknis & Kelaikan Fungsi (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
BANGUNAN GEDUNG		Perencanaan	Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	-Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung -Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung -Sertifikat Layak Fungsi -Persetujuan Bangunan Gedung *Yang terdiri dari (lihat di bawah)*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK**	DPRKP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, asosiasi, RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Kelurahan dan Kecamatan **memberikan contoh teladan ruang hidup yang layak** (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) melalui perbaikan dan pemeliharaan kantor dan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	**-Pembimbingan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi **-Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	**-Bantuan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi **-Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
		Sistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019, Kementerian LHK	-Indeks Kualitas Udara-IKU (parameter SO2 & NO2) -Indeks Kualitas Air-IKA (TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, total coliform)				penentuan bersama Dinas SDA, LH, Kesehatan							
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	-Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung -Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung -Sertifikat Layak Fungsi -Persetujuan Bangunan Gedung **A. Persyaratan administrasi:** Status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, IMB **B. Persyaratan teknis:** **'B1. Persyaratan tata bangunan** -Peruntukan -Intensitas -Arsitektur -Pengendalian dampak *Yang terdiri dari (lihat di bawah)* **B2. Persyaratan keandalan gedung** -Keselamatan -Kesehatan -Keamanan -Kenyamanan *Yang terdiri dari (lihat di bawah)* *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan						
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	**B. Persyaratan teknis:** **B1. Persyaratan tata bangunan** **-Peruntukan** – fungsi tidak sesuai peruntukan RTRW, RDTR RTBL										
	Ketidakteraturan bangunan		Permen PUPR 14-2018	-Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau -Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 1						
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	**-Intensitas** – kepadatan (KDB), ketinggian (KLB), jarak bebas (GSB, GSJ, GSS, GSP, GSSDEW, GSKA) *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
BANGUNAN GEDUNG	Tingkat kepadatan bangunan	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	-KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; -KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau -Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: --untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha --untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 5 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 3 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 1	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DPRKP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, asosiasi, RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Kelurahan dan Kecamatan memberikan **contoh teladan ruang hidup yang layak** (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) melalui perbaikan dan pemeliharaan kantor dan lingkungan Kelurahan dan Kecamatan *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	**-Pembimbingan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi **-Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	**-Bantuan kelayakan** bangunan gedung & lingkungan hunian kolaborasi dengan asosiasi profesi **-Perbaikan kelayakan** rumah dan perumahan skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227 + Permen PUPR 14-2018	**-Arsitektur** – penampilan; tata ruang dalam; keseimbangan, keserasian, keselarasan dengan lingkungan **-Pengendalian dampak lingkungan** *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan						
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227 + Permen PUPR 14-2018	**B2. Persyaratan keandalan bangunan gedung** **-Keselamatan** – struktur, bahaya kebakaran, penangkal petir, keamanan & keandalan instalasi listrik, bencana bahan peledak **-Kesehatan** – penghawaan, pencahayaan, sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, sistem pembuangan kotoran & sampah, sistem penyaluran air hujan, penggunaan bahan bangunan **-Kenyamanan** – ruang gerak, kondisi udara dalam ruang, pandangan, getaran & kebisingan **-Kemudahan** – hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; kelengkapan sapras pemanfaatan bangunan gedung; hu bungan horisontal dan vertical serta sarana evakuasi *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 1						
			Pergub 135-2019	**-Pemecahan/penggabungan lahan perencanaan hunian** dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan batas luas pada sub zona yang diatur dalam RDTR & PZ kecuali pada kawasan petak/kavling yang sudah ditetapkan rencana kota dan pada kawasan pelestarian/caga budaya – 2.2.6. **-GSB pada pantai di pulau** (seperti Kep. Seribu) harus memenuhi ketentuan GSP yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ atau disesuaikan dengan kondisi pulau – 2.3.1.6.				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan						
		Dampak		Pengukuran ketidakteraturan (ketidaklaikan) bangunan gedung terkait masalah kriteria lain: -Legalitas lahan -Kependudukan -Kebakaran -Pegelolaan sampah -Drainase lingkungan -Penyediaan air bersih -Pengelolaan air limbah -Jalan lingkungan				Penentuan bersama Dukcapil. DPPAPP, DBM, SDA, DLH, Dinkes, Dinsos						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
JALAN LINGKUNGAN		Perencanaan	-	-				-	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DBM	DPRKP, DSDA, DAMKAR, DLH, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan jalan skala kecil: sesuai standar *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	Pemeliharaan dan perbaikan jalan skala lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan dan perbaikan sistem jalan skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sistem	Permen PUPR 14-2018	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis			5	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 5 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 3 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 1							
	Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Kondisi		Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman			5	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 1							
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 15, 36, 47	Jalan lingkungan L ±4m atau Jalan lokal sekunder L ±3-7m atau Jalan lokal sekunder II & III L ±3-6m atau Jalan lingkungan I L ±1,5-2,0m atau Jalan lingkungan II L ±1,2 m atau Jalur pedestarian L ±1,5m				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan						
				Jalan memiliki perlengkapan & fasilitas Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) Bahu jalan, badan jalan Kemiringan lereng 0%-15% *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 50	Parkir tidak mengganggu jalan: -Tersebar lahan parkir hunian 100m2/RT -Tersebar lahan parkir hunian 400m2/RW -Luas lahan parkir hunian (bruto) = 3% x luas area yang dilayani atau 60mobil/1000KK *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 15, 36, 47	Aksesibilitas – kemudahan pencapaian yang tersedia bagi semua orang -Parkir di luar badan jalan -Jalan yang direncanakan/digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, akses penyelamatan dalam keadaan darurat, drainase lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
				-Penyelesaian sirkulasi dan karakter wajah jalan (streetscape) -Penyelesaian karakter wajah bangunan sepanjang jalan (façade) *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
			Perda 8 – 2007 Bab II Pasal 2, 6, 20, 21, 25, 36, 38	Dilarang: -Menggunakan trotoar tidak sesuai fungsi, merusak badan jalan, menempatkan benda pada tepi jalan -Memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan laying -Membangun, bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan laying, rel kereta api, jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum -Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan -Membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air Berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar dst -Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sungai, setu, waduk, danau, taman, jalur hijau dst -Wajib memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan dan trotoar -Dapat melaporkan kepada pemda perubahan alih fungsi, pengrusakan bahu jalan, trotoar tanpa izin *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
		Dampak		Pengukuran jalan lingkungan terkait dengan masalah (termasuk pembangunan & aktivitas) -Proteksi kebakaran -Pengelolaan sampah -Drainase lingkungan -Penyediaan air bersih -Pengelolaan air limbah				penentuan bersama DBM, SDA, LH, DAMKAR							

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENYEDIAAN AIR BERSIH		Perencanaan	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	Direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya serap tanah				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA PAM	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala kecil: Standar saluran, watertorent komunal, penyediaan air bersih *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala lingkungan: Reservoir komunal/waduk, penyediaan air bersih '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan dan perbaikan penyediaan air bersih skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
		Sistem	SNI 03-1733-2004, hal. 12, 51, 52	Setiap rumah -tidak berada di lokasi pada ambang batas pencemaran air permukaan dan tanah dalam -harus dilayani air bersih dan jaringan air limbah sesuai kebutuhan dan persyaratan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area tidak sesuai standar 25% - 50% area tidak sesuai standar						
			Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	-Fungsi RTH, fungsi utama (intrinsik), fungsi ekologis sebagai penyerap hujan -Fungsi lingkungan sabuk hijau sebagai RTH dengan pembatasan penggunaan lahan sehingga dapat mengatasi genangan hujan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai fungsi '51-75% tidak sesuai fungsi '25-50% tidak sesuai fungsi						
			Pergub 9-2022 Bab 3 Pasal 2, 5	Indeks Hijau Jakarta (IHJ) Sangat kurang ≤30 < IHJ Kurang ≤ 30 IHJ <50 Cukup ≤ 50 IHJ <70 Baik ≤70 IHJ <90 Sangat baik ≥90				76% - 100% area dengan indeks cukup - kurang 51% - 75% area dengan indeks cukup - kurang 25% - 50% area dengan indeks cukup - kurang						
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
	Akses aman air minum tidak tersedia	Kondisi	Permen PUPR 14-2018 PP 22 – 2021	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Baku mutu air sungai dan sejenis kelas 1: Air tidak berwarna, berbau, mempunyai rasa, ada endapan atau bahan pelarut; air memiliki suhu dan pH normal			5	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 1						
	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi		Permen PUPR 14-2018	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari			5	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 5 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 3 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 1						
			Perda 8 – 2007 Bab II Pasal 14, 22, 23	Dilarang: -Memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha -Merusak jaringan pipa air minum -Membalik arah meter air -Menyadap air minum -Menjual air minum persil lapangan -Mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum hidran -Mendistribusikan air minum dari hidran -Mengambil air permukaan dan tanah yang bersifat komersial -Perlu izin pemboran air tanah, pemakaian air tanah dan permukaan -Perlu izin tempat usaha berdasarkan UU Gangguan pada kegiatan usaha industri dan non-industry berdampak lingkungan –polusi suara, udara, air, rentan kebakaran, gangguan keamanan dan ketertiban *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area melanggar peraturan 51% - 75% area melanggar peraturan 25% - 50% area melanggar peraturan						
		Dampak	-	Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait air bersih				penentuan bersama Dinas Kesehatan							

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
DRAINASE LINGKUNGAN	-	Perencanaan	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	Direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya serap tanah				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan skala kecil: Standar saluran, drainase lingkungan *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	Pemeliharaan dan perbaikan drainase skala lingkungan: Reservoir komunal/waduk, perbaikan drainase lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan dan perbaikan drainase lingkungan skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Sistem	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	-Fungsi RTH, fungsi utama (intrinsik), fungsi ekologis sebagai penyerap hujan -Fungsi lingkungan sabuk hijau sebagai RTH dengan pembatasan penggunaan lahan sehingga dapat mengatasi genangan hujan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai fungsi '51-75% tidak sesuai fungsi '25-50% tidak sesuai fungsi						
			Pergub 9-2022 Bab 3 Pasal 2, 5	Indeks Hijau Jakarta (IHJ) Sangat kurang ≤30 < IHJ Kurang ≤ 30 IHJ <50 Cukup ≤ 50 IHJ <70 Baik ≤70 IHJ <90 Sangat baik ≥90				76% - 100% area dengan indeks cukup - kurang 51% - 75% area dengan indeks cukup - kurang 25% - 50% area dengan indeks cukup - kurang						
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
			SNI 03-1733-2004, hal. 39	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 'Lingkungan perumahan harus lengkap dengan jaringan drainase lingkungan kota sesuai ketentuan dan syarat teknis			5	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya = 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 25% - 50% area tidak tersedia = 3 drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya = 1						
			Permen PUPR 14-2018	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun			5	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2x setahun = 5 51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun = 3 25% - 50% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun =1						
	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kondisi	Perda 8 – 2007, Bab IV Pasal 13, 15, 16, 21	Dilarang -membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, usaha di atas saluran sungai & bantaran, kawasan setu, waduk & danau -Memasang/menempatkan kabel/pipa di bawah/melintas saluran sungai, kawasan setu, waduk & danau -Mengambil, memindahkan, merusak tutup got, selokan atau saluran lain -Membuang limbah B3 ke saluran permukiman, sungai, dan laut sebatas 12 mil -Membuang air besar & kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area melanggar peraturan 51% - 75% area melanggar peraturan 25% - 50% area melanggar peraturan						
			SNI 03-1733-2004, hal. 39	Jaringan drainase adl. Prasarana untuk mengalirkan air permukaan ke badan penerima air/bangunan resapan				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area melanggar standar 25% - 50% area melanggar standar						
			Permen PUPR 14-2018	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan			5	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 5 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 3 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 1						
			SNI 03-6981-2004, hal. 38	Saluran pembuangan air hujan tertutup atau terbuka dengan -Kemiringan saluran minim 2% -Dilengkapi lubang pemeriksa berjarak maksimal 50 meter *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area tidak sesuai standar 25% - 50% area tidak sesuai standar						
		Dampak	-	Pengukuran masalah banjir dan ketersediaan drainase & penyerapan air hujan				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
			-	Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait drainase lingkungan				penentuan bersama Dinas Kesehatan						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENGELOLAAN AIR LIMBAH		Perencanaan	SNI 03-1733-2004, hal. 41	Jenis elemen perencanaan jaringan air limbah lingkungan perumahan kota: Tangki septik, bidang resapan, jaringan pemipaan air limbah				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan air limbah skala lingkungan: IPLT *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	-Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan air limbah skala lingkungan: IPLT '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan air limbah skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
				Apabila tidak ada dan tidak mungkin membuat tangki septik, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan system pembuangan air limbah lingkungan yang disambung dengan sistem pembuangan air limbah kota dan pengelolaannya											
				Apabila tidak ada dan tidak mungkin membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama											
	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Sistem	Permen PUPR 14-2018 Pergub 41-2016 Bagian III Pasal 8 Pergub 41-2016 Bagian III Pasal 8	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai kententuan dan persyaratan teknis 'Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat: -Modifikasi tangki septik konvensional menjadi pengelola *black & grey water* dengan penyedotan lumpur, atau '-Pembangunan IPAL komunal, atau '-Integrasi pengolahan lumpur tinja dari fasilitas setempat dg IPAL seluruh zona sistem pengelolaan terpusat			5	'76%-100% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 5 51%-75% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 3 25%-50% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 1						
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat ***Indikator ini rancu antara sapras atau sistem***			5	76%-100% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 5 51%-75% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 3 25%-50% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 1						
			Permen PUPR 2-2020, hal. 15 Permen PUPR 20-2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, SNI 7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing	Sistem sanitasi gedung sesuai standar: -Kloset, -keran air, -pancuran air/bak penampung *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76%-100% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan 51%-75% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan 25%-50% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan						
			SNI 2398-2017	Jarak min. sumur/bidang resapan dg '-Rumah 1,50 m '-Sumur air bersih 10m '-Sumur resapan air hujan 5m *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
				Volume, material, dan sistem sesuai standar *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
		Dampak		Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait air limbah				penentuan bersama Dinas Kesehatan							

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENGELOLAAN SAMPAH		Perencanaan	-	-				-	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DLH	KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Dinkes, Dinsos, DPRKP, DPPAPP (bersama Dasawisma) relawan, bank sampah, RT, RW, LMK, Dasawisma, Satpol PP, Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan sampah skala rumah tangga *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	Pemeliharaan dan perbaikan pengelolaan sampah skala lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan & perbaikan pengelolaan sampah skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Sapras persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Sistem	Permen PUPR 14-2018	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: -tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; -tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; -sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan -tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 5 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 3 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 1						
	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis			Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: -pewadahan dan pemilahan domestik; -pengumpulan lingkungan; -pengangkutan lingkungan; -pengolahan lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 5 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 3 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 1						
			Pergub 77-2020, Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, 4, Bab IV Pasal 9, dst	-Samtama – sampah tanggung jawab bersama – pengelolaan lingkup RW melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat dengan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah rumah tangga -Ruang lingkup pengelolaan sampah dilakukan Bid. Pengelolaan Sampah lingkup RW: Pengurangan & penanganan sampah -Pengurangan sampah: Pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali sampah -Pengurangan sampah melalui bank sampah dan kegiatan Samtama *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan						
				Salah satu tugas Bid. Pengelola Sampah lingkup RW: -Memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar -Melaporkan tumpukan sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial & umum untuk dilakukan pembersihan -Melaporkan pelaku penumpukan sampah, pembuangan sampah liar, dan pembakaran sampah terbuka disertai bukti pendukung *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
			SNI 324-2008	Sistem pengelolaan persampahan: Wadah & pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan lingkungan										
		Kondisi	-	-				-							
		Dampak		-Pengukuran volume sampah dengan daya tampung dan kelola skala lingkungan, kota, regional -Pengukuran masalah drainase lingkungan tekait pengelolaan sampah -Pengukuran masalah ketersediaan air bersih terkait dengan pengelolaan sampah -Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait pengelolaan sampah *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				penentuan bersama Dinas SDA, LH, Kesehatan						
		Dampak		-Pengukuran volume sampah dengan daya tampung dan kelola skala lingkungan, kota, regional -Pengukuran masalah drainase lingkungan tekait pengelolaan sampah -Pengukuran masalah ketersediaan air bersih terkait dengan pengelolaan sampah -Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait pengelolaan sampah *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				penentuan bersama Dinas SDA, LH, Kesehatan						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PROTEKSI KEBAKARAN		Perencanaan	SNI – 03 1735-1993	Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada bangunan Rumah dan Gedung				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DAMKAR	DPRKP, SDA, DBM, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi) relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Kelurahan, Kecamatan	Pemeliharaan dan perbaikan proteksi kebakaran skala kecil: Sistem hidran pasif setempat, watertorent komunal *diharapkan dilakukan mandiri oleh masyarakat lihat PEMBANGUNAN FISIK - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*	Pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi Kebakaran skala lingkungan '-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	Pemeliharaan dan perbaikan sistem proteksi Kebakaran skala kota '-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	* bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
			Permen PUPR 14-2018 Pergub 31-2022 SNI 03-1733-2004	Tidak tersedia proteksi kebakaran pada lokasi: -pasokan air; -jalan lingkungan; -sarana komunikasi; dan/atau -data sistem proteksi kebakaran lingkungan Hidran kebakaran: -jarak interval perletakan 200m -terhubung dengan jaringan pipa air minum -lokasi & jumlah hidran sesuai kepadatan bangunan '-Jarak hidran – tepi jalan min. 3m -Bila tidak mungkin kran hidran, harus buat sumur kebakaran *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 1						
	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Sistem	SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR							
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: -alat Pemadam Api Ringan (APAR); atau -kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau -mobil tangga sesuai kebutuhan			5	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 5 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 3 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 1							
			SNI 03-1745-1989	Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan							
			Permen PUPR 21-2021	Direkomendasikan: Gedung kelas 1 – hunian biasa, satu rumah tunggal, satu atau lebih rumah gandeng – dipisahkan dinding tahan api											
			Pergub 31-2022	Pemanfaat ruang dilengkapi fasilitas & peralatan sarana keselamatan kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, banjir											
		Dampak	-	Pengukuran masalah dan dampak kebakaran				penentuan bersama DAMKAR							
						TOTAL Nilai	**80**								

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
KEPADATAN PENDUDUK		Perencanaan	-	-				-	Untuk metropolitan& kota besar -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha = 5 atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil -Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha = 5 -Kepadatan penduduk pada observasi Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha = 3 -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha = 1	Dukcapil	DPPAPP (besama Dasawisma), DPRKP, Dinsos, Dinkes relawan, RT, RW, LMK, Dasawisma, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan	Pemilik kos, rumah kontrakan, unit sewa melapor kepada RT & Lurah secara periodik Perda 8-2018 Ketertiban Umum	-Neighborhood watch, random check –pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	-Neighborhood watch, random check – pelaporan & sanksi + manajemen keuangan	*Kependudukan menjadi pertimbangan tapi penilaian dilakukan di pemberdayaan masyarakat
		Sistem	Pergub 135-2019 Pergub 31-2022	tidak sesuai KDB, KLB, KDH, RDTR, PL				76-100% tidak sesuai peraturan '51-75% tidak sesuai peraturan '25-50% tidak sesuai peraturan							
	Kependudukan*	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;				Untuk metropolitan& kota besar -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha = 5 atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil -Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha = 5 -Kepadatan penduduk pada observasi Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha = 3 -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha = 1						
			SNI 03-1733-2004, hal. 20	≥ 9,6m2/dewasa ≥ 36m2/KK (4 anggota)				76-100% tidak sesuai standar '51-75% tidak sesuai standar '25-50% tidak sesuai standar							
		Dampak	-	-				-							

Prosentase	Nilai*	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
76-100% tidak memenuhi/sesuai	5	Kumuh Berat	Binaan	PKP atau CK Pemeliharaan**	PKP Pembangunan CK Pemeliharaan	mulai dari JPEN (1-3 tahun)	lanjut JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
51-75% tidak memenuhi/sesuai	3	Kumuh Sedang	Sadar & Aktif	PKP atau CK Pemeliharaan**	PKP Pembangunan CK Pemeliharaan	mulai dari JPEN (1-3 tahun)	lanjut JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
25-50% tidak memenuhi/sesuai	1	Kumuh Ringan	Berdaya Kolaboratif	PKP atau CK Pemeliharaan**	PKP Pembangunan CK Pemeliharaan		mulai JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
0-24% tidak memenuhi/sesuai	0-1	Tidak Kumuh	Berdaya Berkelanjutan	CK	Perbaikan/Pemeliharaan			mulai JPAN (> 5 tahun)

* Penilaian hanya dilakukan untuk lajur berwarna putih. Lajur abu-abu adalah penambahan nilai yang dapat dipertimbangkan DPRKP untuk mendapatkan penilaian yang lebih detil
** CK Pemeliharaan dilakukan pada area/lokasi yang telah mendapatkan PKP namun masih dalam posisi kumuh

Total Nilai	Kategori
60-80	Kumuh Berat
38-59	Kumuh Sedang
16-37	Kumuh Ringan
0-16	Tidak Kumuh

Tabel 3.5 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Nilai Komunitas & Kepadatan Penduduk (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
BANGUNAN GEDUNG		Perencanaan	Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	-Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung -Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung -Sertifikat Layak Fungsi -Persetujuan Bangunan Gedung *Yang terdiri dari (lihat di bawah)*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DPRKP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan, asosiasi.	**Penyemaian pengetahuan bangunan gedung hunian yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara hunian	**Penerimaan atas nilai bangunan gedung hunian yang layak:** -Hunian terdampak oleh dan berdampak terhadap lingkungan -Hunian perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Hunian butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	**Pemahaman atas nilai bangunan gedung hunian yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
		Sistem	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019, Kementerian LHK	-Indeks Kualitas Udara-IKU (parameter SO2 & NO2) -Indeks Kualitas Air-IKA (TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, total coliform)				penentuan bersama Dinas SDA, LH, Kesehatan							
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	-Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung -Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung -Sertifikat Layak Fungsi -Persetujuan Bangunan Gedung **A. Persyaratan administrasi:** Status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, IMB **B. Persyaratan teknis:** **'B1. Persyaratan tata bangunan** -Peruntukan -Intensitas -Arsitektur -Pengendalian dampak *Yang terdiri dari (lihat di bawah)* **B2. Persyaratan keandalan gedung** -Keselamatan -Kesehatan -Keamanan -Kenyamanan *Yang terdiri dari (lihat di bawah)* *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan			'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, Sosial, Kesehatan	'**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	'**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	'**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	**B. Persyaratan teknis:** **B1. Persyaratan tata bangunan** **-Peruntukan** – fungsi tidak sesuai peruntukan RTRW, RDTR RTBL											
	Ketidakteraturan bangunan		Permen PUPR 14-2018	-Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau -Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan = 1							
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227	**-Intensitas** – kepadatan (KDB), ketinggian (KLB), jarak bebas (GSB, GSJ, GSS, GSP, GSSDEW, GSKA) *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan							

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
BANGUNAN GEDUNG	Tingkat kepadatan bangunan	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	-KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; -KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau -Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: --untuk kota metropolitan dan kota besar>250 unit/Ha --untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 5 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 3 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan = 1	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DPRKP	DPPAPP (bersama Dasawisma), DSDA, DBM, DAMKAR, DLH, Dinsos, Dinkes, KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kelurahan, Puskesmas, Kecamatan, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan, asosiasi.	**Penyemaian pengetahuan bangunan gedung hunian yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara hunian	**Penerimaan atas nilai bangunan gedung hunian yang layak**: -Hunian terdampak oleh dan berdampak terhadap lingkungan -Hunian perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Hunian butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	**Pemahaman atas nilai bangunan gedung hunian yang layak**: (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
			Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227 + Permen PUPR 14-2018	**-Arsitektur** – penampilan; tata ruang dalam; keseimbangan, keserasian, keselarasan dengan lingkungan **-Pengendalian dampak lingkungan** *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan						
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		Permen PUPR 27-2018; Pergub 31-2022 Pasal 97, 106, 107, 227 + Permen PUPR 14-2018	**B2. Persyaratan keandalan bangunan gedung** **-Keselamatan** – struktur, bahaya kebakaran, penangkal petir, keamanan & keandalan instalasi listrik, bencana bahan peledak **-Kesehatan** – penghawaan, pencahayaan, sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, sistem pembuangan kotoran & sampah, sistem penyaluran air hujan, penggunaan bahan bangunan **-Kenyamanan** – ruang gerak, kondisi udara dalam ruang, pandangan, getaran & kebisingan **-Kemudahan** – hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; kelengkapan sapras pemanfaatan bangunan gedung; hu bungan horisontal dan vertical serta sarana evakuasi *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 5 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 3 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis = 1						
			Pergub 135-2019	**-Pemecahan/penggabungan lahan perencanaan hunian** dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan batas luas pada sub zona yang diatur dalam RDTR & PZ kecuali pada kawasan petak/kavling yang sudah ditetapkan rencana kota dan pada kawasan pelestarian/caga budaya – 2.2.6. **-GSB pada pantai di pulau** (seperti Kep. Seribu) harus memenuhi ketentuan GSP yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ atau disesuaikan dengan kondisi pulau – 2.3.1.6.				76-100% tidak sesuai persyaratan '51-75% tidak sesuai persyaratan '25-50% tidak sesuai persyaratan			'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, Sosial, Kesehatan	'**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	'**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	'**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	
		Dampak		Pengukuran ketidakteraturan (ketidaklaikan) bangunan gedung terkait masalah kriteria lain: -Legalitas lahan -Kependudukan -Kebakaran -Pegelolaan sampah -Drainase lingkungan -Penyediaan air bersih -Pengelolaan air limbah -Jalan lingkungan				Penentuan bersama Dukcapil. DPPAPP, DBM, SDA, DLH, Dinkes, Dinsos						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
JALAN LINGKUNGAN		Perencanaan	-	-				-	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DBM	DPRKP, DSDA, DAMKAR, DLH, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan. ' sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan jalan lingkungan yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara jalan lingkungan '**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	**Penerimaan atas nilai pengelolaan jalan lingkungan yang layak layak:** -Pengelolaan jalan lingkungan terdampak oleh dan berdampak terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, kemudahan, kenyamanan huninan & lingkungan -Pengelolaan jalan lingkungan perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan jalan lingkungan butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak '**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	**Pemahaman atas nilai pengelolaan jalan lingkungan yang layak terintegrasi:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program* '**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sistem	Permen PUPR 14-2018	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis			5	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 5 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 3 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan = 1						
	Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Kondisi		Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman			5	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 5 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 3 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk = 1						
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 15, 36, 47	Jalan lingkungan L ±4m atau Jalan lokal sekunder L ±3-7m atau Jalan lokal sekunder II & III L ±3-6m atau Jalan lingkungan I L ±1,5-2,0m atau Jalan lingkungan II L ±1,2 m atau Jalur pedestarian L ±1,5m				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan						
				Jalan memiliki perlengkapan & fasilitas Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) Bahu jalan, badan jalan Kemiringan lereng 0%-15% *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 50	Parkir tidak mengganggu jalan: -Tersebar lahan parkir hunian 100m2/RT -Tersebar lahan parkir hunian 400m2/RW -Luas lahan parkir hunian (bruto) = 3% x luas area yang dilayani atau 60mobil/1000KK *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
			SNI 03-1733-2004, hal. 8, 15, 36, 47	Aksesibilitas – kemudahan pencapaian yang tersedia bagi semua orang -Parkir di luar badan jalan -Jalan yang direncanakan/digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, akses penyelamatan dalam keadaan darurat, drainase lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
				-Penyelesaian sirkulasi dan karakter wajah jalan (streetscape) -Penyelesaian karakter wajah bangunan sepanjang jalan (façade) *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
			Perda 8 – 2007 Bab II Pasal 2, 6, 20, 21, 25, 36, 38	Dilarang: -Menggunakan trotoar tidak sesuai fungsi, merusak badan jalan, menempatkan benda pada tepi jalan -Memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan laying -Membangun, bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan laying, rel kereta api, jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum -Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan -Membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air Berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar dst -Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sungai, setu, waduk, danau, taman, jalur hijau dst -Wajib memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan dan trotoar -Dapat melaporkan kepada pemda perubahan alih fungsi, pengrusakan bahu jalan, trotoar tanpa izin *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
		Dampak		Pengukuran jalan lingkungan terkait dengan masalah (termasuk pembangunan & aktivitas) -Proteksi kebakaran -Pengelolaan sampah -Drainase lingkungan -Penyediaan air bersih -Pengelolaan air limbah				penentuan bersama DBM, SDA, LH, DAMKAR						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENYEDIAAN AIR BERSIH		Perencanaan	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	Direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya serap tanah				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA PAM	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma. 'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	**Penyemaian pengetahuan tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke air permukaan & air tanah -Warga perlu membangun & memelihara tata kelola penyediaan air bersih '**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	**Penerimaan atas nilai tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** -Penyediaan air bersih terdampak oleh dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan -Penyediaan air bersih perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Penyediaan air bersih butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem tata kelola yang layak **Aksi** '= Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	**Pemahaman atas nilai tata kelola penyediaan air bersih yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program* '**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
		Sistem	SNI 03-1733-2004, hal. 12, 51, 52	Setiap rumah -tidak berada di lokasi pada ambang batas pencemaran air permukaan dan tanah dalam -harus dilayani air bersih dan jaringan air limbah sesuai kebutuhan dan persyaratan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area tidak sesuai standar 25% - 50% area tidak sesuai standar						
			Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	-Fungsi RTH, fungsi utama (intrinsik), fungsi ekologis sebagai penyerap hujan -Fungsi lingkungan sabuk hijau sebagai RTH dengan pembatasan penggunaan lahan sehingga dapat mengatasi genangan hujan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai fungsi '51-75% tidak sesuai fungsi '25-50% tidak sesuai fungsi						
			Pergub 9-2022 Bab 3 Pasal 2, 5	Indeks Hijau Jakarta (IHJ) Sangat kurang ≤30 < IHJ Kurang ≤ 30 IHJ <50 Cukup ≤ 50 IHJ <70 Baik ≤70 IHJ <90 Sangat baik ≥90				76% - 100% area dengan indeks cukup - kurang 51% - 75% area dengan indeks cukup - kurang 25% - 50% area dengan indeks cukup - kurang						
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
	Akses aman air minum tidak tersedia	Kondisi	Permen PUPR 14-2018 PP 22 – 2021	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Baku mutu air sungai dan sejenis kelas 1: Air tidak berwarna, berbau, mempunyai rasa, ada endapan atau bahan pelarut; air memiliki suhu dan pH normal			5	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 5 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 3 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman = 1						
	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi		Permen PUPR 14-2018	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari			5	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 5 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 3 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya = 1						
			Perda 8 – 2007 Bab II Pasal 14, 22, 23	Dilarang: -Memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha -Merusak jaringan pipa air minum -Membalik arah meter air -Menyadap air minum -Menjual air minum persil lapangan -Mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum hidran -Mendistribusikan air minum dari hidran -Mengambil air permukaan dan tanah yang bersifat komersial -Perlu izin pemboran air tanah, pemakaian air tanah dan permukaan -Perlu izin tempat usaha berdasarkan UU Gangguan pada kegiatan usaha industri dan non-industry berdampak lingkungan –polusi suara, udara, air, rentan kebakaran, gangguan keamanan dan ketertiban *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area melanggar peraturan 51% - 75% area melanggar peraturan 25% - 50% area melanggar peraturan						
		Dampak	-	Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait air bersih				penentuan bersama Dinas Kesehatan						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
DRAINASE LINGKUNGAN	-	Perencanaan	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	Direncanakan berdasarkan curah hujan 5 tahunan dan daya serap tanah				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma. 'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke drainase lingkungan -Warga perlu membangun & memelihara drainase lingkungan '**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	**Penerimaan atas nilai pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** -Drainase terdampak oleh dan berdampak pada lingkungan dan kesehatan -Drainase lingkungan perlu layak sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Drainase lingkungan butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan layak '**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	**Pemahaman atas nilai pengelolaan drainase lingkungan yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program '**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Sistem	Permen PUPR 05-2008 hal. 5, 16	-Fungsi RTH, fungsi utama (intrinsik), fungsi ekologis sebagai penyerap hujan -Fungsi lingkungan sabuk hijau sebagai RTH dengan pembatasan penggunaan lahan sehingga dapat mengatasi genangan hujan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai fungsi '51-75% tidak sesuai fungsi '25-50% tidak sesuai fungsi						
			Pergub 9-2022 Bab 3 Pasal 2, 5	Indeks Hijau Jakarta (IHJ) Sangat kurang ≤30 < IHJ Kurang ≤ 30 IHJ <50 Cukup ≤ 50 IHJ <70 Baik ≤70 IHJ <90 Sangat baik ≥90				76% - 100% area dengan indeks cukup - kurang 51% - 75% area dengan indeks cukup - kurang 25% - 50% area dengan indeks cukup - kurang						
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
			SNI 03-1733-2004, hal. 39	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan 'Lingkungan perumahan harus lengkap dengan jaringan drainase lingkungan kota sesuai ketentuan dan syarat teknis			5	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya = 5 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya = 3 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya = 1						
			Permen PUPR 14-2018	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun			5	76% - 100% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2x setahun = 5 51% - 75% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun = 3 25% - 50% area terjadi genangan >30 cm, >2 jam dan >2 x setahun =1						
	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kondisi	Perda 8 – 2007, Bab IV Pasal 13, 15, 16, 21	Dilarang -membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, usaha di atas saluran sungai & bantaran, kawasan setu, waduk & danau -Memasang/menempatkan kabel/pipa di bawah/melintas saluran sungai, kawasan setu, waduk & danau -Mengambil, memindahkan, merusak tutup got, selokan atau saluran lain -Membuang limbah B3 ke saluran permukiman, sungai, dan laut sebatas 12 mil -Membuang air besar & kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area melanggar peraturan 51% - 75% area melanggar peraturan 25% - 50% area melanggar peraturan						
			SNI 03-1733-2004, hal. 39	Jaringan drainase adl. Prasarana untuk mengalirkan air permukaan ke badan penerima air/bangunan resapan				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area melanggar standar 25% - 50% area melanggar standar						
			Permen PUPR 14-2018	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan			5	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 5 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 3 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk = 1						
			SNI 03-6981-2004, hal. 38	Saluran pembuangan air hujan tertutup atau terbuka dengan -Kemiringan saluran minim 2% -Dilengkapi lubang pemeriksa berjarak maksimal 50 meter *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76% - 100% area tidak sesuai standar 51% - 75% area tidak sesuai standar 25% - 50% area tidak sesuai standar						
		Dampak	-	Pengukuran masalah banjir dan ketersediaan drainase & penyerapan air hujan				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR						
			-	Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait drainase lingkungan				penentuan bersama Dinas Kesehatan						

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENGELOLAAN AIR LIMBAH	-	Perencanaan	SNI 03-1733-2004, hal. 41	-Jenis elemen perencanaan jaringan air limbah lingkungan perumahan kota: Tangki septik, bidang resapan, jaringan pemipaan air limbah -Apabila tidak ada dan tidak mungkin membuat tangki septik, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan system pembuangan air limbah lingkungan yang disambung dengan sistem pembuangan air limbah kota dan pengelolaannya -Apabila tidak ada dan tidak mungkin membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang resapan bersama *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DSDA	DPRKP, DBM, DLH, Dinkes, Dinsos, DPPAPP (beserta Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Satpol PP, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma	**Penyemaian pengetahuan pengelolaan air limbah yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga tidak membuang air limbah ke air permukaan dan air tanah -Warga perlu membangun & memelihara pengelolaan air limbah individu/komunal	**Penerimaan atas nilai pengelolaan air limbah yang layak terintegrasi:** -Pengelolaan air limbahterdampak oleh dan berdampak pada lingkungan & kesehatan -Pengelolaan air limbah perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan air limbah butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	**Pemahaman atas nilai pengelolaan air limbah yang layak terintegrasi:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program*	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Sistem	Permen PUPR 14-2018 Pergub 41-2016 Bagian III Pasal 8 Pergub 41-2016 Bagian III Pasal 8	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan air limbah sesuai kententuan dan persyaratan teknis 'Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat: -Modifikasi tangki septik konvensional menjadi pengelola *black* & *grey water* dengan penyedotan lumpur, atau '-Pembangunan IPAL komunal, atau '-Integrasi pengolahan lumpur tinja dari fasilitas setempat dg IPAL seluruh zona sistem pengelolaan terpusat			5	'76%-100% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 5 51%-75% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 3 25%-50% area tidak memiliki sistem sesuai standar = 1							
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR							
	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat ***Indikator ini rancu antara sarana (kondisi unit) atau prasarana (sebagai sistem)***			5	76%-100% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 5 51%-75% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 3 25%-50% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan = 1			'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR, LHK, Kesehatan, Sosial	'**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	'**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	'**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	
			Permen PUPR 2-2020, hal. 15 Permen PUPR 20-2006 Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, SNI 7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing	Sanitasi gedung sesuai standar: -Kloset, -keran air, -pancuran air/bak penampung *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76%-100% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan 51%-75% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan 25%-50% area tidak memiliki saprasarana sesuai persyaratan							
			SNI 2398-2017	Jarak min. sumur/bidang resapan dg '-Rumah 1,50 m '-Sumur air bersih 10m '-Sumur resapan air hujan 5m -Volume material, dan sistem sesuai standar *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*										
		Dampak		Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait air limbah				penentuan bersama Dinas Kesehatan							

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PENGELOLAAN SAMPAH		Perencanaan	-	-				-	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DLH	Dinkes, Dinsos, DPRKP, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Satpol PP, RT, RW, LMK, Dasawisma, Bank Sampah, Relawan. 'sama dengan di atas ditambah Kementerian LHK, Kesehatan, Sosial, PUPR	**Penyemaian pengetahuan warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara pengelolaan sampah '**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	**Penerimaan atas nilai warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** -Pengelolaan sampah berdampak terhadap lingkungan & kesehatan -Pengelolaan sampah perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Pengelolaan sampah butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak '**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	**Pemahaman atas nilai warga bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri dan pengelolaan sampah yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program* '**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Sapras persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Sistem	Permen PUPR 14-2018	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: -tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; -tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; -sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan -tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 5 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 3 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis = 1					
	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis			Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: -pewadahan dan pemilahan domestik; -pengumpulan lingkungan; -pengangkutan lingkungan; -pengolahan lingkungan *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 5 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 3 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar = 1					
			Pergub 77-2020, Bab I Pasal 1, Bab II Pasal 3, 4, Bab IV Pasal 9, dst	-Samtama – sampah tanggung jawab bersama – pengelolaan lingkup RW melalui kemandirian dan partisipasi masyarakat dengan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah rumah tangga -Ruang lingkup pengelolaan sampah dilakukan Bid. Pengelolaan Sampah lingkup RW: Pengurangan & penanganan sampah -Pengurangan sampah: Pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali sampah -Pengurangan sampah melalui bank sampah dan kegiatan Samtama *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan					
				Salah satu tugas Bid. Pengelola Sampah lingkup RW: -Memastikan kebersihan lingkungan dan tidak ada buangan sampah liar -Melaporkan tumpukan sampah di badan air, selokan, laut, pesisir, fasilitas sosial & umum untuk dilakukan pembersihan -Melaporkan pelaku penumpukan sampah, pembuangan sampah liar, dan pembakaran sampah terbuka disertai bukti pendukung *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*									
			SNI 324-2008	Sistem pengelolaan persampahan: Wadah & pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan lingkungan										
		Kondisi	-	-				-							
		Dampak		-Pengukuran volume sampah dengan daya tampung dan kelola skala lingkungan, kota, regional -Pengukuran masalah drainase lingkungan tekait pengelolaan sampah -Pengukuran masalah ketersediaan air bersih terkait dengan pengelolaan sampah -Pengukuran masalah kesehatan masyarakat terkait pengelolaan sampah *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*				penentuan bersama Dinas SDA, LH, Kesehatan					

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) 51-100% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JMEN (3-5 tahun) 25-50% (CK Pemeliharaan) KRITERIA KEBERHASILAN	JPAN (> 5 tahun) 0-24% (CK) KRITERIA KEBERHASILAN	KET.
PROTEKSI KEBAKARAN		Perencanaan	SNI – 03 1735-1993	Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada bangunan Rumah dan Gedung				76-100% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '51-75% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar '25-50% tidak terencana dan/atau perencanaan tidak sesuai standar	-Nilai (%) 76-100% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 51-75% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** 25-50% tidak memenuhi/ sesuai masuk PKP atau **CK Pemeliharaan*** **0-24% tidak memenuhi/ sesuai masuk CK.**	DAMKAR	DPRKP, SDA, DBM, DPPAPP (bersama Dasawisma), KOMINFOTIK (satu informasi, satu narasi), Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan.	**Penyemaian pengetahuan proteksi kebakaran yang layak**: -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & memelihara proteksi kebakaran	**Penerimaan atas nilai proteksi kebakaran yang layak layak:** -Proteksi kebakaran terdampak oleh dan berdampak pada keselamatan individu dan lingkungan -Proteksi kebakaran perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Proteksi kebakaran butuh pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak	**Pemahaman atas nilai proteksi kebakaran yang layak:** (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program	*bila status adalah pemeliharaan setelah PKP, maka masuk CK (lihat bagan posisi CK pada Bab 1)
	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Sistem	Permen PUPR 14-2018 Pergub 31-2022 SNI 03-1733-2004	Tidak tersedia proteksi kebakaran pada lokasi: -pasokan air; -jalan lingkungan; -sarana komunikasi; dan/atau -data sistem proteksi kebakaran lingkungan Hidran kebakaran: -jarak interval perletakan 200m -terhubung dengan jaringan pipa air minum -lokasi & jumlah hidran sesuai kepadatan bangunan '-Jarak hidran – tepi jalan min. 3m -Bila tidak mungkin kran hidran, harus buat sumur kebakaran *apabila salah satu tidak sesuai maka seluruh indikator ini terhitung tidak sesuai*			5	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 5 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 3 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran = 1				'**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	'**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	'**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	
			SNI 19-6728.1-2002, hal. 5, 10	Pengukuran sumber daya (neraca) air spasial: cadangan/aktiva, pemanfaatan/pasif, dan saldo				penentuan bersama Dinas SDA, LH, DAMKAR			'sama dengan di atas ditambah Kementerian PUPR				
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: -alat Pemadam Api Ringan (APAR); atau -kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau -mobil tangga sesuai kebutuhan			5	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 5 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 3 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran = 1							
			SNI 03-1745-1989	Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung				76-100% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '51-75% tidak sesuai standar dan/atau peraturan '25-50% tidak sesuai standar dan/atau peraturan							
			Permen PUPR 21-2021	Direkomendasikan: Gedung kelas 1 – hunian biasa, satu rumah tunggal, satu atau lebih rumah gandeng – dipisahkan dinding tahan api											
			Pergub 31-2022	Pemanfaat ruang dilengkapi fasilitas & peralatan sarana keselamatan kondisi darurat seperti kebakaran, gempa, banjir											
		Dampak	-	Pengukuran masalah dan dampak kebakaran				penentuan bersama DAMKAR							
						TOTAL Nilai NK/16	**80/16 = 5**								

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KET. PENGUKURAN TENTANG	DASAR PERATURAN/ STANDAR	INDIKATOR (per unit/RT/RW/area)	JUMLAH (%)	RATA-RATA (%)	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran) (%)	PENENTUAN PROKER (berdasarkan rata-rata presentase)	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) n=5 (CK Pemeliharaan)	JMEN (3-5 tahun) n=3 (CK Pemeliharaan)	JPAN (> 5 tahun) n=1 (CK)	KET.
												KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
KEPADATAN PENDUDUK		Perencanaan	-	-				-	Untuk metropolitan& kota besar -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha = 5 atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil -Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha = 5 -Kepadatan penduduk pada observasi Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha = 3 -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha = 1	Dukcapil	relawan, RT, RW, DPPAPP (besama Dasawisma), DPRKP, Dinsos, Dinkes, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, RT, RW, LMK, Dasawisma, relawan. 'sama dengan di atas ditambah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Sosial, Kesehatan, PUPR	**Penyemaian pengetahuan ruang hidup yang layak:** -Warga dan kepamongan memahami hasil Pengukuran & Analisis serta dampak bagi kesehatan masyarakat & hunian -Warga perlu membangun & menjaga ruang hidup '**Identifikasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras dengan tantangan lokus (seperti penyesuaian program dengan karakteristik area pesisir, bantaran sungai, perumahan padat) dan terkait dengan rencana regional/nasional	**Penerimaan nilai ruang hidup yang layak:** -Ruang hidup terdampak oleh kepadatan penduduk -Ruang hidup berdampak terhadap kelayakan hunian & lingkungan -Ruang hidup perlu layak (sesuai standar, peraturan, terintegrasi) -Ruang hidup yang layak butuh perencanaan, pembangunan, pemeliharaan (mandiri, komunal) '-Neighborhood watch, random check, pelaporan & sanksi + manajemen keuangan merupakan bagian sistem pengelolaan yang layak '= Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction) '**Aksi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras kemenarikan berkelanjutan (sustainable attraction)	**Pemahaman atas nilai ruang hidup yang layak**: (lihat poin penjelasan pada kolom Kriteria Keberhasilan JMEN) *Setelah 5 tahun, dilakukan pemutakhiran program* '**Integrasi** = Nilai Strategis Komunitas yang selaras elemen hunian manusia (human settlement) terintegratif	
	Kependudukan	Kondisi	Permen PUPR 14-2018	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;			5	Untuk metropolitan& kota besar -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha = 5 atau Untuk Kota Sedang & Kota Kecil -Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha = 5 -Kepadatan penduduk pada observasi Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha = 3 -Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha = 1						
			SNI 03-1733-2004, hal. 20	≥ 9,6m2/dewasa ≥ 36m2/KK (4 anggota)				76-100% tidak sesuai standar '51-75% tidak sesuai standar '25-50% tidak sesuai standar							
		Dampak	-	-				-							
						TOTAL Nilai KP	**5**								

Prosentase	Nilai*	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
76-100% tidak memenuhi/sesuai	5	Rendah	Binaan	PKP atau CK Pemeliharaan**	Penyemaian	mulai dari JPEN (1-3 tahun)	lanjut JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
51-75% tidak memenuhi/sesuai	3	Sedang	Sadar & Aktif	PKP atau CK Pemeliharaan**	Penyemaian	mulai dari JPEN (1-3 tahun)	lanjut JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
25-50% tidak memenuhi/sesuai	1	Tinggi	Berdaya Kolaboratif	PKP atau CK Pemeliharaan**	Penerimaan		mulai JMEN (3-5 tahun)	lanjut JPAN (> 5 tahun)
0-24% tidak memenuhi/sesuai	0-1	Tinggi	Berdaya Berkelanjutan	CK	Pemahaman			mulai JPAN (> 5 tahun)

* Penilaian hanya dilakukan untuk lajur berwarna putih. Lajur abu-abu adalah penambahan nilai yang dapat dipertimbangkan DPRKP untuk mendapatkan penilaian yang lebih detil
** CK Pemeliharaan dilakukan pada area/lokasi yang telah mendapatkan PKP namun masih dalam posisi kumuh

Total Nilai (NK + KP + PKM)	Kategori
11-15	Rendah
6-10	Sedang
1-5	Tinggi

Tabel 3.6 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Sosial Budaya Masyarakat - Psikologi Komunitas (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) (n=1)	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
												KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
PERTIMBANGAN LAIN	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pembangunan Kapasitas Manusia: Psikologi Komunitas	Permukiman Binaan	Memperbaiki persepsi Masyarakat tentang lingkungan,kesehatan, kesejahteraan & pelayanan publik	UU No.1/2011 Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 Permen PUPR No.12/2020 SE DJCK No.30/SE/DC/2020 SE DJCK No.39/SE/DC/2020	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; dan 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	Identifikasi & Pemeriksaan 1. Indikator Tujuan (IT) (kebahagiaan): **skor < 60** --> Pemeriksaan indikator prasyarat IP (Jika skor > 60 Intervensi di bidang psikologi komunitas tidak diperlukan) 2. Indikator Prasyarat (IP) (relasi dengan pemerintah): **skor < 27 (nilai 5)** Implementasi program & pemeriksaan indikator prasyarat (IP) --> masuk kategori permukiman binaan 3. Pemeriksaan kembali setelah 6 bulan proses advokasi dan pemberdayaan masyarakat: o Indikator Prasyarat (IP) target skor > 27	5	(n=5) Lokasi tidak memiliki potensi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara.	Pengarah Pokja PKP: • Sekretaris Daerah DKI. • Deputi Gub. DKI Jakarta Bid. Pengendalian Kependudukan & Permukiman. Ketua Pokja PKP: • Asisten Sekda Bid. PLH DKI. Ketua Pelaksana Harian Pokja PKP: • Kepala BAPPEDA DKI. Ketua Bid. Kelembagaan & Kemitraan: Ka. Biro Kerjasama Daerah Setda DKI	• Internal PD Pemprov DKI: DPPAPP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DLH (Dinas Lingkungan Hidup), DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat	Peningkatan kualitas: • Relasi dengan pemerintah, dan • Relasi dengan diri sendiri untuk membangun kesadaran masyarakat (*awareness*)			
			Permukiman Sadar Aktif	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam program-program.			Identifikasi & Pemeriksaan 1. Indikator Prasyarat (IP) (relasi dengan pemerintah): **skor > 27 (nilai 2)** Implementasi program & pemeriksaan Indikator Cara (IC) "warga berpartisipasi" --> masuk kategori permukiman sadar & aktif 2. Indikator Cara (IC) Pemenuhan relasional: Implementasi program pemenuhan relasional - Membangun cara relasi diri, keluarga, komunitas, lingkungan & nilai budaya - penilaian kualitatif **(nilai 1)**. 3. Pemeriksaan Kembali setelah 6 bulan proses pemberdayaan masyarakat: o Indikator Cara (IC) mulai menguatnya relasi dengan komunitas dengan indikasi **terbentuknya komunitas masyarakat (nilai 1).**	3-4	(nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara.			Peningkatan kualitas: • Relasi dengan diri sendiri, • Relasi dengan keluarga, • Relasi dengan lingkungan sekitar untuk membuat/mengajak masyarakat berpartisipasi secara sadar dan aktif (*belongingness*)		
			Permukiman Kolaboratif Berdaya	Meningkatan aksi Masyarakat & *stakeholders* (elemen masyarakat) dalam peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi.			Identifikasi & Pemeriksaan: '1. Indikator Cara (IC) Pemenuhan relasional: Implementasi program pemenuhan relasional - Membangun cara relasi diri, keluarga, komunitas, lingkungan & nilai budaya - penilaian kualitatif. 2. Pemeriksaan Kembali setiap tahun dan di titik akhir setelah 5 tahun program pemberdayaan masyarakat: o Indikator Tujuan (IT) **skor = 60 (nilai 1)** o Indikator Prasyarat (IP) **skor > 40 (80%) (nilai 1)** o Indikator Cara (IC) **mulai menguatnya nilai budaya dengan indikasi terbentuknya komunitas budaya (nilai 1)**.	2-3	(nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara.				Peningkatan kualitas: • Relasi dengan diri sendiri, • Relasi dengan keluarga, • Relasi dengan lingkungan sekitar untuk mendorong keberdayaan masyarakat melalui penguatan jejaring kolaborasi (*competence*)	
			Permukiman Berdaya Berkelanjutan	Mewujudkan otonomi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan melakukan inisiatif kerja sama atau berkolaborasi dengan berbagai lembaga.			Identifikasi & Pemeriksaan: '1. Indikator Cara (IC) Pemenuhan relasional: Implementasi program pemenuhan relasional - Membangun cara relasi diri, keluarga, komunitas, lingkungan & nilai budaya - penilaian kualitatif. 2. Pemeriksaan Kembali setiap tahun dan di titik akhir setelah 5 tahun program pemberdayaan masyarakat: o Indikator Tujuan (IT) **skor > = 80 (nilai 0)** o Indikator Cara (IC) menunjukkan **nilai budaya pada kelompok masyakarat dengan indikasi adanya program kegiatan yang dilakukan oleh warga secara berkala (nilai 1)**.	1	(n=1) Lokasi memiliki potensi tinggi sosial dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara.					Peningkatan kualitas: • Relasi dengan sistem nilai dan budaya untuk menjadi sistem pendukung otonomi dan keberdayaan masyarakat (*autonomy*)
							Total Nilai PKM = Nilai PK + Nilai ECG/2								

Konversi	Nilai	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
IT < 60 IP < 27	5	Kumuh Berat	Binaan	Indikator Prasyarat	Relasi dengan Pemerintah	JPEN (1-3 tahun)		
IP > 27 IC Komunitas	3-4	Kumuh Sedang	Sadar Aktif	Indikator Cara	Relasi dengan Diri Sendiri, Keluarga dan Lingkungan	JPEN (1-3 tahun)		
IT = 60 IP > 40 IC Kom. budaya	2-3	Kumuh Ringan	Kolaboratif Berdaya	Indikator Cara			JMEN (3-5 tahun)	
IT >= 80 IC Nilai budaya	1	Tidak Kumuh	Berdaya Berkelanjutan	Indikator Tujuan	Nilai Budaya			JPAN (> 5 tahun)

Indikator Pencapaian Kesejahteraan Psikologis/Kebahagiaan



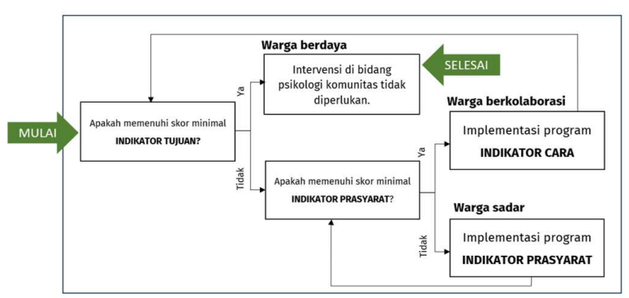
Untuk mencapai kebahagiaan, maka perlu ditetapkan indikator yang dapat menentukan program kerja yang cocok untuk warga yang sedang dibangun kesejahteraan psikologisnya.

Ada 3 indikator yang digunakan:

Indikator Tujuan (T) untuk mengukur tingkat kebahagiaan atau kesejahteraan psikologis masyarakat

Indikator Prasyarat (P) untuk mengukur relasi masyarakat dengan Pemerintah,

Indikator Cara (C) untuk mengetahui relasi individu, keluarga komunitas dan lingkungan dan nilai budaya,



Indikator Tujuan (IT): Kebahagiaan (*cut off skor* n=60)

No	Pertanyaan	Sangat Buruk	Buruk	Biasa Saja	Baik	Sangat Baik
		1	2	3	4	5
1	Apakah anda merasa senang tinggal di sini?					
2	Bagaimana kesehatan anda?					
3	Secara umum apakah anda merasa aman tinggal di sini?					
4	Seberapa sehat lingkungan tempat tinggal anda? (berkaitan dengan sarana prasarana)					
5	Seberapa puaskah anda dengan kondisi tempat anda tinggal saat ini?					
6	Menurut anda apakah pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk permukiman ini? (sarana prasarana)					
7	Apakah anda sering berkumpul dengan teman atau warga lain?					
8	Bagaimana hubungan antar warga?					
9	Seberapa puaskah anda dengan dukungan yang anda peroleh dari teman anda?					
10	Apakah anda senang dengan pekerjaan anda?					
11	Apakah penghasilan anda mencukupi kebutuhan anda?					
12	Apakah anda memiliki cukup energi untuk beraktivitas sehari-hari?					
15	Apakah anda puas dengan hidup anda saat ini?					
16	Seberapa sering anda pergi berekreasi?					
17	Seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan anda sehari-hari?					
18	Seberapa puaskah anda dengan akses anda pada layanan kesehatan?					
19	Seberapa puaskah anda dengan alat transportasi yang anda naiki atau kendarai?					
20	Seberapa sering anda memiliki perasaan negatif, seperti kesepian, putus asa, cemas, dan depresi?					

Indikator Prasyarat (IP): Relasi dengan Pemerintah (*cut off skor* n=27)

No	Pernyataan	Jawaban (Berilah tanda X sesuai penilaian anda)				
		1	2	3	4	5
1	Layanan publik yang disediakan pemerintah telah berjalan efektif					
2	Pemerintah telah memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi warga					
3	Pemerintah bertindak sesuai kepentingan publik.					
4	Pemerintah memperhatikan kesejahteraan warga.					
5	Pemerintah telah bekerja secara profesional.					
6	Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat secara tulus.					
7	Jika masyarakat membutuhkan bantuan, pemerintah akan mengupayakan yang terbaik untuk memberikan bantuan.					
8	Pemerintah tegas menerapkan hukum dan aturan demi terciptanya keteraturan.					
9	Hukum dan aturan yang diberlakukan pemerintah memastikan terciptanya keteraturan.					
10	Saya menghormati hukum dan aturan yang dibuat pemerintah.					

Indikator Cara (C): Pemenuhan Relasi Diri (C1), Relasi Keluarga (C2), Relasi Komunitas dan Lingkungan (C3), dan Relasi Nilai Budaya (C4)

Indikator terkait Kekumuhan	Keterkaitan dengan Komponen Kebahagiaan	Pertanyaan Panduan
Relasi dengan diri sendiri (**C1**)	*Autonomy, competence*	Bagaimana persepsi warga mengenai hidupnya secara keseluruhan?
		Bagaimana persepsi warga mengenai pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papannya?
		Bagaimana persepsi warga terkait dengan tugas perkembangannya? (Misal: bersekolah, bekerja)
		Bagaimana persepsi warga mengenai tingkat keamanan, keteraturan, dan kenyamanan lingkungannya?
Relasi dengan keluarga dan keluarga besar (**C2**)	*Belongingness, autonomy*	Bagaimana persepsi warga mengenai hubungannya dengan keluarga inti?
		Bagaimana persepsi orang tua dalam menjalankan peran sebagai orang tua?
		Bagaimana hubungan anak dengan orangtuanya?
		Bagaimana persepsi warga mengenai hubungannya dengan keluarga besar?
		Apakah terdapat kekerasan dalam rumah tangga?
Relasi dengan komunitas dan lingkungan (**C3**)	*Belongingness, autonomy*	Bagaimana persepsi warga terhadap komunitas dan lingkungannya?
		Bagaimana persepsi dan kepuasan warga mengenai ketersediaan akses sarana seperti air bersih, pengelolaan limbah, dan sebagainya di lingkungannya?
		Bagaimana persepsi dan kepuasan warga mengenai akses terhadap ruang-ruang publik (taman, aula, dsb.) di lingkungannya?
		Bagaimana persepsi dan kepuasan warga mengenai peraturan yang menjamin keteraturan dan kebebasan individu dalam menyampaikan haknya di komunitasnya?
Relasi dengan nilai-nilai budaya (**C4**)	*Belongingness, autonomy, competence*	Bagaimana warga mempersepsikan kesempatan mengekspresikan diri dan keterlibatannya dalam menunjukkan karya seni atau dalam kegiatan ritual massa yang dilakukan secara rutin (mis. Kegiatan keagamaan, ritual sosial/budaya)?
		Bagaimana persepsi warga mengenai kebiasaan, adat-istiadat yang menjadi ciri khas daerahnya?
		Sejauh mana warga terlibat dalam mempratikkan dan melestarikan warisan nilai-nilai budaya di lingkungannya?

Tabel 3.7 Scoring & Monev - Pemberdayaan Masyarakat: Kondisi Ekonomi Masyarakat - Ekonomi Kemasyarakatan (Tim Cegah Kumuh UPH & DPRKP, 2023)

ASPEK	KRITERIA PUPR 14/2018	KETERANGAN PENGUKURAN			DASAR PERATURAN	INDIKATOR	SUB-INDIKATOR	NILAI	PARAMETER (Rentang & analisis pengukuran (%)) & PENENTUAN PROKER	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	JPEN (1-3 tahun) (n=1)	JMEN (3-5 tahun) 100%	JPAN (> 5 tahun) 100%	KETERANGAN
												KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	KRITERIA KEBERHASILAN	
PERTIMBANGAN LAIN	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Pembangunan Kapasitas Manusia: Ekonomi Kemasyarakatan	Permukiman Binaan	Pembinaan dan pelatihan perekonomian kontekstual/tepat sasaran sesuai identifikasi.	UU No.1/2011 Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 Permen PUPR No.12/2020 SE DJCK No.30/SE/DC/2020 SE DJCK No.39/SE/DC/2020	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat.	Identifikasi & Pemeriksaan: 1. Potensi ekonomi masyarakat. 2.Legalitas dengan NIB. Menggunakan tabel Indikator Keberdayaan: **Nilai <59 sd 69 (Kurang, nilai 5)**	5	(n=5) Lokasi tidak memiliki potensi ekonomi tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara.	Pengarah Pokja PKP: • Sekretaris Daerah DKI. • Deputi Gub. DKI Jakarta Bid. Pengendalian Kependudukan & Permukiman. Ketua Pokja PKP: • Asisten Sekda Bid. PLH DKI. Ketua Pelaksana Harian Pokja PKP: • Kepala BAPPEDA DKI. Ketua Bid. Kelembagaan & Kemitraan: Ka. Biro Kerjasama Daerah Setda DKI	• Internal PD Pemprov DKI: DPPKUKM, DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, DPPAPP, Dinas Sosial, DPRKP, Diskominfotik. • Walikota/Bupati • Lurah/Camat.	• Identifikasi kondisi ekonomi, jenis pekerjaan / usaha (homogen atau heterogen). • Identifikasi penghasilan *erratic* atau stabil. • Identifikasi potensi ekonomi • Identifikasi persepsi Masyarakat tentang budaya, komunitas, inklusi sosial dan lingkungan.			
			Permukiman Sadar Aktif	Pembentukan Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*).			Identifikasi & Pemeriksaan: '1. Membuka Toko Online; 2. Melakukan transaksi melalui Akun Virtual Bank yang telah dibuat; 3. Peningkatan jumlah unit yang terjual; 4. Peningkatan presentase penjualan; 5. Peningkatan jumlah pelanggan, dan; 6. Peningkatan variasi Produk. '7 Pembentukan Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*) +H6 Menggunakan tabel Indikator Keberdayaan: **Nilai 70 sd 89 (Target Tercapai, nilai 4)**	4	(nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara.			• Identifikasi partisipasi Masyarakat dalam program-program peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi perekonomian. • Identifikasi pengembangan ekonomi. • Terbentuknya Komunitas Ekonomi (*Economic Community Group*)			
			Permukiman Kolaboratif Berdaya	• Penerapan Tata Kelola Bisnis & teknologi tepat guna. '• Pelatihan kontekstual u/ peningkatan kapasitas manusia dan peningkatan kualitas kelembagaan			Identifikasi & Pemeriksaan: '1. Peningkatan jumlah karyawan; 2. Peningkatan aset; 3. Peningkatan penggunaan aset; 4. Peningkatan modal usaha, modal kerja; 5. Melakukan pencatatan laporan keuangan; 6. Melakukan Digitalisasi Laporan Keuangan; 7. Peningkatan Produktivitas; 8. Program kolaborasi dan Kemitraan; 9. Penerapan teknologi tepat guna. Menggunakan tabel Indikator Keberdayaan: **Nilai 89 sd 90 (Baik, nilai 2-3)**	2-3	(nilai n antara 1-5) Lokasi memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara.				• Identifikasi peningkatan kompetensi yang diperlukan untuk membuka usaha. '• Tersusunnya rencana aksi masyarakat & stakeholders dalam peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas dan kompetensi.	
			Permukiman Berdaya Berkelanjutan	Mewujudkan otonomi ekonomi masyarakat melalui Komunitas Ekonomi Bersatu (*One ECG)* .			Identifikasi & Pemeriksaan: '1. Peningkatan laba perusahaan; 2. Penurunan biaya produksi per unit; 3. Kelayakan mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat); 4. Dukungan lembaga pendanaan (koperasi); 5. Bermitra dalam program promosi & festival. 6. Mewujudnya *One ECG* . Menggunakan tabel Indikator Keberdayaan: **Nilai 90 sd 100 (Baik Sekali, nilai 1)**	1	(n=1) Lokasi memiliki potensi tinggi ekonomi untuk dikembangkan atau dipelihara.					• Identifikasi & memberikan dukungan kepada masyarakat untuk melakukan upaya inovasi (kekhasan /memiliki karakteristik) '• Komunitas Ekonomi Bersatu (One ECG).	
							Total Nilai PKM = Nilai PK + Nilai ECG/2								

Konversi Nilai	Nilai	Kategori	Penyetaraan kategori Permukiman	Penanganan	Kata Kunci Proker	Proker		
<59-69	5	Kumuh Berat	Binaan	Pembinaan & Pelatihan Kontekstual	Identifikasi & Legalitas	JPEN (1-3 tahun)		
70-79	4	Kumuh Sedang	Sadar Aktif	ECG	Terbentuknya ECG dan mampu menyusun rencan aksi yang melibatkan *stakeholder* dan kemitraan kolaboratif	JPEN (1-3 tahun)		
80-89	2-3	Kumuh Ringan	Kolaboratif Berdaya	Peingkatan tata Kelola Bisnis			JMEN (3-5 tahun)	
90-100	1	Tidak Kumuh	Berdaya Berkelanjutan	One ECG	Inovasi dan One ECG			JPAN (> 5 tahun)

Indikator Keberdayaan Ekonomi

No	Kriteria	Scoring					Bobot
		Baik Sekali	Baik	Target	Kurang	Kurang sekali	
		5	4	3	2	1	
1	Memperoleh NIB/ legalitas usaha (95%)	>95%	94%-85%>	84-75%>	74%-65%>	64%>	1,00
2	Memperoleh akun virtual bank pemerintah (95% dari NIB)	>95%	94%-85%>	84-75%>	74%-65%>	64%>	1,00
3	Membuka toko online (70% dari NIB)	>70%	69%-65%>	64%-60%>	59%-55%>	54%>	2,00
4	Melakukan transaksi melalui akun virtual bank yang telah dibuat (70% dari memperoleh akun bank)	>70%	69%-65%>	64%-60%>	59%-55%>	54%>	3,00
5	Mengikuti pelatihan modul 1-9 (70% dari pembukaan toko online)	>70%	69%-65%>	64%-75%>	59%-55%>	54%>	2,00
6	Melakukan pencatatan laporan keuangan (95% dari UMKM/ECG yang sudah bertransaksi dengan akun bank virtual)	>95%	94%-85%>	84%-85%>	74%-65%>	64%>	3,00
7	Melakukan digitalisasi laporan keuangan (95% yang melakukan pencatatan keuangan)	>95%	94%-85%>	84%-85%>	74%-65%>	64%>	3,00
8	Mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat) (50% dari UMKM/ ECG yang melakukan pencatatan laporan keuangan)	>50%	49%-30%>	29%-10%	9%-1%>	0,9%>	5,00

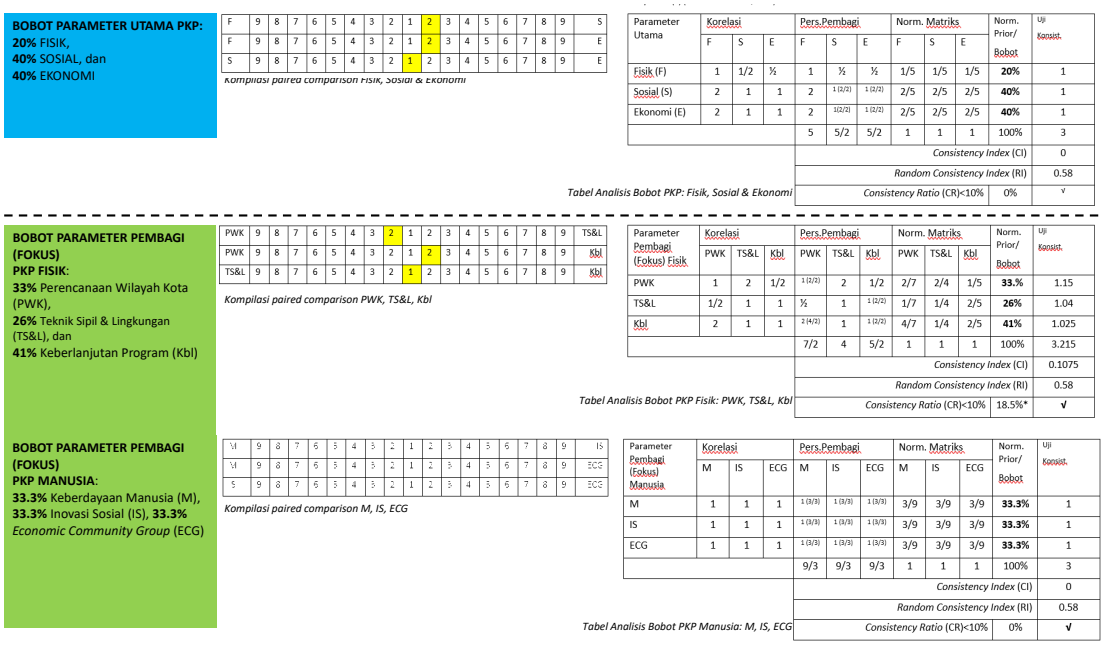
Kategori	Score	Karakteristik Partisipasi Warga di Permukiman
Baik sekali	90-100	Permukiman Berdaya Berkelanjutan
Baik	80-89	Permukiman Kolaboratif Berdaya
Target tercapai	70-79	Permukiman Sadar & Aktif
Kurang	60-69	Permukiman Binaan
Kurang sekali	<59	Permukiman Binaan



PENUTUP

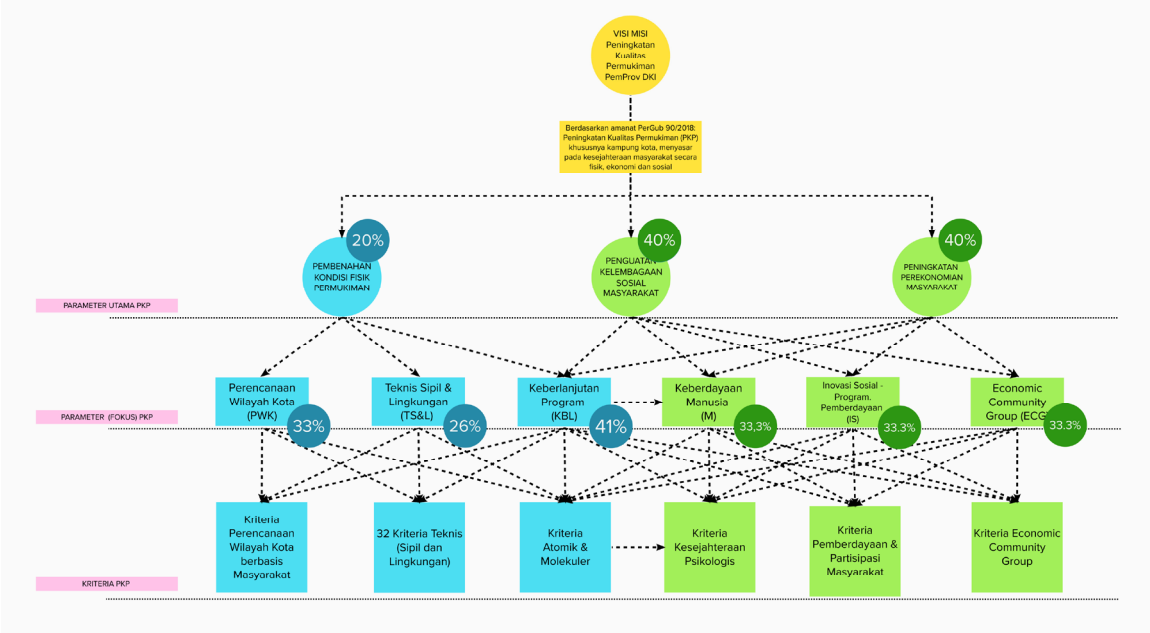
BAB 4 PENUTUP

Untuk mengetahui efektivitas pengaruh dari pembangunan fisik berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (nilai komunitas dan pembangunan kapasitas manusia) agar program Pencegahan Kekumuhan (CK) maupun Peningkatan Kualitas Permukiman (PKP) optimal dilakukan maka dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Saaty, 1990, 1993, 1994a dan b) dapat ditemukan bobot pengaruh masing-masing sebagai berikut:



Gambar 4.1 Perhitungan Bobot Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks Pencegahan Kekumuhan & Peningkatan Kualitas Permukiman (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

Relasi bobot pembangunan fisik berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (nilai komunitas dan pembangunan kapasitas manusia) dalam konteks CK maupun PKP bisa dilihat di bawah. Sebagai catatan ketegasan hukum selalu ada pada setiap tahap pembangunan fisik berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat (nilai komunitas dan pembangunan kapasitas manusia) .



Gambar 4.2 Relasi Bobot Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat di konteks Pencegahan Kekumuhan & Peningkatan Kualitas Permukiman (Tim 1 Cegah Kumuh, UPH, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.

Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2015). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, *83*(3), 583–601. https://doi.org/10.1177/0020852315585950

Healey, P. (2006): *Collaborative Planning – Shaping Places in Fragmented Societies,* Palgrave Macmillan, New York.

Katoppo, M. L. (2017). *DESAIN SEBAGAI GENERATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Disertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung.

Lefebvre, H. (1998): *The production of space,* Blackwell Publishers Ltd., Inc., Oxford, Massachusetts.

Lefebvre, H. (2008): *Critique of everyday life- volume 1,* Verso, London & New York.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, *55*(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Sachs, J. (2015). *The Age of Sustainability Development.* Columbia University Press.

Sanoff, H. (2000): *Community participation methods in design and planning,* John Wiley & Sons, Inc., Canada.

Saaty, T. L. (1990): *Decision making for leaders- the analytic hierarchy process for decisions in a complex world,* University of Pittsburgh, USA.

Saaty, T. L. (1993): *Pengambilan keputusan bagi para pemimpin – proses analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks,* PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Saaty, T. L. (1994a): *Decision making in economic, political, social and technological environments– with the anayitic hierarchy process. Vol. VII of the AHP Series,* University of Pittsburgh, USA.

Saaty, T. L. (1994b): *Fundamentals of decision making and priority theory – with the analyitic hierarchy process. Vol. VI of the AHP Series,* University of Pittsburgh, USA.

The WHOQOL Group. (1998). Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. The WHOQOL Group. *Psychological Medicine*, *28*(3), 551-558. https://doi.org/10.1017/s0033291798006667

Sumber Internet:

https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html

https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-rencana-pembangunan-daerah-tahun-2023-2026/

https://atrbpn.go.id/

https://www.bps.go.id/

https://www.jakarta.go.id/

https://www.pu.go.id/

Referensi Peraturan & Dokumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta (2017): *Dokumen Pendataan RW Kumuh DKI Jakarta 2017.*

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 -2026.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 490 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kampung Kota.

Rancangan Standar Operasional Prosedur & Standar Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkolaborasi dengan Fakultas Desain, Universitas Pelita Harapan.

Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, BAPPEDA.

Dokumen Diskusi Raperda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, DPRKP DKI Jakarta, 2020.

Naskah Akademik Raperda Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, DPRKP DKI Jakarta, 2020.

Kontrak 731/RR.02.01 dan 062/SPK-SoD-UPH/V/2023 dan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Konsep & Strategi Penanganan Permukiman Kumuh: Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Fakultas Desain, Universitas Pelita Harapan.

Nota Kesepakatan Bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Pelita Harapan No. 2034/HK.01.11 dan No. 137/R-UPH/VI/2022.

Referensi Undang-Undang, Peraturan dan Surat Edaran Pemerintah Republik Indonesia:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibukota Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman kumuh; dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan MBR.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/P RT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. 30/SE/DC/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya No. 39/SE/DC/2020 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan permukiman.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI DKI JAKARTA

DAG

UPH
School of
Design

UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN